



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM BENGKULU**

LAPORAN KEUANGAN Tahun 2025 Audited

**Kantor Wilayah Kementerian
Hukum Bengkulu
Kode Satker 692024**



BAGIAN ANGGARAN 135

SEKRETARIAT JENDERAL (01)



**LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025
AUDITED**

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU
(135.01.2600.692024KD)**

**KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2025**

Jalan Pangeran Natadirja Km. 7 Bengkulu

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu (692024) adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Hukum yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu (692024) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu (692024). Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bengkulu, 4 Mei 2026
Kuasa Pengguna Anggaran



Zulhairi

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	v
Daftar Grafik	vi
Pernyataan Tanggung Jawab	vii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
A.1 Dasar Hukum	7
A.2 Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu (692024)	9
A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	10
A.4 Basis Akuntansi	10
A.5 Dasar Pengukuran	10
A.6 Kebijakan Akuntansi	11
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	18
B.1 Pendapatan	18
B.2 Belanja	20
B.3 Belanja Pegawai	21
B.4 Belanja Barang	21
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	22
C.1 Aset Lancar	22
C.1.1 Pendapatan yang Masih Harus Diterima	22
C.1.2 Persediaan	23
C.2 Aset Tetap	24
C.2.1 Tanah	24
C.2.2 Peralatan dan Mesin	25
C.2.3 Gedung dan Bangunan	27
C.2.4 Aset Tetap Lainnya	27
C.2.5 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	28
C.3 Aset Lainnya	28
C.3.1 Aset Lain-lain	28
C.3.2 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	30

C.4	Kewajiban Jangka Pendek	30
C.4.1	Utang kepada Pihak Ketiga	30
C.4.2	Pendapatan Diterima Dimuka	30
C.5	Ekuitas	31
D.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	31
D.1	Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak	31
D.2	Beban Pegawai	32
D.3	Beban Persediaan	32
D.4	Beban Barang dan Jasa	32
D.5	Beban Pemeliharaan	33
D.6	Beban Perjalanan Dinas	33
D.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	34
D.8	Kegiatan Non Operasional	34
D.9	Pos Luar Biasa	35
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	35
E.1	Ekuitas Awal	35
E.2	Surplus (Defisit) LO	35
E.3	Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	35
E.3.1	Penyesuaian Nilai Aset	35
E.3.2	Koreksi Atas Reklasifikasi	35
E.3.3	Selisih Revaluasi Aset Tetap	36
E.3.4	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	36
E.3.5	Koreksi Lain-lain	36
E.4	Transaksi Antar Entitas	36
E.4.1	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	36
E.4.2	Transfer Masuk/Transfer Keluar	37
E.4.3	Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung	37
E.5	Ekuitas Akhir	38
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	38
F.1	Pengungkapan Lain-lain	38

VI. Lampiran dan Daftar

Lampiran A : Laporan yang dihasilkan Aplikasi MonSakti - Modul GLP

1. Neraca Percobaan Kas per 31 Desember 2025
2. Neraca Percobaan Akrual per 31 Desember 2025
3. Neraca per 31 Desember 2025

-
4. Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2025
 5. Laporan Realisasi Anggaran Belanja per 31 Desember 2025
 6. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan per 31 Desember 2025
 7. Laporan Operasional (LO) per 31 Desember 2025
 8. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) per 31 Desember 2025

Lampiran B : Laporan yang dihasilkan Aplikasi MonSakti - Modul Aset dan Persediaan

1. Laporan Persediaan per 31 Desember 2025
2. Laporan Posisi BMN di Neraca per 31 Desember 2025
3. Laporan Posisi BMN Neraca Saldo Awal
4. Laporan Barang Intrakomptabel per 31 Desember 2025
5. Laporan Barang Ekstrakomptabel per 31 Desember 2025
6. Laporan Barang Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel per 31 Desember 2025
7. Laporan Barang Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025
8. Laporan Penyusutan Barang Intrakomptabel per 31 Desember 2025
9. Laporan Penyusutan Barang Ekstrakomptebel per 31 Desember 2025
10. Laporan Penyusutan Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025

Lampiran C :

1. Hasil Rekonsiliasi SAKTI – SPAN periode 31 Desember 2025
2. LPJ Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025
3. Memo Penyesuaian

Tabel	Uraian Tabel	Hal
Tabel 1	Rincian Penyisihan Piutang Berdasarkan Kualitas Piutang	13
Tabel 2	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	15
Tabel 3	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	16
Tabel 4	Rincian Anggaran	18
Tabel 5	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2025	19
Tabel 6	Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2025 dan 2024	19
Tabel 7	Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2025	20
Tabel 8	Perbandingan Realisasi Belanja TA 2025 dan 2024	21
Tabel 9	Perbandingan Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024	21
Tabel 10	Perbandingan Belanja Barang TA 2025 dan 2024	22
Tabel 11	Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima	22
Tabel 12	Rincian Persediaan	23
Tabel 13	Rincian Tanah	25
Tabel 14	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	28
Tabel 15	Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya	30
Tabel 16	Rincian Utang kepada Pihak Ketiga	30
Tabel 17	Rincian Pendapatan Diterima di Muka	31
Tabel 18	Perbandingan Rincian Pendapatan LO TA 2025 dan 2024	31
Tabel 19	Rincian Beban Pegawai TA 2025 dan 2024	32
Tabel 20	Rincian Beban Persediaan TA 2025 dan 2024	32
Tabel 21	Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024	33
Tabel 22	Rincian Beban Pemeliharaan TA 2025 dan 2024	33
Tabel 23	Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2025 dan 2024	33
Tabel 24	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2025 dan 2024	34
Tabel 25	Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2025 dan 2024	34
Tabel 26	Rincian Pos Luar Biasa TA 2025 dan 2024	35
Tabel 27	Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas	36
Tabel 28	Rincian Transfer Masuk	37
Tabel 29	Rekening yang digunakan Bendahara Pengeluaran	38
Tabel 30	Rincian Nilai IKPA TA 2025	40

Grafik	Uraian Grafik	Hal
Grafik 1	Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja	20



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH BENGKULU

Jalan Pangeran Natadirja Km. 7 Bengkulu 38225

Telepon : (0736) 24743-22234, Faksimile (0736) 26304

Laman : <http://bengkulu.kemenkum.go.id>, Pos-el : kanwilbengkulu@kemenkum.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu (692024) yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 Audited sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bengkulu, 4 Mei 2026

Kuasa Pengguna Anggaran



Zulhairi





RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu (692024) Tahun Anggaran 2025 Audited ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp34.148.191,00 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0,00.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2025 adalah sebesar Rp14.092.337.659,00 atau mencapai 83,28 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp16.921.378.000,00

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp33.448.417.068,00 yang terdiri dari:

Aset Lancar sebesar Rp150.445.774,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp33.073.554,174,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp224.417.120,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp23.753.549,00 dan Rp33.424.663.519,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp31.516.970,00 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp16.112.726.942,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(16.081.209.972,00). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp1.437.500,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(16.079.772.472,00).



4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp0,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp(16.079.772.472,00) kemudian ditambah dengan koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas senilai Rp(7.450.812,00) dan transaksi antar entitas Rp49.511.886.803,00. Kenaikan ekuitas sebesar Rp33.424.663.519,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp33.424.663.519,00

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.



I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU (692024)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025		% thd Angg	2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	0.00	34,148,191.00	0.00	0.00
JUMLAH PENDAPATAN		0.00	34,148,191.00	0.00	0.00
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	9,632,667,000.00	9,588,181,516.00	99.54	0.00
Belanja Barang	B.4	6,297,627,000.00	4,504,156,143.00	71.52	0.00
Belanja Modal	B.5	991,084,000.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja		16,921,378,000.00	14,092,337,659.00	83.28	0.00

Bengkulu, 4 Mei 2026
Kuasa Pengguna Anggaran,



Zulhairi





II. NERACA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU (692024)

NERACA PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.1.1	986,074.00	0.00
Persediaan	C.1.2	149,459,700.00	0.00
Jumlah Aset Lancar		150,445,774.00	0.00
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1	15,329,825,000.00	0.00
Peralatan dan Mesin	C.2.2	10,707,681,181.00	0.00
Gedung dan Bangunan	C.2.3	24,328,322,496.00	0.00
Aset Tetap Lainnya	C.2.4	163,172,162.00	0.00
Akumulasi Penyusutan	C.2.5	(17,455,446,665.00)	0.00
Jumlah Aset Tetap		33,073,554,174.00	0.00
ASET LAINNYA	C.3		
Aset Lain-Lain	C.3.1	1,412,431,600.00	0.00
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.3.2	(1,188,014,480.00)	0.00
Jumlah Aset Lainnya		224,417,120.00	0.00
JUMLAH ASET		33,448,417,068.00	0.00
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.4		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1	22,301,494.00	0.00
Pendapatan Diterima Dimuka	C.4.2	1,452,055.00	0.00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		23,753,549.00	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN		23,753,549.00	0.00
EKUITAS			
Ekuitas	C.5	33,424,663,519.00	0.00
JUMLAH EKUITAS		33,424,663,519.00	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		33,448,417,068.00	0.00



Bengkulu, 4 Mei 2026
Kuasa Pengguna Anggaran,



Zulhairi



III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU (692024)

LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	31,516,970.00	0.00
JUMLAH PENDAPATAN		31,516,970.00	0.00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	9,588,181,516.00	0.00
Beban Persediaan	D.3	95,454,100.00	0.00
Beban Barang dan Jasa	D.4	2,895,169,137.00	0.00
Beban Pemeliharaan	D.5	828,527,705.00	0.00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	584,647,277.00	0.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	2,120,747,207.00	0.00
JUMLAH BEBAN		16,112,726,942.00	0.00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(16,081,209,972.00)	0.00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus Penjualan Aset Non Lancar		0.00	0.00
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0.00	0.00
Defisit Selisih Kurs		0.00	0.00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		1,437,500.00	0.00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0.00	0.00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.8	1,437,500.00	0.00
SURPLUS/DEFISIT DARI SEBELUM POS LUAR BIASA		(16,079,772,472.00)	0.00
POS LUAR BIASA	D.9		
Pendapatan PNB		0.00	0.00
Beban Perjalanan Dinas		0.00	0.00
Beban Persediaan		0.00	0.00
SURPLUS/DEFISIT LO		(16,079,772,472.00)	0.00



Bengkulu, 4 Mei 2026
Kuasa Pengguna Anggaran,



Zulhairi



IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU (692024)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	0.00	0.00
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(16,079,772,472.00)	0.00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	(7,450,812.00)	0.00
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1	(6,362,500.00)	0.00
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.2	0.00	0.00
SELISIH REVALUASI ASET	E.3.3	0.00	0.00
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.4	0.00	0.00
LAIN-LAIN	E.3.5	(1,088,312.00)	0.00
JUMLAH KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		(7,450,812.00)	0.00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	49,511,886,803.00	0.00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		33,424,663,519.00	0.00
EKUITAS AKHIR	E.5	33,424,663,519.00	0.00



Bengkulu, 4 Mei 2026
Kuasa Pengguna Anggaran,



Zulhairi



V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1 Dasar Hukum

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan Yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran;
15. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;



18. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.KU.05.01 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
19. Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-333.PB.02.01 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan BMN Berupa Aset Biologis di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
20. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor KEP-331/PB/2021 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
21. Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM Nomor PAS-19.OT.02.02 Tahun 2021 hal Pedoman Penatausahaan dan Penghapusan Barang Pada Kegiatan Latihan Keterampilan Dan Kegiatan Kerja Produksi di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan;
22. Petunjuk Pelaksanaan Teknis Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Implementasi Modul Komitmen, Persediaan, Aset Tetap, Piutang, dan *General Ledger* dan Pelaporan pada Sistem Akuntansi Tingkat Instansi (SAKTI) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SEK-1.PB.04.06 Tahun 2022;
23. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-52/PB/PB.6/2022 tanggal 7 Desember 2022 hal Pedoman Penggunaan Modul Piutang SAKTI bagi Kementerian Negara/Lembaga;
24. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-4/PB/PB.6/2023 tanggal 26 Januari 2023 hal Petunjuk Teknis Akuntansi 06: Laporan Keuangan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;
25. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-10/PB/PB.6/2023 tanggal 04 Februari 2023 hal Petunjuk Teknis Akuntansi 09 : Akuntansi Barang Milik Negara yang Memenuhi Karakteristik Properti Investasi pada Kementerian/Lembaga;
26. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-24/PB/PB.6/2023 tanggal 24 Agustus 2023 tentang Penggunaan Akun Khusus Covid-19;
27. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-27/PB/PB.6/2023 tanggal 20 September 2023 hal Penerapan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-8/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga;
28. Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-182/AG/AG.5/2023 tanggal 18 Mei 2023 hal Perubahan Nomenklatur Satuan Kerja dan Penetapan Kode Satuan Kerja dalam Referensi Aplikasi SAKTI dan SPAN Kementerian Keuangan;
29. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SEK-1.PB.04.01 Tahun 2023 Tentang Penatausahaan Barang Kelompok Berkebutuhan Khusus Pada Satuan Kerja



Pemasyarakatan;

30. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SEK-PB.05.06-301 tanggal 3 Desember 2021 hal Pedoman Penatausahaan BMN Kementerian Hukum dan HAM;
31. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nomor SEK.3-KU.04.01-46 tanggal 7 April 2026 hal Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Hukum Tahun 2025 Audited.

A.2 Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu (692024)

Kementerian Hukum berperan dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang hukum.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu (692024) merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum yang berkedudukan di setiap propinsi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu (692024) mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dalam wilayah provinsi Bengkulu berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu (692024) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian program, dan pengawasan di lingkungan kerja Kantor Wilayah Bengkulu;
2. Pembinaan di bidang hukum wilayah Bengkulu;
3. Penegakan hukum di bidang administrasi hukum umum, dan hak kekayaan intelektual wilayah Bengkulu;
4. Pelayanan hukum bagi masyarakat Bengkulu;
5. Pengembangan budaya hukum dan pemberian informasi hukum, penyuluhan hukum, dan diseminasi hak asasi manusia di wilayah Bengkulu;
6. Pelaksanaan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang administrasi di lingkungan Kantor Wilayah Bengkulu.



*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 Audited ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu (692024). Laporan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi yang merupakan intergasi dari beberapa aplikasi antara lain modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul bendahara, modul persediaan, modul aset tetap, modul pelaporan, dan modul administrator. Dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 Audited, modul yang digunakan adalah modul persediaan, modul aset, dan modul pelaporan. Modul Pelaporan (GLP) dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan modul aset tetap adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.4 Basis Akuntansi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu (692024) menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.5 Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu (692024) dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar



nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.6 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 Audited telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu (692024) adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementerian Hukum dan HAM RI adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan.
 - Pendapatan Jasa.
 - Pendapatan Pendapatan Lain-lain.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu



dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.



- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Rincian Penyisihan Piutang Berdasarkan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000



(satu juta rupiah);

- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang



Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan) dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga peroleh setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:



Tabel 3
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Panjang
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.



Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



*Penjelasan atas
Pos Laporan
Realisasi
Anggaran*

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu (692024) memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp16.921.378.000,00. Selama tahun 2025 dilakukan revisi atas DIPA Awal Kantor mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA Awal Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu (692024) yang disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4
Rincian Anggaran

Uraian	2025	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan dari Pengelolaan BMN serta Pendapatan dari Penjualan	0.00	0.00
Pendapatan Jasa Lainnya	0.00	0.00
Pendapatan Lain-lain	0.00	0.00
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0.00	0.00
Jumlah Pendapatan	0.00	0.00
Belanja		
Belanja Pegawai	10,690,845,000.00	9,632,667,000.00
Belanja Barang	5,987,449,000.00	6,297,627,000.00
Belanja Modal	991,084,000.00	991,084,000.00
Jumlah Belanja	17,669,378,000.00	16,921,378,000.00

Selama tahun 2025 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu (692024) melakukan revisi sebanyak 16 (enam belas) kali revisi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024 – 2029, Kementerian Hukum dan HAM dipecah menjadi Kementerian Koordinator Hukum, Imigrasi dan Pemasarakatan, dan HAM, Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, dan Kementerian HAM.

Pada tahun anggaran 2025 ini terdapat blokir anggaran sebesar Rp2.659.825.000,00 sehingga anggaran yang dapat digunakan sebesar Rp14.261.553.000,00.

*Realisasi
Pendapatan
Rp34.148.191,00*

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp34.148.191,00 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0,00. Pendapatan di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu (692024)



berasal dari Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN dan Pendapatan Lain-lain.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2025

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0.00	32,618,353.00	0.00
Pendapatan Denda	0.00	92,338.00	0.00
Pendapatan Lain-lain	0.00	1,437,500.00	0.00
Jumlah	0.00	34,148,191.00	0.00

Realisasi Pendapatan TA 2025 di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu (692024) mengalami penurunan sebesar 100,00 persen dibandingkan realisasi Pendapatan TA 2024. Penurunan ini disebabkan karena Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024 – 2029, sehingga adanya perubahan nomenklatur, kode bagan anggaran, dan kode satker serta pemisahan tugas dan fungsi dari masing-masing kementerian..

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu (692024) mengalami penurunan Pendapatan dari Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dibandingkan realisasi TA 2024 dari sebesar Rp0,00 menjadi Rp32.618.353,00 yang berasal dari pendapatan sewa tanah, gedung, berupa sewa rumah dinas.

Pendapatan Denda berupa denda atas keterlambatan pekerjaan renovasi aula sebesar Rp92.338,00

Satuan kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu memiliki 9 (sembilan) rumah dinas.

Pendapatan Lain-lain berupa pengembalian belanja pegawai TAYL berasal dari pengembalian kelebihan pembayaran Gaji Pokok dari bulan April s.d Desember tahun 2024 dan bulan ke-13 an. EFRIANI sebesar Rp1.437.500,00.

Tabel 6
Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024	Naik (Turun) %
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	32,618,353.00	0.00	(100.00)
Pendapatan Denda	92,338.00	0.00	(100.00)
Pendapatan Lain-lain	1,437,500.00	0.00	(100.00)
Jumlah	34,148,191.00	0.00	(100.00)



*Realisasi Belanja
Negara
Rp14.092.337.659,
00*

B.2. BELANJA

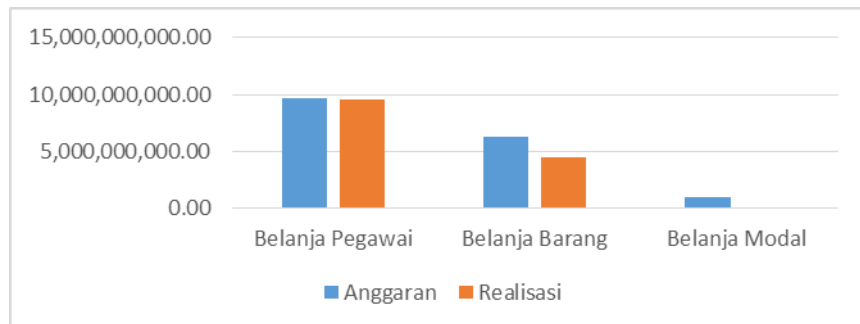
Realisasi Belanja pada TA 2025 adalah sebesar Rp14.092.337.659,00 atau 83,28 persen dari anggaran belanja sebesar Rp16.921.378.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 tersaji sebagai berikut:

*Tabel 7
Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2025*

Uraian	Tahunan TA 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	9,632,667,000.00	9,599,254,696.00	99.65
Belanja Barang	6,297,627,000.00	4,504,422,643.00	71.53
Belanja Modal	991,084,000.00	0.00	0.00
Total Belanja Kotor	16,921,378,000.00	14,103,677,339.00	83.35
Pengembalian Belanja	0.00	11,339,680.00	0.00
Total Belanja	16,921,378,000.00	14,092,337,659.00	83.28

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

*Grafik 1
Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja*



Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 100,00 persen dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan karena Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024 – 2029, sehingga adanya perubahan nomenklatur, kode bagan anggaran, dan kode satker serta pemisahan tugas dan fungsi dari masing-masing kementerian.



Tabel 8
Perbandingan Realisasi Belanja TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	9,588,181,516.00	0.00	(100.00)
Belanja Barang	4,504,156,143.00	0.00	(100.00)
Belanja Modal	0.00	0.00	0.00
Jumlah	14,092,337,659.00	0.00	(100.00)

Belanja Pegawai
Rp9.588.181.516,00

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp9.588.181.516,00 dan Rp0,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Berdasarkan tabel perbandingan belanja pegawai, realisasi belanja TA 2025 mengalami penurunan sebesar 100,00 persen dari realisasi belanja TA 2024. Hal ini disebabkan karena Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024 – 2029, sehingga adanya perubahan nomenklatur, kode bagan anggaran, dan kode satker serta pemisahan tugas dan fungsi dari masing-masing kementerian.

Rincian realisasi belanja pegawai TA 2025 dan TA 2024 tersaji sebagai berikut:

Tabel 9
Perbandingan Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	9,421,992,696.00	0.00	(100.00)
Belanja Lembur	177,262,000.00	0.00	(100.00)
Jumlah Belanja Kotor	9,599,254,696.00	0.00	(100.00)
Pengembalian Belanja Pegawai	11,073,180.00	0.00	(100.00)
Jumlah Belanja	9,588,181,516.00	0.00	(100.00)

Belanja Barang
Rp4.504.156.143,00

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.504.156.143,00 dan Rp0,00.

Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami penurunan sebesar 100,00 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2024 hal ini disebabkan oleh Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024 – 2029, sehingga adanya perubahan



nomenklatur, kode bagan anggaran, dan kode satker serta pemisahan tugas dan fungsi dari masing-masing kementerian

Tabel 10
Perbandingan Belanja Barang TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	1,566,529,785.00	0.00	(100.00)
Belanja Barang Non Operasional	122,826,950.00	0.00	(100.00)
Belanja Jasa	1,204,808,826.00	0.00	(100.00)
Belanja Pemeliharaan	869,148,405.00	0.00	(100.00)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	584,913,777.00	0.00	(100.00)
Belanja Barang Persediaan	156,194,900.00	0.00	(100.00)
Jumlah Belanja Kotor	4,504,422,643.00	0.00	(100.00)
Pengembalian Belanja	266,500.00	0.00	(100.00)
Jumlah Belanja	4,504,156,143.00	0.00	(100.00)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Aset Lancar

Aset Lancar
Rp150.445.774,00

Saldo Aset Lancar Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu (692024) per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp150.445.774,00 dan Rp0,00.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

C.1.1 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Piutang Bukan Pajak
Rp986,074,00

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp986.074,00 Rp0,00. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima disajikan disajikan sebagai berikut:

Tabel 11
Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Uraian	TA 2025	TA 2024
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	986,074.00	0.00
Jumlah	986,074.00	0.00

Pendapatan yang Masih Harus Diterima sebesar Rp986.074,00 ini berupa sewa kantin yang terhutang pada tahun 2024 yang berdasarkan dari rekomendasi dari surat Plt. Inspektur Jenderal Nomor ITJ-PW.05.01-59 tanggal 9 Oktober 2025 hal Surat Informasi atas Reviu terhadap Sewa



Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu yang dilaksanakan sebelum ditetapkannya persetujuan oleh Pengelola Barang dan telah dilakukan pembayarannya di bulan Januari 2026, dengan NTPN 7E76B61QVM6TTKFU tanggal 22 Januari 2026 senilai Rp986.074,00.

Persediaan

Rp149.459.700,00

C.1.2 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp149.459.700,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 12
Rincian Persediaan

Persediaan	2025	2024
Barang Konsumsi	133,028,000.00	0.00
Barang untuk Pemeliharaan	16,431,700.00	0.00
Jumlah	149,459,700.00	0.00

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik berupa :

1. Alat Tulis senilai Rp5.537.000,00;
2. Penjepit Kertas senilai Rp4.992.000,00;
3. Penghapus/Korektor senilai Rp132.000,00;
4. Buku Tulis senilai Rp3.625.000,00;
5. Odner dan Map senilai Rp27.235.000,00;
6. Penggaris senilai Rp430.000,00;
7. Cutter (Alat Tulis Kantor) senilai Rp443.000,00;
8. Alat Perekat senilai Rp3.290.500,00;
9. Staples senilai Rp2.002.500,00;
10. Isi Staples senilai Rp1.500.000,00;
11. Alat Tulis Kantor Lainnya senilai Rp3.582.500,00;
12. Kertas HVS senilai Rp11.600.000,00;
13. Berbagai Kertas Rp1.827.500,00;
14. Amplop senilai Rp1.145.000,00;
15. Tinta/Toner Printer senilai Rp46.200.000,00;
16. Flashdisk senilai Rp35.000,00;
17. Materai senilai Rp250.000,00;
18. Kunci, Kran, dan Semprotan senilai Rp6.420.200,00;
19. Peralatan Ledeng senilai Rp626.000,00;
20. Kuas senilai Rp138.500,00;
21. Perabotan Kantor Lainnya senilai Rp9.247.000,00;
22. Kabel Listrik senilai Rp3.762.000,00;
23. Stop Kontak senilai Rp520.000,00;



24. Saklar senilai Rp1.210.000,00;
25. Stacker senilai Rp975.000,00;
26. Balast senilai Rp2.570.000,00;
27. Vitting senilai Rp350.000,00;
28. Batu Baterai senilai Rp2.612.000,00;
29. Alat Listrik Lainnya senilai Rp7.202.000,00.

Aset Tetap

Rp33.073.554.174,0

0

C.2 Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu (692024) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp33,073,554,174,00 dan Rp0,00.

Aset Tetap merupakan aset berubah yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu (692024) berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, dan Gedung dan Bangunan.

Tanah

Rp15.329.825.000,0

0

C.2.1 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu (692024) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp15,329,825.000,00 dan Rp0,00.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu mempunyai 8 (delapan) aset tanah yang berlokasi di beberapa kabupaten di provinsi Bengkulu.

Terdapat 7 (tujuh) aset tanah telah mempunyai sertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dari 7 (tujuh) aset tanah ini terdapat 1 (satu) aset tanah yang berlokasi di Kabupaten Muko-muko bersertifikat sebagian sesuai ketentuan karena sebagian lainnya bertanah gambut.

Dan 1 (satu) aset tanah di Kabupaten Bengkulu Utara (Kecamatan Lais) belum bersertifikat sesuai ketentuan.



Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 13
Rincian Tanah

NO	LOKASI TANAH	NUP	LUAS (M2)	BUKTI KEPEMILIKAN	PERUNTUKAN	NILAI
1	Jl. Kapuas Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu	1	5,005	SHP No.32	Rumah Dinas Pejabat Struktural	4,234,388,000.00
2	Jl. Musi Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu	2	587	SHP No.22	Rumah Dinas Kakanwil	509,667,000.00
3	Desa Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu	1	29,119	SHP No.00163	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	764,541,000.00
			15,824	HP.01/564-17.16/XI/2023	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	
4	Jl. Raya Lais Desa Pal 30 Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi	2	3,493	SHP No.P.01/L	Tanah Bangunan Sidang Zitting Plaat (Terindikasi Idle)	251,040,000.00
5	Desa Padang Petron Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu	3	37,260	SHP No. 10044	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	745,200,000.00
6	Jl. Pangeran Natadirja Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota	4	3,000	SHP No.05	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu	8,055,000,000.00
7	Jl. Raya Masmambang Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu	5	1,692	SHP No. P.301/LT	Tanah Bangunan Sidang Zitting Plaat (Terindikasi Idle)	290,171,000.00
8	Jl. Raya Taba Pasma Desa Taba Pasma Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu	6	1,920	SHP No.01	Tanah Bangunan Sidang Zitting Plaat (Terindikasi Idle)	479,818,000.00
Jumlah						15,329,825,000.00

Aset Tanah yang berlokasi di Desa Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu dengan total luas tanah hibah 44.973 m², tanah seluas 29.119 m² yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00163 tanggal 7 Desember 2023 berdasarkan Surat Ukur Nomor 02741/2023 tanggal 23 November 2023 dan sisa tanah seluas 15.854 m² belum dapat diterbitkan sertifikat karena masih termasuk dalam Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha (PIPIB) sebagai wilayah lahan gambut. Sehubungan dengan belum terdapatnya Surat Persetujuan Revisi PIPIB dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan perubahan nomenklatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi Kementerian Hukum dimana peruntukan awal dalam Tujuan Pemberian Hibah untuk Pembangunan Lembaga Pemasarakatan di Kabupaten Mukomuko yang sudah tidak menjadi Rencana Strategis pada Indikator Kinerja Utama pada Kementerian Hukum.

Peralatan dan

Mesin

Rp10.707.681.181,00

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp10.707.681.181,00 dan Rp0,00.

Mutasi Aset nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai



berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	0.00
Mutasi tambah:	
Saldo Awal	0.00
Pembelian	0.00
Transfer Masuk	221,713,288.00
Likuidasi Masuk	10,478,367,893.00
Perolehan Lainnya	7,600,000.00
Reklasifikasi Masuk	38,750,000.00
Koreksi Pencatatan	0.00
Mutasi kurang:	
Transfer Keluar	0.00
Reklasifikasi Keluar	38,750,000.00
Reklasifikasi dari Aet Tetap ke Aset Lainnya	0.00
Penghapusan	0.00
Koreksi Pencatatan	0.00
Saldo per 31 Desember 2025	10,707,681,181.00
Akumulasi Penyusutan s.d.31 Desember 2025	(8,984,846,366.00)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	1,722,834,815.00

Berikut rincian transfer masuk peralatan dan mesin per 31 Desember 2025:

No.	Uraian	Kuantitas	Nilai
1	Televisi	1	63,507,620.00
2	Bracket Standing Peralatan	1	9,292,840.00
3	Mini Komputer	1	16,902,676.00
4	P.C Unit	2	63,952,500.00
5	Lap Top	1	24,697,500.00
6	Printer	2	20,809,392.00
7	Scanner	1	22,550,760.00
Total			221,713,288.00

Berikut rincian likuidasi masuk peralatan dan mesin per 31 Desember 2025:

No.	Uraian Likuidasi	Kuantitas	Nilai
1	Alat Bantu	2	442,415,000.00
2	Alat Angkutan darat Bermotor	11	951,267,453.00
3	Alat Kantor	69	1,748,039,682.00
4	Alat Rumah Tangga	603	1,861,676,834.00
5	Alat Studio	31	492,113,108.00
6	Alat Komunikasi	43	177,389,313.00
7	Alat Kedokteran	190	549,050,000.00
8	Alat Khusus Kepolisian	1	38,750,000.00
9	Komputer Unit	201	2,865,463,677.00
10	Peralatan Komputer	92	1,328,702,826.00
11	Alat SAR	1	23,500,000.00
Total			10,478,367,893.00

Terdapat Perolehan Lainnya senilai Rp7.600.000,00 berupa meja rapat sebanyak 3 (tiga) unit atas temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum sesuai dengan surat Inspektur Jenderal Nomor ITJ-PW.03.01-128 tanggal 20 Oktober 2025 hal Petunjuk Penanganan dan Penertiban Hasil Audit Ketaatan atas Pengelolaan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu Tahun Anggaran 2025, dan Reklasifikasi Masuk senilai Rp38.750.000,00 atas Camera Digital.



*Gedung dan
Bangunan
Rp24.328.322.496,0
0*

C.2.3 Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp24.328,322.496,00 dan Rp0,00 .

Mutasi Aset nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024		0.00
Mutasi tambah:		
Saldo Awal		0.00
Pembelian		0.00
Likuidasi Masuk	24,338,322,496.00	
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah		0.00
Transfer Masuk		0.00
Reklasifikasi Masuk		0.00
Pengembangan Melalui KDP		0.00
Mutasi kurang:		
Transfer Keluar		0.00
Reklasifikasi Keluar		0.00
Penghentian aset dari penggunaan		0.00
Penghapusan		0.00
Koreksi Pencatatan	10,000,000.00	
Saldo per 31 Desember 2025		24,328,322,496.00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025		(8,470,600,299.00)
Nilai Buku per 31 Desember 2025		15,857,722,197.00

Adapun rincian mutasi tambah Gedung dan Bangunan merupakan likuidasi masuk dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Likuidasi	Kuantitas	Nilai
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	20,075,091,633.00
2	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	66,045,000.00
3	Bangunan Gedung Instalasi Lainnya	1	33,022,000.00
4	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	333,177,000.00
5	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	1	129,624,000.00
6	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	2	1,121,548,581.00
7	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	5	1,903,357,141.00
8	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	2	521,918,153.00
9	Pagar Permanen	1	154,538,988.00
Total			24,338,322,496.00

Adapun rincian mutasi kurang Gedung dan Bangunan merupakan koreksi pencatatan nilai berkurang atas Pagar Permanen senilai Rp10.000.000,00 berdasarkan temuan Inspektorat Jenderal Tahun 2017 dengan Nomor ITJ.PW.03.01.VI-07 tanggal 6 Februari 2017.

*Aset Tetap Lainnya
Rp163.172.162,00*

C.2.4. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp163.172.162,00 dan Rp0,00.

Mutasi Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:



Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	0.00
Mutasi tambah:	
Saldo Awal	0.00
Pembelian	0.00
Likuidasi	150,172,162.00
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0.00
Transfer Masuk	13,000,000.00
Reklasifikasi Masuk	0.00
Pengembangan Melalui KDP	0.00
Mutasi kurang:	
Transfer Keluar	0.00
Reklasifikasi Keluar	0.00
Penghentian aset dari penggunaan	0.00
Penghapusan	0.00
Koreksi Pencatatan	0.00
Saldo per 31 Desember 2025	163,172,162.00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	0.00
Nilai Buku per 31 Desember 2025	163,172,162.00

*Akumulasi
 Penyusutan Aset
 Tetap
 Rp17.455.446.665,0
 0*

C.2.5 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp17.455.446.665,00 dan Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Tabel 14
 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	10,707,681,181.00	8,984,846,366.00	1,722,834,815.00
2	Gedung dan Bangunan	24,328,322,496.00	8,470,600,299.00	15,857,722,197.00
Akumulasi Penyusutan		35,036,003,677.00	17,455,446,665.00	17,580,557,012.00

*Aset Lainnya
 Rp224.417.120,00*

C.3 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu (692024) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp228.417.120,00 dan Rp0,00.

*Aset Lain-Lain
 Rp1.412.431.600,00*

C.3.1 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp1.412.431.600,00 dan Rp0,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Kantor Wilayah Kementerian



Hukum Bengkulu (692024) serta dalam proses penghapusan dari BMN. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	0.00
Mutasi tambah:	
Likuidasi Masuk	1,412,431,600.00
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	0.00
Mutasi kurang:	
Tansfer keluar	0.00
Penggunaan kembali BMN yang dihentikan	0.00
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	0.00
Saldo per 31 Desember 2025	1,412,431,600.00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	(1,188,014,480.00)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	224,417,120.00

Adapun Rincian mutasi tambah Aset Lain-lain merupakan likuidasi masuk dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Likuidasi	Kuantitas	Nilai
1	Mesin Fotocopy Electronic	1	39,717,180.00
2	Filing Cabinet Besi	2	6,725,000.00
3	Buffet	1	3,500,000.00
4	LCD Projector/Infocus	1	10,950,000.00
5	Meja Kerja Kayu	1	1,114,000.00
6	Kursi Besi/Metal	40	14,476,000.00
7	A.C. Split	11	58,989,375.00
8	Uninterruptible Power Supply (UPS)	4	21,812,699.00
9	Camera Digital	4	53,708,700.00
10	Video Conference	1	446,600,000.00
11	Drone	1	18,981,000.00
12	Genset	1	64,000,000.00
13	P.C Unit	10	102,732,746.00
14	Lap Top	5	68,876,900.00
15	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	6,600,000.00
16	External/ Portable Hardisk	2	2,400,000.00
17	Server	1	110,880,000.00
18	Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plaat	5	380,368,000.00
Total			1,412,431,600.00

Aset Lain-lain senilai Rp1.412.431.600,00 rencananya akan dilakukan usul penghapusan ke Biro BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum pada Semester I Tahun 2026 ini.



*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp1,188.014,480,00*

C.3.2 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1,188,014,480,00 dan Rp0,00. Rincian akumulasi amortisasi dan penyusutan aset lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 15
Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Lain-lain	1,412,431,600.00	1,188,014,480.00	224,417,120.00
Jumlah	1,412,431,600.00	1,188,014,480.00	224,417,120.00

*Kewajiban Jangka
Pendek
Rp23.753.549,00*

C.4 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu (692024) per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp23.753.549,00 dan Rp0,00.

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp22.301.494,00*

C.4.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp22.301.494,00 dan Rp0,00. Rincian utang kepada pihak ketiga adalah sebagai berikut:

Tabel 16
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

No.	Uraian	Jumlah
1	Beban Listrik Bulan Desember 2025	20,210,219.00
2	Beban Air Bulan Desember 2025	1,899,800.00
3	Beban Telepon Bulan Desember 2025	191,475.00
Jumlah		22,301,494.00

*Pendapatan
Diterima di Muka
Rp1.452.055,00*

C.4.2 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp1.452.055,00 dan Rp0,00.

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor



ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 17
Rincian Pendapatan Diterima di Muka

No.	Uraian	Jumlah
1	Sewa Kantin per 1 Agustus 2025 s.d 31 Desember 2025	1,452,055.00
Jumlah		1,452,055.00

Ekuitas

Rp33.424.663.519,0

0

C.5 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp33.424.663.519,00 dan Rp0,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP

Rp31.516.970,00

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp31.516.970,00 dan Rp0,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 18
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	31,424,632.00	0.00	(100.00)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	92,338.00	0.00	(100.00)
Jumlah	31,516,970.00	0.00	(100.00)

Pendapatan tersebut berasal dari:

1. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan senilai Rp28.918.353,00 berupa sewa rumah dinas sebanyak 9 (sembilan) unit rumah di 2 (dua) lokasi yang berbeda dan sewa kantin terhutang tahun 2024 dan sewa kantin tahun 2025 senilai Rp2.506.279,00;
2. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah senilai Rp92.338,00.



Beban Pegawai

Rp9.588.181.516,00

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp9.588.181.516,00 dan Rp0,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 19
Rincian Beban Pegawai TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	9,421,992,696.00	0.00	(100.00)
Beban Lembur	177,262,000.00	0.00	(100.00)
Pengembalian	(11,073,180.00)	0.00	(100.00)
Jumlah	9,588,181,516.00	0.00	(100.00)

Beban Persediaan

Rp95.454.100,00

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp95.454.100,00 dan Rp0,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 20
Rincian Beban Persediaan TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	95,454,100.00	0.00	(100.00)
Jumlah Beban Persediaan	95,454,100.00	0.00	(100.00)

Beban Barang dan

Jasa

Rp2.895.169.137,00

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.895.169.137,00 dan Rp0,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap, dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 21
Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Operasional	1,566,529,785.00	0.00	(100.00)
Beban Barang Non Operasional	122,826,950.00	0.00	(100.00)
Beban Langganan Daya dan Jasa	302,982,402.00	0.00	(100.00)
Belanja Sewa	902,830,000.00	0.00	(100.00)
Jumlah	2,895,169,137.00	0.00	(100.00)

*Beban
Pemeliharaan
Rp826.527.705,00*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp828.527.705,00 dan Rp0,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk TA 2025 dan TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 22
Rincian Beban Pemeliharaan TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN)%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	479,503,958.00	0.00	(100.00)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	118,367,000.00	0.00	(100.00)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	230,656,747.00	0.00	(100.00)
Jumlah	828,527,705.00	0.00	(100.00)

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp584.647.277,00*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp584.647.277,00 dan Rp0,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 23
Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN)%
Beban Perjalanan Biasa	567,242,334.00	0.00	(100.00)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2,100,000.00	0.00	(100.00)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	15,571,443.00	0.00	(100.00)
Pengembalian	(266,500.00)	0.00	(100.00)
Jumlah	584,647,277.00	0.00	(100.00)



*Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp2.120.747.207,00*

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.120.747.207,00 dan Rp0,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Tabel 24
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2025 dan 2024*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	919,509,909.00	0.00	(100.00)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1,191,731,838.00	0.00	(100.00)
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi	9,505,460.00	0.00	(100.00)
Jumlah Penyusutan	2,120,747,207.00	0.00	(100.00)
Beban Amortisasi Aset Lain-lain	0.00	0.00	0.00
Jumlah Amortisasi	0.00	0.00	(100.00)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	2,120,747,207.00	0.00	(100.00)

*Surplus/Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp1.437.500,00*

D.8 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional TA 2025 dan TA 2024 adalah sebagai berikut:

*Tabel 25
Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2025 dan 2024*

URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0.00	0.00	0.00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0.00	0.00	0.00
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0.00	0.00	0.00
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0.00	0.00	0.00
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0.00	0.00	0.00
Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0.00	0.00	0.00
Pendapatan dari Kegiatan non Operasional Lainnya	1,437,500.00	0.00	(100.00)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0.00	0.00	0.00
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,437,500.00	0.00	(100.00)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	1,437,500.00	0.00	(100.00)



*Defisit Pos Luar
Biasa Rp0,00*

D.9 Defisit Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk TA 2025 dan TA 2024 adalah sebagai berikut:

*Tabel 26
Rincian Pos Luar Biasa TA 2025 dan 2024*

URAIAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB	0,00	0,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00
Beban Persediaan	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp0,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

*Surplus (defisit) LO
Rp(16.079.772.472,00)*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah defisit sebesar Rp(16.079.772.472,00) dan Rp0,00. Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

*Koreksi yang Menambah/
Mengurangi Ekuitas
Rp(7.450.812,00)*

E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Nilai Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp(7.450.812,00) dan Rp0,00.

*Penyesuaian Nilai
Aset Tetap Rp0,00*

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Atas
Reklasifikasi
Rp0,00*

E.3.2 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi atas reklasifikasi merupakan koreksi yang muncul pada saat dilakukan atas aset tetap ataupun persediaan. Koreksi atas reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.



*Selisih Revaluasi Aset
Tetap Rp0,00*

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

*Koreksi Aset Non
Revaluasi
Rp(6.362.500,00)*

E.3.4 Koreksi Aset Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp(6.362.500,00) dan Rp0,00.

Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Koreksi Lain-Lain
Rp(1.088.312,00)*

E.3.5 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp(1.088.312,00) dan Rp0,00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

*Transaksi Antar Entitas
Rp49.511.886.803,00*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp49.511.886.803,00 dan Rp0,00. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

*Tabel 27
Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas*

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Diterima dari Entitas Lain	(34,148,191.00)
Ditagihkan ke Entitas Lain	14,092,337,659.00
Transfer Masuk	35,453,697,335.00
Transfer Keluar	0.00
Pengesahan Hibah Langsung	0.00
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	0.00
Jumlah	49,511,886,803.00

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DDEL sebesar Rp34.148.191,00, sedangkan DKEL sebesar



Rp14.092.337.659,00.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas keentitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp35.453.697.335,00 terdiri dari:

Tabel 28
Rincian Transfer Masuk

No.	Jenis	Entitas Asal	Nilai
Persediaan			
1	Barang Konsumsi	409175	16,734,468.00
Jumlah			16,734,468.00
Aset Tetap			
1	Tanah	409175	15,329,825,000.00
2	Peralatan dan Mesin	409175	10,478,367,893.00
		692003	93,393,252.00
		692064	38,616,900.00
		693011	89,703,136.00
3	Gedung dan Bangunan	409175	24,338,322,496.00
4	Aset Tetap Lainnya	409175	150,172,162.00
		693112	13,000,000.00
5	Akumulasi Penyusutan	409175	(15,347,842,418.00)
Jumlah			35,183,558,421.00
Aset Lainnya			
1	Aset Lain-lain	409175	1,412,431,600.00
2	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	409175	(1,178,509,020.00)
Jumlah			233,922,580.00
Transaksi GLP			
1	Transaksi Jurnal Penyesuaian	409175	19,481,866.00
Jumlah			19,481,866.00
Jumlah			35,453,697,335.00

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN.

Pengesahan hibah langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah Rp0,00.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas



pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2025 adalah Rp0,00.

Ekuitas Akhir

Rp33.424.663.519,00

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp33.424.663.519,00 dan Rp0,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Daftar Rekening Bendahara Pengeluaran

Rekening yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 29
Rekening yang digunakan Bendahara Pengeluaran

Nama Rekening	Nomor Rekening	Nama Bank	Nomor Persetujuan Rekening	Keterangan
BPG 016 KANWIL KEMENKUM BENGKULU	654926920241000	BRI	S-190/KPN.1205/2025 Tanggal 30 Januari 2025	

Penjelasan Atas Perubahan Kode Satker Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024 – 2029, Kementerian Hukum dan HAM dipecah menjadi Kementerian Koordinator Hukum, Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan HAM, Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan Kementerian HAM. Berkenaan hal tersebut menyebabkan adanya perubahan nomenklatur, kode bagan anggaran, dan kode satker serta pemisahan tugas dan fungsi dari masing-masing kementerian.

SEMULA TAHUN 2024					
BA	Nama BA	Eselon I	Nama Eselon	Kode Satker	Nama Satker
013	Kementerian Hukum dan HAM	01	Sekretariat Jenderal	409175	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

MENJADI TAHUN 2025					
BA	Nama BA	Eselon I	Nama Eselon	Kode Satker	Nama Satker
135	Kementerian Hukum	01	Sekretariat Jenderal	692024	Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu



Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran

A. Penjelasan Capaian Output Strategis Kementerian

Selama periode Tahun Anggaran 2025, output yang telah dicapai oleh:
 Satker Kantor Kementerian Hukum Bengkulu (692024) sebagai berikut:
 Program Dukungan Manajemen

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Ket
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5.00	6	7	8	9	10
135.01. WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN								
1558	Kegiatan Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif								
EBA.001	Pengelolaan BMN Kantor Wilayah	139,689,000	72,106,482	51.62	2	2	laporan	100	
EBA.002	Layanan Kerja Sama	26,629,000	-	0.00	1	1	laporan		
EBA.956	Layanan BMN	2,245,000	-	0.00	1	1	layanan	100	
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	213,418,000	71,026,631	33.28	1	1	layanan	100	
EBA.959	Layanan Protokoler	181,440,000	3,050,000	1.68	1	1	layanan	100	
EBA.962	Layanan Umum	146,769,000	2,020,400	1.38	1	1	layanan	100	
EBA.994	Layanan Perkantoran	13,902,556,000	13,553,914,129	97.49	1	1	layanan	100	
EBB.951	Layanan Sarana Internal	998,596,000	5,468,000	0.55	80	80	unit	100	
EBC.001	Layanan Pengelolaan dan Pengadaan SDM	9,120,000	9,120,000	100.00	1	1	layanan	100	
EBC.954	Layanan Manajemen SDM	422,246,000	109,088,196	25.84	82	82	orang	100	
EBD.001	Pengelolaan Perencanaan dan Manajemen Kinerja Kantor Wilayah	424,135,000	98,091,600	23.13	2	2	laporan	100	
EBD.002	Layanan Manajemen Kinerja Kantor Wilayah	18,300,000	-	0.00	3	3	dokumen	100	
EBD.003	Koordinasi dan konsultasi Manajemen Keuangan	220,018,000	84,541,061	38.42	2	2	laporan	100	
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	10,650,000	3,050,000	28.64	3	3	dokumen	100	
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	11,325,000	6,100,000	53.86	1	1	dokumen	100	
EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	186,612,000	71,711,160	38.43	3	3	laporan	100	
EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	7,630,000	3,050,000	39.97	1	1	laporan	100	
	Subtotal	16,921,378,000.00	14,092,337,659.00	83.28					
	Penyesuaian (Revisi DIPA/Pengembalian Belanja/dll.)*	-	-						
	Total	16,921,378,000.00	14,092,337,659.00	83.28					

B. Realisasi Belanja TA 2025 adalah sebesar Rp14.092.337.659,00 atau 83,28% dari anggaran belanja sebesar Rp16.921.378.000,00.

Pada tahun anggaran 2025 ini terdapat blokir anggaran sebesar Rp2.659.825.000,00 sehingga anggaran yang dapat digunakan sebesar Rp14.261.553.000,00. Sehingga persentase realisasi belanja TA 2025 sebesar 98,81%.

Nilai IKPA Satker DIPA Program Setjen (692024) untuk TA 2025 adalah 97,80% dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 30
 Rincian Nilai IKPA TA 2025

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Ket	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispersasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)	
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output					
1	1016	135	692024	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU		Nilai	100,00	100,00	99,15	100,00	92,31	97,36	100,00	98,80	100%	1,00	97,80
						Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
						Nilai Akhir	10,00	15,00	19,83	10,00	9,23	9,74	25,00				
						Nilai Aspek	100,00		97,21				100,00				

C. Pengungkapan Temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum RI

• Tindak Lanjut Temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum

A. Berdasarkan surat Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Nomor ITJ-PW.03.01-69 tanggal 11 Juni 2025 hal Petunjuk Penanganan dan Penertiban Hasil Audit Kinerja Atas Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2025 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu

1. Sisa Anggaran Belanja Untuk Memenuhi Kebutuhan Rehabilitasi / Renovasi Gedung Kantor Kanwil Kemenkum Bengkulu Pasca Gempa Bumi Tanggal 23 Mei 2025 Berpotensi Tidak Mencukupi (3.03.05)

Adanya kejadian Gempa Bumi di Provinsi Bengkulu yang berdampak pada Kantor Kanwil Bengkulu yang terpantau mengalami kerusakan / keretakan di beberapa titik gedung dan bangunan. Dengan memperhatikan data dan informasi hasil penilaian dari PUPR Provinsi Bengkulu serta dokumen penganggaran Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu TA. 2025 dapat disimpulkan terdapat potensi tidak tercukupinya alokasi anggaran yang tersedia untuk rehabilitasi/renovasi kondisi bangunan kantor yang rusak dengan uraian sebagai berikut:

- Terdapat hasil data analisis dari PUPR berupa estimasi perhitungan biaya rehabilitasi / renovasi Gedung Kantor total senilai Rp2.965.600.000,00;
- Belum terdapat perencanaan untuk Belanja Modal/Pemeliharaan pada dokumen RKBMN peruntukan TA. 2025;



- c. Pada Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu TA. 2025 tidak tersedia alokasi belanja modal gedung dan bangunan (MAK 533), namun terdapat alokasi anggaran pemeliharaan gedung dan bangunan (MAK 532111), dimana sampai dengan saat dilakukannya audit dapat diketahui bahwa dari total anggaran sebesar Rp331.763.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp83.417.000,00, atau hanya tersisa sebesar Rp248.346.000,00, sehingga berpotensi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan anggaran perbaikan kerusakan kantor pasca gempa.

Terhadap permasalahan tersebut, direkomendasikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu agar segera berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal Up. Biro Perencanaan dan Organisasi, Kepala Biro Keuangan dan Kepala Biro Barang Milik Negara, dalam rangka memenuhi kebutuhan anggaran untuk Rehabilitasi / Renovasi Gedung Kantor Kanwil Kemenkum Bengkulu Pasca Gempa Bumi Tanggal 23 Mei 2025, dengan disertai penjelasan dan dokumen pendukung secara memadai.

Tindak Lanjut:

Sudah dilakukan tindak lanjut melalui surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu Nomor W.8.PR.01.04-25 tanggal 5 Juni 2025 hal Penyampaian Usul ABT Tahun Anggaran 2025 Renovasi Gedung dan Bangunan Kantor Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu.

2. Potensi PNBPN yang Bersumber dari Pemanfaatan BMN Belum Optimal (2.02.05)

Berdasarkan hasil pengecekan secara uji petik terhadap data BMN pada Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu diketahui masih belum optimalnya potensi PNBPN yang bersumber dari sewa BMN, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Terdapat 1 (satu) rumah dinas Tipe D Luas 36 M2 NUP 11 tidak berpenghuni/tidak ditempati pejabat/pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu. Penelusuran lebih lanjut diketahui bahwa untuk menyewa rumah dinas tersebut dikenakan biaya sewa sebesar Rp113.306 per Bulan
- b. Terdapat pemanfaatan BMN berupa bangunan seluas 24 m² (6 x 4 meter) di dalam lingkungan kantor untuk



usaha kantin oleh penyewa perorangan namun terdapat periode pemanfaatan yang belum dilakukan pembayaran sewa terhitung sejak tanggal 16 September 2024 s.d. 2 Juni 2025 (saat berakhirnya pelaksanaan pelaksanaan audit), serta masih akan berlanjut sampai dengan ditandatanganinya perjanjian sewa yang baru.

Terhadap permasalahan tersebut, direkomendasikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu selaku Kuasa Pengguna Barang agar (09):

- a. Segera mengoptimalkan pemanfaatan adanya 1 (satu) rumah dinas Tipe D Luas 36 M2 NUP 11, untuk ditempati pejabat/pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, serta menetapkan tarif sewa sesuai ketentuan yang berlaku. Dokumen Surat Ijin Penghunian serta potongan sewa atas rumah dinas terhadap Pejabat/Pegawai disampaikan kepada Inspektorat Jenderal sebagai tindak lanjut.
- b. Terhadap pemanfaatan BMN berupa bangunan seluas 24 m² (6 x 4 meter) di dalam lingkungan kantor untuk usaha kantin oleh penyewa perorangan serta terdapat periode pemanfaatan yang belum dilakukan pembayaran sewa, agar:
 - 1) Membentuk tim pengawasan dan pengendalian BMN dan hasilnya disajikan dalam bentuk laporan yang antara lain menguraikan penjelasan secara memadai terkait dengan:
 - a) Kronologis pemanfaatan dengan disertai dokumen pendukung secara memadai;
 - b) Periode pemanfaatan atas BMN terlanjur;
 - c) Hal lain yang diperlukan.
 - 2) Setelah memperoleh persetujuan dan tarif sewa dari Kementerian Keuangan atas pemanfaatan BMN sebagai tindak lanjut surat Kepala Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu Nomor W.8-PB.03.02-666 tanggal 9 Desember 2024 Jo. Surat Sekretaris Jenderal Nomor SEK-PB.03.02-746 tanggal 21 Mei 2025, supaya ditindaklanjuti dengan perjanjian dan penyetoran ke Kas Negara sesuai mekanisme yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara Jo. KMK Nomor 213/KM.6/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;



- 3) Menindaklanjuti adanya sewa sebagian tanah dan bangunan atas BMN sebelum mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan (periode 16 September 2024 s.d ditandatanganinya perjanjian sewa yang baru) dengan mengajukan revidi atas sewa terlanjur atas BMN dengan merujuk ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara Jo. KMK Nomor 213/KM.6/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara.

Tindak Lanjut:

- a. Telah dibuatkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu Nomor W.8-489.UM.03.02 Tahun 2025 tanggal 19 Agustus 2025 tentang Penunjukan Penghunian Rumah Negara an. Desi Eriani.
- b. Telah dibuatkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu W.8-221.PB.03.01 Tahun 2025 tanggal 29 Juli 2025 tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN) dan telah dibuatkan kronologis pemanfaatan BMN berupa sewa kantin;

Telah terbit surat Menteri Keuangan Nomor S 31/MK/KNL.0501/2025 tanggal 13 Juni 2025 hal Persetujuan Sewa atas Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan Pada Kementerian Hukum Republik Indonesia c.q. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu dengan nilai sewa per tahun sebesar Rp2.500.000,- dan sudah dilakukan penyetoran ke Kas Negara dengan NTPN 79B431JNG8O91LS9 tanggal 4 September 2025 sebesar Rp1.400.000,00 dan NTPN D4EB71JNG8ODDR7P tanggal 9 September 2025 sebesar Rp1.100.000,00.

Telah dibuatkan surat Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu dengan Ibu Endang Susiani Nomor W.8-PB.04.04-263 Tahun 2025 tanggal 1 Agustus 2025 tentang Sewa Barang Milik Negara Berupa Tanah dan Bangunan.

Telah dibuatkan surat Kepala Kantor Wilayah Nomor W.8-PW.03.02-11 tanggal 30 Juli 2025 tentang Permohonan Revidi atas Sewa Terlanjur Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, dan telah dilakukan revidi oleh Inspektorat



Jenderal berdasarkan surat Plt. Inspektur Jenderal Nomor ITJ-PW.05.01-59 tanggal 9 Oktober 2025 hal Surat Informasi atas Reviu terhadap Sewa Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dilaksanakan sebelum persetujuan oleh Pengelola Barang.

3. Terdapat Transfer masuk BMN dari Sekretariat Jenderal yang Telah digunakan untuk Operasional Kantor Namun Belum Dapat Dilakukan Pencatatan (2.01.01)

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Barang Pengolah Data Nomor SEK.6-PB.04.01 tanggal 6 Maret 2025 diketahui adanya serah terima BMN dari Sekretariat Jenderal kepada Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu berupa 4 (empat) unit BMN Peralatan dan Mesin yang diterima oleh pihak Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu pada tanggal 06 Maret 2025 berupa 4 (empat) unit BMN peralatan dan mesin namun belum dilakukan pencatatan sebagai aset Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu.

Terhadap permasalahan tersebut, direkomendasikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum selaku Kuasa Pengguna Barang agar berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal Up. Biro Umum terkait dokumen ADK BMN yang belum diterima berupa 4 (empat) unit BMN Peralatan dan Mesin yang diterima oleh pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu pada tanggal 06 Maret 2025. Dokumen hasil pembukuan BMN 4 (empat) unit BMN Peralatan dan Mesin tersebut diatas disampaikan kepada Inspektorat Jenderal sebagai tindaklanjut. (07).

Tindak Lanjut:

Telah dilakukan Transfer Masuk atas 4 (empat) unit BMN Peralatan dan Mesin yang diterima oleh pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, yang merupakan Transfer Masuk dari Biro Umum Kementerian Hukum RI.



LAPORAN DAFTAR BAWANG MILIH NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI
INTRAKUANTABEL
RINCIAN PER SUBJURUS EL-DUPOK
TAMBAH KADANGAN 2025
SEMESTER I

MAJLIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS BENGKULU
JENIS TRANSAKSI 102 Transaksi Masok

AKUN NEGARA / SUBSUD KEBUDAIKRAFANGAN		SAT	INTRAKUANTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5
10211	Pembayaran Honorarium		4	63.160.000
31031020001	P.C. Upr	Ruan	1	24.160.000
31031020002	Lab Top	Ruan	1	24.000.000
31031020003	Proter (Perbaikan Peralatan Komputer)	Ruan	1	17.000.000
31031020004	Scanner (Perbaikan Peralatan Komputer)	Ruan	1	22.000.000
TOTAL				63.160.000

4. Pelaksanaan Anggaran Honor Tim Majelis Pengawas Daerah Notaris Belum Sesuai Ketentuan (2.02.03)

Hasil penelusuran lebih lanjut dapat diketahui bahwa pembayaran honorarium terhadap personil Tim MPD Notaris dengan komposisi Tim MPD yang belum sesuai ketentuan, Surat Keputusan yang diterbitkan belum dilengkapi dengan informasi hak dan kewajiban para personil yang ditunjuk, serta belum dilakukan pemutakhiran karena masih menggunakan nomenklatur Kementerian Hukum dan HAM.

Terhadap permasalahan tersebut, direkomendasikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu agar berkoordinasi ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terkait komposisi tim Majelis Pengawas Daerah Notaris dan pelaksanaan Anggaran Honor Tim Majelis Pengawas Daerah Notaris, serta melakukan pemutakhiran terhadap Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu tentang Tim Majelis Pengawas Daerah Notaris dengan merujuk pada hasil koordinasi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta menyampaikan hasilnya kepada Inspektorat Jenderal sebagai tindak lanjut. (09).

Tindak Lanjut:

Telah dibuatkan surat Laporan Tentang Tindak Lanjut Hasil Temuan Inspektorat Jenderal Terkait Penambahan Unsur Pimpinan di Majelis Pengawas Daerah Notaris dan telah dibuatkan SK Perubahan Pertama sebagaimana



berikut:

1. Nomor W.8-183.AH.02.07 Tahun 2025 tanggal 5 Juni 2025 tentang Perubahan Pertama Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu Nomor W.8.327-AH.02.07 Tahun 2024 Tentang Penetapan Ketua, Wakil Ketua, Anggota, dan Pengangkatan Tim Administrasi Majelis Pengawasan Daerah Notaris Kota Bengkulu Periode Tahun 2024 Sampai Dengan Tahun 2027;
2. SK Perubahan Pertama Nomor W.8-184.AH.02.07 Tahun 2025 tanggal 5 Juni 2025 tentang Perubahan Pertama Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu Nomor W.8.63-AH.02.07 Tahun 2024 Tentang Penetapan Ketua, Wakil Ketua, Anggota, dan Pengangkatan Tim Administrasi Majelis Pengawasan Daerah Notaris Gabungan Rejang Lebong, Lebong, Kepahiang, Arga Makmur, dan Mukomuko (Releparmu) Periode Tahun 2025 Sampai Dengan Tahun 2028;
3. SK Perubahan Pertama Nomor W.8-186.AH.02.07 Tahun 2025 tanggal 5 Juni 2025 tentang Perubahan Pertama Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu Nomor W.8.64-AH.02.07 Tahun 2024 Tentang Penetapan Ketua, Wakil Ketua, Anggota, dan Pengangkatan Tim Administrasi Majelis Pengawasan Daerah Notaris Gabungan Seluma, Manna, Kaur, dan Bengkulu Tengah (Semakuteng) Periode Tahun 2025 Sampai Dengan Tahun 2028.

5. Terdapat Barang Milik Negara yang Tidak Lagi Dipergunakan untuk Operasional Masih Dalam Proses untuk Dilakukan Penghapusan (1.04.06)

Berdasarkan hasil pengecekan terhadap Laporan BMN Intrakomptabel TA. 2025 Satuan Kerja Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu diketahui adanya BMN yang sudah tidak digunakan dalam operasional senilai Rp1.412.431.600,00 (daftar rekapitulasi terlampir) namun belum dapat dilakukan penghapusan, dan adanya BMN dengan kondisinya rusak berat dan akan diusulkan penghapusannya.

Direkomendasikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu agar berkoordinasi dengan Biro Barang Milik Negara pada Sekretariat



Jenderal Kementerian Hukum serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bengkulu terkait pelaksanaan proses usul penghapusan BMN setelah masa transisi terhadap BMN yang sudah tidak digunakan dalam operasional senilai Rp1.412.431.600,00, dan proses usul penghapusan terhadap BMN tersebut disampaikan kepada Inspektorat Jenderal sebagai tindaklanjut. (04).

Tindak Lanjut:

Telah terdapat Surat Keputusan Menteri Hukum Nomor SEK-6.PB.05.05 TAHUN 2026 tanggal 21 Januari 2026 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Bermotor Dinas Operasional Karena Penjualan Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu

6. Pengecekan dan Penyampaian Kelengkapan Bukti Pertanggungjawaban Belanja Barang (MAK 52) Masih Belum Tertib (1.04.01)

Setelah dilakukan pengecekan secara uji petik terhadap dokumen pertanggungjawaban belanja barang (MAK 52) s.d saat berakhirnya audit, menunjukkan pengecekan bukti pertanggungjawaban belanja yang digunakan untuk dasar realisasi pembayaran masih belum tertib maupun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Terhadap permasalahan tersebut, direkomendasikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu agar meningkatkan pengendalian intern terhadap pelaksanaan anggaran serta menginstruksikan kepada: (06)

- a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran untuk lebih teliti dan cermat dalam pengelolaan dokumen keuangan dan ketentuan penatausahaan pertanggungjawaban keuangan dengan berpedoman pada ketentuan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara.
- b. Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum untuk melengkapi kekurangan dokumen yang melibatkan pihak eksternal untuk pembelian makanan dan snack kegiatan TA. 2025;
- c. Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum untuk melengkapi kekurangan dokumen untuk pembelian



ATK Kegiatan TA. 2025;

- d. Pihak CV. Primera Globalindo dan Perseroan Perseorangan Asy Syifa Pandu Wisata untuk melengkapi dokumen pertanggungjawaban tiket pesawat/hotel perjalanan dinas TA. 2025;
- e. PT. Javas Anugrah Perkasa untuk melengkapi dokumen terkait pengadaan security, pramubakti, dan driver pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu TA. 2025.

Tindak Lanjut:

Telah dilampirkan Tiket, Company Profile PT Primera Trans, Rekap Perjalanan Dinas Travel, Surat Keterangan Lunas dari Direktur Primera Trans yang telah dilampirkan juga Bukti Pembayaran Transfer, Surat Keterangan Kerja Sdri. Yulyani sebagai Admin PT Primera Trans pada google drive
https://drive.google.com/drive/folders/1vrPJHIFcZcPfkE1vQ-Si9PVXqThgCRn?usp=drive_link

7. Realisasi Anggaran Belum Sesuai Perencanaan (2.02.01)

Berdasarkan hasil pengecekan terhadap dokumen laporan realisasi anggaran yang bersumber dari Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran (OMSPAN) diketahui bahwa di untuk periode TA. 2025 s.d dengan saat pelaksanaan audit di tanggal 26 Mei 2025), diketahui bahwa untuk Satuan Kerja Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu mengelola 6 (enam) DIPA dengan total alokasi anggaran sebesar Rp17.668.736.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp8.196.779.961,00 atau telah mencapai 46,39%. Data dan informasi tersebut menunjukkan bahwa realisasi anggaran DIPA Setjen untuk Satuan Kerja Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu (692024) sampai dengan periode akhir bulan Mei telah mencapai realisasi sebesar 40,47% sementara anggaran untuk DIPA Satuan Kerja lainnya baru mencapai persentase realisasi anggaran antara 7,72% s.d. 17,06% sehingga secara kumulatif masih berada di bawah target perencanaan capaian kinerja yang telah ditetapkan.

Terhadap permasalahan tersebut, direkomendasikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu selaku Kuasa Pengguna Anggaran agar melaksanakan pengendalian intern, pemantauan, dan



evaluasi terhadap realisasi belanja atas alokasi anggaran yang tersedia sehingga realisasi belanja dapat tercapai sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. (09).

Tindak Lanjut:

Telah dibuatkan Nota Dinas Nomor: W.8 - KU.02.01 – 361 tanggal 13 November 2025 hal Pelaksanaan Pengendalian Intern, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Realisasi Belanja Dalam Rangka Optimalisasi Pelaksanaan Anggaran.

B. Berdasarkan surat Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Nomor ITJ-PW.03.01-128 tanggal 20 Oktober 2025 hal Petunjuk Penanganan dan Penertiban Hasil Audit Ketaatan atas Pengelolaan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu Tahun Anggaran 2025

1. Penatausahaan Barang Milik Negara Belum Tertib (2.03.02)

Berdasarkan hasil pengecekan data Master Aset pada aplikasi SIMAN per 22 September 2025, tercatat nilai Aset Tetap pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu sebesar Rp52.790.677.603,00 yang mencakup 8 (delapan) kelompok jenis BMN.

Hasil analisis dokumen, observasi lapangan, dan konfirmasi dengan pengelola BMN

Menunjukkan bahwa penatausahaan BMN belum sepenuhnya tertib sesuai ketentuan.

Adapun permasalahan yang teridentifikasi antara lain:

- a. Sebanyak 127 unit BMN belum memiliki Penetapan Status Penggunaan (PSP) dan belum diusulkan kepada Sekretariat Jenderal.
- b. Terdapat 102 unit BMN dalam kondisi rusak berat yang belum diusulkan penghapusannya, termasuk 1 unit Camera Digital NUP 6 yang masih tercatat aktif.
- c. Ditemukan Aset Tetap senilai Rp1.412.431.600,00 yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan dan belum diusulkan untuk penghapusan.

Terhadap permasalahan tersebut, direkomendasikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu agar menginstruksikan Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum untuk:

- a. Melakukan inventarisasi atas 127 unit BMN yang



belum ditetapkan status penggunaannya dan segera mengajukan permohonan penetapan PSP kepada Kementerian Keuangan melalui Sekretariat Jenderal c.q. Kepala Biro BMN (09);

- b. Melakukan pemeriksaan fisik dan pembaruan kondisi BMN dalam aplikasi SIMAN sesuai dengan kondisi fisik aktual di lapangan. Selanjutnya terhadap BMN yang Rusak Berat supaya dilengkapi dengan dokumen pendukung sehingga dapat diusulkan untuk penghapusan (06).

Tindak Lanjut:

- a. Telah diupload SK PSP BMN
- b. Telah diupload Laporan Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Biro BMN dan Biro HUKERMA Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum tanggal 8 s.d 10 Oktober 2025
- c. Telah dilampirkan daftar aset

2. Penggunaan Sementara/Penggunaan Bersama BMN Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu Belum Sesuai Ketentuan (2.03.01)

Dalam masa transisi perubahan nomenklatur Kementerian Hukum dan HAM menjadi Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, serta Kementerian Hak Asasi Manusia, pelaksanaan tugas dan fungsi dilakukan melalui mekanisme penggunaan sementara dan penggunaan bersama BMN.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu telah melaksanakan penggunaan bersama an/atau sementara BMN dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Bengkulu serta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bengkulu berdasarkan empat perjanjian tertanggal 31 Januari 2025, yaitu:

- a. Dua perjanjian penggunaan sementara BMN; dan
- b. Dua perjanjian penggunaan bersama BMN berupa tanah dan/atau bangunan.

Namun demikian, penggunaan BMN oleh Kantor Wilayah Imigrasi dan Pemasarakatan untuk periode 30 Juni s.d. 31 Desember 2025 belum dilandasi perjanjian penggunaan bersama yang sah.

Surat Kepala Biro BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Imipas Nomor SEK.3-PB.03.01- 48 tanggal 30 Juni 2025 sempat menginstruksikan agar dilakukan permohonan penggunaan bersama BMN,



namun kemudian dibatalkan melalui surat Nomor SEK.3-PB.03.01-50 tanggal 2 Juli 2025 karena masih diperlukan kajian teknis lanjutan.

Terhadap permasalahan tersebut, direkomendasikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu selaku Kuasa Pengguna Barang agar: (09)

- a. Berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal c.q. Biro BMN terkait kebijakan dan mekanisme penggunaan sementara dan/atau penggunaan bersama BMN;
- b. Menginstruksikan kepada Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum untuk mengidentifikasi / menginventarisasi seluruh BMN yang saat ini digunakan bersama atau sementara oleh pihak lain (Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Bengkulu dan Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Selatan Unit Kerja Bengkulu);
- c. Melakukan perjanjian Penggunaan Sementara dan/atau Penggunaan Bersama BMN dengan Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Bengkulu.

Tindak Lanjut:

- a. Telah dilakukan kegiatan Koordinasi Ke Biro BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum
- b. Telah di upload Surat Pembatalan Permohonan Perpanjangan Perjanjian Penggunaan Sementara dan/atau Penggunaan Bersama BMN dengan Kantor Wilayah Imigrasi dan Pemasarakatan Bengkulu.

3. Pengelolaan BMN Berupa Alat Angkutan Bermotor pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu Belum Memadai (2.03.02)

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) berupa kendaraan dinas pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu belum tertib dan tidak sepenuhnya sesuai ketentuan. Hasil pemeriksaan dokumen, observasi lapangan, dan konfirmasi menunjukkan lemahnya pengendalian internal atas administrasi aset yang berpotensi menimbulkan kehilangan, penyalahgunaan, serta menurunnya akuntabilitas pengelolaan BMN.

Berdasarkan data SIMAN per 22 September 2025 tercatat 19 unit kendaraan dinas, dengan temuan sebagai berikut:

- a. Enam unit (4 roda empat dan 2 roda dua) rusak berat



tidak ditemukan fisiknya dan belum dihapus dari daftar aset meski telah dilelang.

- b. Satu unit (NUP 2) tercatat baik namun secara fisik rusak berat tanpa usulan penghapusan.
- c. Dua unit (NUP 6 dan 7) rusak berat belum diusulkan penghapusan.

Selain itu, terdapat tujuh unit kendaraan sewa untuk pejabat struktural, sementara satu kendaraan dinas BMN (BD 18) masih digunakan meskipun pejabat telah memperoleh kendaraan sewa. Dua unit kendaraan digunakan sementara oleh Kanwil Imigrasi dan Pemasarakatan, serta tiga unit dalam proses penghapusan.

Mengacu pada Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK), kebutuhan maksimal kendaraan dinas hanya tujuh unit, namun terdapat kelebihan tiga unit hasil pengadaan sewa. Kondisi ini menunjukkan pengelolaan dan penatausahaan BMN, terutama dalam aspek pemutakhiran data, penghapusan, dan penyesuaian kebutuhan, belum optimal.

Terhadap permasalahan tersebut, direkomendasikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum selaku Kuasa Pengguna Barang agar menginstruksikan Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum untuk: (06)

- a. Melakukan penghapusan pada SIMAN terhadap kendaraan yang telah dilelang.
- b. Mengajukan usulan penghapusan ataupun koreksi kondisi terhadap kendaraan yang rusak berat.
- c. Menertibkan pemanfaatan dan penggunaan kendaraan dinas agar sesuai dengan SBSK.
- d. Memperkuat sistem pengendalian internal dalam pengelolaan BMN melalui monitoring, evaluasi, dan pembaruan berkala data aset.

Tindak Lanjut:

- a. Telah diupload Surat Permohonan Penerbitan SK Penghapusan BMN pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum u.p.Kepala Biro Barang Milik Negara
- b. Telah diupload SOP Penerimaan BMN, SOP Pengajuan Pemanfaatan BMN, SOP Pengajuan Penetapan Status BMN, SOP Penyaluran Barang Persediaan dan BMN, SOP Penyimpanan Barang



Persediaan dan BMN, SOP Penyusunan Laporan BMN, SOP Usulan Pengajuan Pemindahtanganan BMN

c. Telah dilampirkan daftar aset kendaraan bermotor

4. Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Alih Fungsi Gedung Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu Belum Optimal (02.03.02)

Berdasarkan Laporan Barang Pengguna Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel per 23 September 2025, nilai BMN tercatat sebesar Rp51.969.894.403,00 yang terdiri atas tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, pagar, serta aset tidak digunakan dalam operasi pemerintahan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan kegiatan inventarisasi BMN dalam rangka alih fungsi gedung belum optimal. Meskipun telah diterbitkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Nomor W.8-252.PB.04.01 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi BMN, pelaksanaannya belum berjalan efektif, ditunjukkan dengan belum tersusunnya Daftar Barang Ruang (DBR) dan belum adanya pelabelan BMN di setiap ruangan. Hal inmenunjukkan lemahnya pengawasan dan I pengendalian terhadap aset di masing-masing ruangan. Selain itu, perubahan denah kantor akibat transisi nomenklatur menjadi tiga kementerian (Hukum, Imigrasi dan Pemasarakatan, serta HAM) belum disesuaikan dengan kondisi aktual, sehingga denah bangunan belum mencerminkan pemanfaatan ruang secara akurat.

Pelaksanaan Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dari Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum juga belum optimal; kegiatan baru sebatas pembentukan tim inventarisasi tanpa tindak lanjut berupa laporan hasil inventarisasi, verifikasi aset, dan usulan Penetapan Status Penggunaan (PSP).

Keterbatasan sumber daya manusia pengelola BMN dan belum adanya arahan teknis dari Biro BMN terkait klasifikasi aset pasca perubahan nomenklatur turut menjadi kendala.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan



penatausahaan BMN, terutama peralatan TIK, non-TIK, dan aset tetap lainnya, belum mendukung optimalisasi pemanfaatan aset negara secara menyeluruh.

Terhadap permasalahan tersebut, direkomendasikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu selaku Kuasa Pengguna Barang agar menginstruksikan Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum untuk: (06)

- a. Melakukan penyusunan daftar barang ruangan (DBR) dan pelabelan BMN pada masing-masing ruangan kantor belum dilaksanakan
- b. Melakukan perbaikan denah dengan penyesuaian kondisi eksisting terbaru, serta menambahkan Bangunan parkir terbuka Permanen, Pos Jaga, Bangunan Gedung Tertutup Permanen, Gedung Instalasi Lainnya, Gedung Tempat Ibadah Permanen, dan lain-lain.
- c. Melakukan koordinasi dengan Biro BMN terkait Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, terutama pada pelaksanaan Inventarisasi BMN, Pengisian Alat Bantu Monitoring Likuidasi, serta usulan PSP BMN.

Tindak Lanjut:

- a. Telah dilakukan penyusunan Daftar Barang Ruangan dan pelabelan BMN pada masing-masing ruangan kantor
- b. Telah diupload denah terbaru
- c. Telah melakukan Koordinasi Ke Biro BMN Setjen Kementerian Hukum

Pada https://drive.google.com/drive/folders/1HJhosS7dBVQWInp5PsEkxCtZ7fOjnUxw?usp=drive_link

5. Terdapat 1 (satu) Unit Bangunan Tempat Sidang / Zitting Plaat Berpotensi Sebagai Barang Tidak Ditemukan dan 4 (empat) Unit Bangunan Tempat Sidang / Zitting Plaat Berpotensi Idle (02.02.07)

Berdasarkan Laporan Barang Pengguna Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel per 23 September 2025, tercatat 5 (lima) unit Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plaat pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu dengan nilai buku sebesar Rp380.368.000,00. Seluruh aset tersebut masih tercatat



pada aplikasi SIMAN per 22 September 2025 dengan kondisi rusak berat.

Hasil konfirmasi dengan pengelola BMN menunjukkan bahwa terhadap satu unit Zitting Plaat dengan NUP 1 yang berlokasi di Jalan Raya Bengkulu–Manna, telah dilakukan koreksi inventarisasi dan penilaian berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Nomor BAR-060/WKN.05/KNL.01/2017 tanggal 5 Desember 2017. Dalam berita acara tersebut disebutkan bahwa aset tanah dan bangunan di lokasi tersebut dinyatakan sebagai BMN tidak ditemukan karena berada di atas lahan milik AURI yang telah bersertifikat. Namun demikian, hingga berakhirnya masa audit, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu belum dapat menunjukkan dokumen pendukung seperti surat tugas penelusuran aset, laporan hasil penelusuran, maupun laporan revaluasi BMN.

Sementara itu, terhadap 4 (empat) unit Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plaat lainnya (NUP 2, 3, 4, dan 5) yang tersebar di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Bengkulu Utara, diketahui seluruhnya dalam kondisi rusak berat dan belum pernah dilakukan penelusuran lapangan. Hasil konfirmasi menyebutkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi kendala utama pelaksanaan kegiatan verifikasi dan inventarisasi. Selain itu, hingga saat ini belum terdapat rencana pengelolaan maupun pemanfaatan atas aset tersebut. Kondisi ini menyebabkan keempat aset tersebut berpotensi menjadi BMN idle atau tidak dimanfaatkan.

Berdasarkan data pada aplikasi SIMAN, kelima unit Zitting Plaat tersebut merupakan aset perolehan tahun 2005 dan belum dilakukan pemutakhiran data, termasuk pembaruan foto aset dan pelaksanaan geotagging. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan BMN berupa Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plaat pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu belum optimal, baik dari sisi inventarisasi, verifikasi keberadaan fisik, maupun pemanfaatan aset, sehingga menimbulkan potensi risiko kehilangan dan penurunan nilai ekonomis aset negara.

Direkomendasikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu selaku Kuasa Pengguna Barang agar menginstruksikan Kepala Bagian Tata Usaha



dan Umum untuk: (12)

- a. Membentuk tim penelusuran BMN guna memastikan kondisi dan riwayat BMN berupa Bangunan Tempat Sidang / Zitting Plaat NUP 1, 2, 3, 4 dan 5.
- b. Membuat rencana aksi penggunaan / pemanfaatan atas BMN berupa Bangunan Tempat Sidang / Zitting Plaat NUP 2, 3, 4 dan 5.
- c. Melakukan koordinasi dengan KPKNL setempat untuk melakukan penilaian kembali atas BMN berupa Bangunan Tempat Sidang / Zitting Plaat NUP 1.
- d. Melakukan koreksi nilai aset tetap atas Bangunan Tempat Sidang / Zitting Plaat NUP 1, sebagai tindak lanjut atas hasil pelaksanaan penilaian Kembali BMN.

Tindak Lanjut:

- a. Telah diupload SK Pembentukan Tim Penelusuran BMN
- b. Telah diupload Laporan Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Biro BMN dan Biro HUKERMA Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum tanggal 8 Oktober s.d 10 Oktober 2025
- c. Telah diupload Laporan Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi ke Biro Keuangan dan Biro BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Tanggal 5 s.d 7 November 2025
- d. Telah diupload Laporan Kegiatan Monitoring Pengamanan Aset BMN berupa Tanah di Kabupaten Kaur tanggal 21 - 23 Oktober 2025

6. Sebagian Tanah Hibah Belum Dapat Diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Karena Masuk dalam Kawasan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha (PIPIB) (02.02.07)

Tanah hibah dari Pemerintah Kabupaten Mukomuko seluas 44.973 m² dengan nilai perolehan Rp764.541.000,00 belum seluruhnya diterbitkan Sertifikat Hak Pakai. Dari total luas tersebut, baru ±29.119 m² bersertifikat Hak Pakai Nomor 00163 tanggal 7 Desember 2023, sedangkan ±15.854 m² belum dapat disertifikatkan karena termasuk dalam kawasan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha (PIPIB) kategori lahan gambut.

Penerbitan sertifikat atas lahan tersebut baru dapat dilakukan setelah revisi PIPPIB oleh Kementerian



Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Berdasarkan dokumen pertanahan, hanya ± 29.119 m² yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan dapat diterbitkan sertifikat, sementara sisanya menunggu pengeluaran dari kawasan PIPPIB. Hasil verifikasi BPKHTL Wilayah XX Bandar Lampung Surat Nomor S.368/BPKHTL.XX/PPKH/PLA.2.13/B/10/2024 tanggal 7 Oktober 2024) juga menunjukkan ± 43.694 m² berada di luar kawasan hutan (APL), namun $\pm 1,52$ hektare masih termasuk dalam PIPPIB Tahun 2023 Periode II.

Sebagai tindak lanjut, Kantor Wilayah telah menyampaikan surat permohonan revisi PIPPIB kepada KLHK melalui Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Surat Nomor W.8.PB.03.01-621 tanggal 25 November 2024), namun hingga pemeriksaan dilakukan, proses revisi masih menunggu tindak lanjut. Selain itu, koreksi atas luas tanah pada Catatan atas Laporan BMN (CaLBMN) belum dilakukan karena proses sertifikasi belum tuntas dan akan disesuaikan setelah status hukum tanah hibah memperoleh kepastian.

Terhadap permasalahan tersebut, direkomendasikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu selaku Kuasa Pengguna Barang agar: **(07)**

- a. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu segera berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kantor Pertanahan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu guna mempercepat revisi PIPPIB terhadap sisa lahan seluas 15.854 m².
- b. Melakukan koreksi pencatatan Barang Milik Negara (BMN) pada aplikasi CaLBMN secara bertahap sesuai dengan perkembangan status hukum lahan, dengan menambahkan catatan penjas (*disclosure*) mengenai luasan yang belum bersertifikat guna menjaga akurasi laporan pengelolaan BMN.
- c. Menyampaikan laporan resmi kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) terkait status tanah hibah yang belum bersertifikat.



Tindak Lanjut:

- a. Telah melakukan Koordinasi dan Konsultasi ke Biro BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum terkait revisi PIPPIB agar tanah Hibah Muko-muko dapat diterbitkan Hak Pakai, dan meminta bantuan dari Biro BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum untuk berkoordinasi ke Kementerian Lingkungan Hidup, karena merupakan wewenang Biro BMN
- b. Telah melakukan konsultasi dan koordinasi ke Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Mukomuko pada tanggal 15-17 Oktober 2025 dalam rangka menindaklanjuti hasil koordinasi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu dengan Inspektorat Jendral Kementerian Hukum yang dilaksanakan pada tanggal 8-10 Oktober 2025.
- c. Telah terdapat surat Kakanwil Kemenkum Bengkulu kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum c.q Kepala Biro Barang Milik Negara terkait permohonan dan petunjuk terkait penyelesaian tanah hibah pemerintah kabupaten mukomuko
- d. Telah terdapat Surat Kakanwil Kemenkum Bengkulu kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan u.p. Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan melalui surat nomor W.8.PB.04.05 – 24 tanggal 20 Januari 2026 perihal Permohonan Klarifikasi PIPPIB pada Tanah di Desa Bandar Ratu, Kota Mukomuko, Provinsi Bengkulu dengan menguraikan permohonan atas klarifikasi atas tanah sisa yang belum bersertifikat (luasan± 15.854 m²) sebagai tanah yang peruntukannya untuk Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2026 untuk Periode I dan/atau permohonan pengecualian atas tanah tersebut termasuk dalam kawasan PIPPIB (Revisi Peta PIPPIB) untuk proses penerbitan sertifikat
- e. Telah terdapat Surat Kakanwil Kemenkum Bengkulu kepada Bupati Mukomuko melalui surat nomor W.8.PB.04.05 – 24 tanggal 20 Januari 2026 perihal Permohonan Review/Kaji Ulang atas Hibah Tanah di Desa Bandar Ratu

7. Meja Panjang Pengadaan TA. 2025 Total Senilai Rp7.600.00,00 Belum Dilakukan Pengakuan dan Pencatatan Sebagai BMN Peralatan Dan Mesin



(2.01.01)

Berdasarkan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kantor Wilayah Kementerian

Hukum Bengkulu Tahun Anggaran 2025, terdapat Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp441.501.000,00. Salah satu kegiatan dalam belanja tersebut adalah pekerjaan perbaikan interior ruang Aula Soekarno berdasarkan SPK Nomor W.8.PB.02.01-235 tanggal 25 Agustus 2025 senilai Rp92.338.458,00 dengan jangka waktu pekerjaan selama 14 hari kalender.

Dari hasil pemeriksaan terhadap dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor W.8.PB.02.01-262 tanggal 9 September 2025, diketahui bahwa salah satu item pekerjaan berupa pembuatan 1 (satu) unit meja panjang senilai Rp7.600.000,00. Nilai tersebut telah memenuhi batas kapitalisasi aset tetap dan seharusnya diakui serta dicatat sebagai Barang Milik Negara (BMN) dalam kelompok Peralatan dan Mesin.

Namun demikian, berdasarkan hasil konfirmasi dengan pengelola keuangan dan BMN, diketahui bahwa pembayaran atas pekerjaan tersebut belum dilakukan dan belum terdapat dokumen pertanggungjawaban belanja maupun surat permintaan pembayaran dari penyedia. Akibatnya, meja panjang dimaksud belum dapat diakui dan dicatat sebagai BMN pada aplikasi SIMAN hingga saat pemeriksaan dilakukan.

Terhadap permasalahan tersebut, direkomendasikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu selaku Kuasa Pengguna Barang agar: (07)

- a. Melakukan pencatatan dan pengakuan aset meja panjang sebanyak tiga unit senilai Rp7.600.000,00 sebagai BMN kategori Peralatan dan Mesin dalam aplikasi SIMAK BMN, sehingga nilai aset tetap dapat disajikan secara wajar pada laporan keuangan.
- b. Meningkatkan pengendalian internal melalui pengawasan Kuasa Pengguna Barang (KPB) atas seluruh proses pengadaan, pengakuan, dan pencatatan BMN untuk mencegah terulangnya kesalahan serupa.

Tindak Lanjut:

- a. Telah dilampirkan listing sejarah transaksi Barang Milik Negara (BMN) Intrakomptabel s/d 31 Desember 2025 yang memuat pencatatan Meja Panjang



- b. Telah dibuatkan Nota Dinas Nomor W.8-UM.01.01-55 tanggal 5 Februari 2026 hal Hasil Tindak Lanjut Temuan Audit Kinerja Atas Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2025, Audit Ketaatan atas Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), dan Audit Ketaatan atas Tugas dan Fungsi Pelaksanaan Organisasi Bantuan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu

C. Berdasarkan surat Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Nomor ITJ-PW.03.01-1 tanggal 2 Januari 2026 hal Petunjuk Penanganan dan Penertiban Hasil Audit Ketaatan atas Tugas dan Fungsi Pelaksanaan Organisasi Bantuan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu Tahun Anggaran 2025

1. Penyelenggaraan Tugas Panitia Pengawas Daerah (PANWASDA) Terhadap Pelaksanaan Bantuan Hukum Belum Di Dukung Dengan Mekanisme Pengendalian Intern Secara Memadai. (2.03.02)

Direkomendasikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu memerintahkan Kepala Divisi Peraturan Perundang - Undangan dan Pembinaan Hukum dan Panitia Pengawas Daerah (PANWASDA) agar menyusun formula mekanisme pengendalian intern yang diperlukan, sehingga dapat mengidentifikasi, meminimalisir, serta penanganan memadai terhadap terjadinya risiko inefektivitas pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum, selanjutnya supaya mengambil langkah penanganan dan penertiban berupa: (06)

- a. Menertibkan sistem pelaporan dan pengawasan Bantuan Hukum, dengan menginstruksikan kepada PANWASDA menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan dan pengawasan Bantuan Hukum secara triwulanan dan tahunan yang memuat hasil evaluasi dan rekomendasi, serta mewajibkan seluruh PBH menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja.
- b. Menegakkan kepatuhan PBH terhadap kewajiban kinerja sesuai status akreditasi, melalui evaluasi berkala atas pemenuhan minimal kegiatan litigasi dan/atau non litigasi, serta pemberian pembinaan atau usulan sanksi kepada PBH yang tidak memenuhi ketentuan.
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan dan keandalan data



pada aplikasi SIDBANKUM, dengan mewajibkan pengunggahan data Bantuan Hukum Mandiri, melakukan verifikasi dan pemutakhiran data PBH (advokat/paralegal dan masa berlaku KTPA), serta mengusulkan penyempurnaan fitur pengawasan Bantuan Hukum non litigasi kepada pengelola aplikasi SIDBANKUM di BPHN.

- d. Memperkuat pengendalian dan rekonsiliasi data keuangan Bantuan Hukum, melalui pelaksanaan rekonsiliasi pembayaran Bantuan Hukum secara berkala dengan Pemerintah Kabupaten/Kota guna memastikan kesesuaian data realisasi dan mencegah perbedaan pencatatan.
- e. Meningkatkan kualitas verifikasi dan pertanggungjawaban dokumen Bantuan Hukum, dengan menginstruksikan kepada petugas pelaksana verifikasi untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan seluruh dokumen pendukung sebelum dinyatakan valid, serta mewajibkan perbaikan atas dokumen yang tidak lengkap atau tidak sah.

Tindak Lanjut:

- a. (angka 1 dan 2) Sudah ditindaklanjuti dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu Nomor : W.8-HN.04.03-05 Tanggal 5 Januari 2026 Hal Pemberitahuan Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum RI kewajiban PBH kepada Direktur PBH terakreditasi
- b. 1. Sudah ditindaklanjuti dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu Nomor : W.8-HN.04.03-05 Tanggal 5 Januari 2026 Hal Pemberitahuan Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum RI kewajiban PBH kepada Direktur PBH terakreditasi
2. Surat Perintah Nomor: W.8-UM.03.07-816, Tanggal 17 November 2025 Perihal Melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi panitia pengawasan daerah terhadap pelaksanaan Bantuan Hukum di Kabupaten Kepahiang pada tanggal 18 November 2025, Surat Perintah Nomor: W.8-UM.03.07-810 tanggal 18 November 2025 Perihal Melaksanakan Kegiatan pemantauan dan evaluasi panitia pengawas daerah terhadap pelaksanaan bantuan hukum ke Kabupaten Bengkulu Tengah 19 November 2025, Surat Perintah



- Nomor: W.8-UM.03.07-820 tanggal 17 November 2025 Perihal Melaksanakan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Panitia Pengawas Daerah terhadap Pelaksanaan Bantuan Hukum dan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 19- 20 November 2025, Surat perintah Nomor: W.8-UM.03.07-812 tanggal 17 November 2025 Perihal Melaksanakan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Panitia Pengawas Daerah terhadap Pelaksanaan Bantuan Hukum dan Unit Pelaksanaan Teknis Pemasarakatan di kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 21 November 2025, Surat Perintah Nomor: W.8-UM.03.07- 814 tanggal 24 November 2025 Perihal Melaksanakan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Panitia Pengawas Daerah terhadap Pelaksanaan Bantuan Hukum dan Unit Pelaksanaan Teknis Pemasarakatan di Kabupaten Bengkulu Selatan pada Tanggal 24 s.d. 25 November 2025, Surat Perintah Nomor: W.8.UM.03.07-823 tanggal 24 November 2025 Perihal Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Panitia Pengawas Daerah terhadap Pelaksanaan Bantuan Hukum di Kabupaten Kaur pada tanggal 26 November 2025 s.d 27 November 2025.
- c. 1. Sudah ditindaklanjuti dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu Nomor : W.8-HN.04.03-05 Tanggal 5 Januari 2026 Hal Pemberitahuan Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum RI kewajiban PBH kepada Direktur PBH terakreditasi.
 2. Sudah ditindaklanjuti pada laporan Triwulan IV dan Laporan Tahunan Tahun 2025. Dan sudah dikirimkan kepada Panwasput melalui email.
 - d. 1. Sudah ditindaklanjuti melalui Surat Kepala Kantor Wilayah Nomor: W.8-HN.04.03- 3232 Tanggal 18 Desember 2025 Kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Hal Pemberitahuan Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum RI
 2. Sudah ditindak lanjuti oleh Pemda Kabupaten Rejang Lebong dengan Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dengan Surat Nomor: 180/35/Bag.3 Tanggal 15 Januari 2026 Hal Pemberitahuan Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum RI



3. Sudah ditindaklanjuti berdasarkan ini, tidak ditemukan nama klien yang sama yang bersumber dari APBD Kab RL dengan DIPA BPHN Kanwil Bengkulu TA 2025.
 - e. Telah dibuatkan SOP Penyaluran Dana Bantuan Hukum Nomor W8-OT.02.02 - tanggal 6 Februari 2026
- 2. Pengendalian Intern Terhadap Pelaksanaan Anggaran Penyelenggaraan Kegiatan Bantuan Hukum Belum Memadai dan Tidak Akuntabel. (2.03.02)**

Direkomendasikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu memerintahkan Kepala Divisi Peraturan Perundang - Undangan dan Pembinaan Hukum dan Panitia Pengawas Daerah (PANWASDA) agar segera melakukan penataan ulang menyeluruh atas sistem akuntabilitas dan pengendalian terkait Program Bantuan Hukum, melalui: (06)

- a. Menegaskan dan memperkuat pengendalian intern pengelolaan Bantuan Hukum, dengan memastikan pembagian dan / atau pemisahan peran dan fungsi KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran, PANWASDA, dan Verifikator berjalan sesuai ketentuan, termasuk keterlibatan PPK secara nyata dalam perikatan, verifikasi, dan pengendalian komitmen anggaran
- b. Melakukan tata kelola perjanjian, pembayaran, dan pertanggungjawaban anggaran Bantuan Hukum, melalui penyesuaian mekanisme perikatan dan pembayaran LS sesuai ketentuan, pemeriksaan substantif sebelum pembayaran, serta pengelolaan dan pengarsipan bukti pertanggungjawaban secara lengkap dan akuntabel
- c. Mengamankan dan meningkatkan keandalan pengelolaan data Bantuan Hukum, dengan menerapkan mekanisme backup dan pemulihan data SIDBANKUM, memberikan akses yang memadai kepada pengelola keuangan, serta menyiapkan pengarsipan manual sebagai mitigasi risiko kehilangan data

Tindak Lanjut:

- a. Belum ditindaklanjuti karena menunggu arahan dari



BPHN terkait PANWASDA Hukum

- b. Telah dibuatkan SOP Penyaluran Dana Bantuan Hukum Nomor W8-OT.02.02 - tanggal 6 Februari 2026
- c. Telah dibuatkan google drive untuk menyimpan softfile terkait pengelolaan data Bantuan Hukum, dengan menerapkan mekanisme backup dan pemulihan data SIDBANKUM melalui sistem cloud storage/ google drive serta menyediakan akses yang memadai kepada pengelola keuangan dengan link <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/18uu1nIV8biCTp-F464aFEuc1ZJGuMNBW>

3. Terdapat Realisasi Anggaran Pelaksanaan Bantuan Hukum Belum Dilengkapi Dengan Bukti Pertanggungjawaban (1.04.01)

Direkomendasikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu memerintahkan Kepala Divisi Peraturan Perundang - Undangan dan Pembinaan Hukum dan Panitia Pengawas Daerah (PANWASDA) agar segera menginstruksikan kepada OBH terkait untuk segera melengkapi bukti pertanggungjawaban belanja minimal senilai Rp527.115.000,00 serta menyampaikan asli dokumen pertanggungjawaban kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu untuk diarsipkan oleh Pengelola Keuangan

Tindak Lanjut:

Sudah ditindaklanjuti dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu Nomor : W.8-HN.04.03-05 Tanggal 5 Januari 2026 Hal Pemberitahuan Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum RI kewajiban PBH kepada Direktur PBH terakreditasi



Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2025

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu Nomor W.8 – 01.KU.02.03 Tahun 2025 Tanggal 2 Januari 2025 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, dan Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai pada Satuan kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu dan Keputusan Kepala Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu Nomor W.8-2.KU.02.03 Tahun 2025 Tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu tanggal 2 Januari 2025, Surat Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-10.KU.02.03 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kantor Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu tanggal 18 Juli 2025,

Semula :	
Kuasa Pengguna Anggaran	: Machyudie, S.T., M.M.S.I.
Pejabat Pembuat Komitmen	: Juli Prihanto, S.H.
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Rahmat Huda, S.H., M.M.
Bendahara	: Retno Prapitri Rafitra, S.E.
Menjadi :	
Kuasa Pengguna Anggaran	: Zulhairi, S.H., M.H.
Pejabat Pembuat Komitmen	: Juli Prihanto, S.H.
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Rahmat Huda, S.H., M.M.
Bendahara	: Retno Prapitri Rafitra, S.E.



Bengkulu, 4 Mei 2026
Kepala Kantor Wilayah,



Zulhairi



Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu

LAMPIRAN A
LAPORAN YANG DIHASILKAN APLIKASI MONSAKTI
MODUL GLP

Laporan Keuangan

1. Neraca Percobaan Kas per 31 Desember 2025
2. Neraca Percobaan AkruaI per 31 Desember 2025
3. Neraca Komperatif per 31 Desember 2025
4. Laporan Realisasi Anggaran Komperatif per 31 Desember 2025
5. Laporan Realisasi Anggaran Belanja per 31 Desember 2025
6. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan per 31 Desember 2025
7. Laporan Operasional (LO) per 31 Desember 2025
8. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) per 31 Desember 2025

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (135) KEMENTERIAN HUKUM

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (2600) BENGKULU

SATUAN KERJA : (692024) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 8:28 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	14,092,337,659
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	34,148,191	0
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	3,700,000
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	28,918,353
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	92,338
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,437,500
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	6,355,035,520	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	84,231	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	465,467,244	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	146,599,273	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	268,900,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	752,564,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	83,914,689	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	346,602,120	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	879,223,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	112,240,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	7,534,500	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	149	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	753,450	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	434,520	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	2,100,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	540,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	177,262,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,464,150,785	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	39,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	99,984,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	2,356,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	111,658,950	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	4,500,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,200,000	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	5,468,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	156,194,900	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	258,557,026	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	2,297,700	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	41,124,100	0
3.0	522141	Belanja Sewa	875,630,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	7,200,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	20,000,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (135) KEMENTERIAN HUKUM

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (2600) BENGKULU

SATUAN KERJA : (692024) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU

Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 8:28 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	487,103,958	0
3.0	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	33,020,700	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	118,367,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	230,656,747	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	567,242,334	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,100,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	15,571,443	0
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	1,895,200
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	1,080
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	7,965,000
3.1	511129	Pengembalian Belanja Uang Makan PNS	0	287,000
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	924,900
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	266,500
JUMLAH			14,137,825,530	14,137,825,530

Keterangan :

FINAL

Bengkulu, 4 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

ZULHAIRI

197112192003121001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (135) KEMENTERIAN HUKUM

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (2600) BENGKULU

SATUAN KERJA : (692024) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU Tgl Data : 04/05/26 1:32 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 8:28 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	986,074	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	133,028,000	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	16,431,700	0
0.0	131111	Tanah	15,329,825,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	10,707,681,181	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	24,328,322,496	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	163,172,162	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	8,984,846,366
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	8,470,600,299
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	1,412,431,600	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	1,188,014,480
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	22,301,494
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	1,452,055
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	14,092,337,659
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	34,148,191	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	35,453,697,335
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	6,362,500	0
0.0	391119	Koreksi Lainnya	1,088,312	0
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	2,506,279
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	28,918,353
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	92,338
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,437,500
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	6,353,140,320	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	83,151	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	465,467,244	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	146,599,273	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	260,935,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	752,564,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	83,914,689	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	346,602,120	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	878,936,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	111,315,100	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	7,534,500	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	149	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	753,450	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	434,520	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	2,100,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (135) KEMENTERIAN HUKUM

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (2600) BENGKULU

SATUAN KERJA : (692024) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU Tgl Data : 04/05/26 1:32 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 8:28 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	540,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	177,262,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	1,464,150,785	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	39,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	99,984,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	2,356,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	111,658,950	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	4,500,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	1,200,000	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	5,468,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	257,469,327	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	2,489,175	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	43,023,900	0
3.0	522141	Beban Sewa	875,630,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	7,200,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	20,000,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	479,503,958	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	118,367,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	230,656,747	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	566,975,834	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,100,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	15,571,443	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	919,509,909	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1,191,731,838	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	9,505,460	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	95,454,100	0
JUMLAH			68,246,204,158	68,246,204,158

Keterangan :

FINAL



Bengkulu, 4 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



ZULHAIRI

NIP 197112192003121001

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (135) KEMENTERIAN HUKUM

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (2600) BENGKULU

SATUAN KERJA : (692024) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU

Tgl Data : 04/05/26 1:32 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 8:28 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	986,074	0	986,074	0.00
Persediaan	149,459,700	0	149,459,700	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	150,445,774	0	150,445,774	
ASET TETAP				
Tanah	15,329,825,000	0	15,329,825,000	0.00
Peralatan dan Mesin	10,707,681,181	0	10,707,681,181	0.00
Gedung dan Bangunan	24,328,322,496	0	24,328,322,496	0.00
Aset Tetap Lainnya	163,172,162	0	163,172,162	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(17,455,446,665)	0	(17,455,446,665)	0.00
JUMLAH ASET TETAP	33,073,554,174	0	33,073,554,174	
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	1,412,431,600	0	1,412,431,600	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(1,188,014,480)	0	(1,188,014,480)	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	224,417,120	0	224,417,120	
JUMLAH ASET	33,448,417,068	0	33,448,417,068	
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	22,301,494	0	22,301,494	0.00
Pendapatan Diterima Dimuka	1,452,055	0	1,452,055	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	23,753,549	0	23,753,549	
JUMLAH KEWAJIBAN	23,753,549	0	23,753,549	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	33,424,663,519	0	33,424,663,519	0.00
JUMLAH EKUITAS	33,424,663,519	0	33,424,663,519	
JUMLAH EKUITAS	33,424,663,519	0	33,424,663,519	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	33,448,417,068	0	33,448,417,068	

Keterangan :

FINAL



Bengkulu, 4 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran



ZULHAIRI

NIP 197112192003121001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM 135
ESELON I : SEKRETARIAT JENDERAL 01
SATUAN KERJA : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU 692024

Tgl Data : 04/05/26 1:32 AM
Tgl Cetak : 04/05/26 8:28 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	16,921,378,000	14,092,337,659	(2,829,040,341)	83	0	0	0	0
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL



Bengkulu, 4 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran



ZULHAIRI
NIP 197112192003121001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 135
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 2600
SATUAN KERJA : 692024
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL
BENGKULU
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 04/05/26 8:29 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 4/5/26 8:05 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	6,695,055,000	6,364,503,000	6,355,035,520	1,895,200	6,353,140,320	99.82	11,362,680
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	89,000	86,000	84,231	1,080	83,151	96.69	2,849
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	698,223,000	465,641,000	465,467,244	0	465,467,244	99.96	173,756
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	151,122,000	146,850,000	146,599,273	0	146,599,273	99.83	250,727
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	277,290,000	269,445,000	268,900,000	7,965,000	260,935,000	96.84	8,510,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	628,838,000	752,648,000	752,564,000	0	752,564,000	99.99	84,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	25,224,000	83,943,000	83,914,689	0	83,914,689	99.97	28,311
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	385,049,000	346,603,000	346,602,120	0	346,602,120	100	880
511129	Belanja Uang Makan PNS	1,521,432,000	901,566,000	879,223,000	287,000	878,936,000	97.49	22,630,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	169,902,000	112,270,000	112,240,000	924,900	111,315,100	99.15	954,900
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	10,552,224,000	9,443,555,000	9,410,630,077	11,073,180	9,399,556,897	99.53	43,998,103
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	0	7,536,000	7,534,500	0	7,534,500	99.98	1,500
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	6,000	149	0	149	2.48	5,851
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	756,000	753,450	0	753,450	99.66	2,550
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	153,000	0	0	0	0	153,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	435,000	434,520	0	434,520	99.89	480
511628	Belanja Uang Makan PPPK	0	2,310,000	2,100,000	0	2,100,000	90.91	210,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	540,000	540,000	0	540,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	0	11,736,000	11,362,619	0	11,362,619	96.82	373,381
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	138,621,000	177,376,000	177,262,000	0	177,262,000	99.94	114,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	138,621,000	177,376,000	177,262,000	0	177,262,000	99.94	114,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	10,690,845,000	9,632,667,000	9,599,254,696	11,073,180	9,588,181,516	99.54	44,485,484
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,004,759,000	1,475,183,000	1,464,150,785	0	1,464,150,785	99.25	11,032,215
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3,000,000	3,000,000	39,000	0	39,000	1.3	2,961,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	123,384,000	105,264,000	99,984,000	0	99,984,000	94.98	5,280,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	9,300,000	7,750,000	2,356,000	0	2,356,000	30.4	5,394,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	1,140,443,000	1,591,197,000	1,566,529,785	0	1,566,529,785	98.45	24,667,215
5212	Belanja Barang Non Operasional							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 135
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 2600
SATUAN KERJA : 692024
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL
BENGKULU
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 04/05/26 8:29 AM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 4/5/26 8:05 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521211	Belanja Bahan	346,322,000	291,174,000	111,658,950	0	111,658,950	38.35	179,515,050
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	44,000,000	33,718,000	4,500,000	0	4,500,000	13.35	29,218,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	80,000,000	84,329,000	1,200,000	0	1,200,000	1.42	83,129,000
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	7,512,000	7,512,000	5,468,000	0	5,468,000	72.79	2,044,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	477,834,000	416,733,000	122,826,950	0	122,826,950	29.47	293,906,050
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	148,232,000	187,301,000	156,194,900	0	156,194,900	83.39	31,106,100
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	148,232,000	187,301,000	156,194,900	0	156,194,900	83.39	31,106,100
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	288,000,000	264,000,000	258,557,026	0	258,557,026	97.94	5,442,974
522112	Belanja Langganan Telepon	2,400,000	2,400,000	2,297,700	0	2,297,700	95.74	102,300
522113	Belanja Langganan Air	60,000,000	45,000,000	41,124,100	0	41,124,100	91.39	3,875,900
522141	Belanja Sewa	1,004,120,000	875,810,000	875,630,000	0	875,630,000	99.98	180,000
522151	Belanja Jasa Profesi	25,200,000	26,100,000	7,200,000	0	7,200,000	27.59	18,900,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	55,964,000	63,489,000	20,000,000	0	20,000,000	31.5	43,489,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	1,435,684,000	1,276,799,000	1,204,808,826	0	1,204,808,826	94.36	71,990,174
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	293,690,000	487,941,000	487,103,958	0	487,103,958	99.83	837,042
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	13,436,000	37,000,000	33,020,700	0	33,020,700	89.25	3,979,300
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	71,240,000	118,470,000	118,367,000	0	118,367,000	99.91	103,000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	473,770,000	249,640,000	230,656,747	0	230,656,747	92.4	18,983,253
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	852,136,000	893,051,000	869,148,405	0	869,148,405	97.32	23,902,595
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,812,080,000	1,812,126,000	567,242,334	266,500	566,975,834	31.29	1,245,150,166
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	28,500,000	28,200,000	2,100,000	0	2,100,000	7.45	26,100,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	92,540,000	92,220,000	15,571,443	0	15,571,443	16.89	76,648,557
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	1,933,120,000	1,932,546,000	584,913,777	266,500	584,647,277	30.25	1,347,898,723
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	5,987,449,000	6,297,627,000	4,504,422,643	266,500	4,504,156,143	71.52	1,793,470,857
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	991,084,000	991,084,000	0	0	0	0	991,084,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	991,084,000	991,084,000	0	0	0	0	991,084,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	991,084,000	991,084,000	0	0	0	0	991,084,000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 135
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 2600
SATUAN KERJA : 692024
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL
BENGKULU
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 04/05/26 8:29 AM
 Halaman : 3
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 4/5/26 8:05 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA	17,669,378,000	16,921,378,000	14,103,677,339	11,339,680	14,092,337,659	83.28	2,829,040,341

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 135
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 2600
SATUAN KERJA : 692024

KEMENTERIAN HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL
BENGKULU
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 04/05/26 8:29 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	3,700,000	0	3,700,000	0
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	28,918,353	0	28,918,353	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	32,618,353	0	32,618,353	
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	92,338	0	92,338	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	92,338	0	92,338	
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,437,500	0	1,437,500	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	1,437,500	0	1,437,500	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	0	34,148,191	0	34,148,191	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	34,148,191	0	34,148,191	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (135) KEMENTERIAN HUKUM
ESELON I : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
WILAYAH/PROVINSI : (2600) BENGKULU
SATUAN KERJA : (692024) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU

Tgl Data : 04/05/26 1:32 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 8:27 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	31,516,970	0	31,516,970	
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	31,516,970	0	31,516,970	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	31,516,970	0	31,516,970	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	9,588,181,516	0	9,588,181,516	
Beban Persediaan	95,454,100	0	95,454,100	
Beban Barang dan Jasa	2,895,169,137	0	2,895,169,137	
Beban Pemeliharaan	828,527,705	0	828,527,705	
Beban Perjalanan Dinas	584,647,277	0	584,647,277	
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (135) KEMENTERIAN HUKUM
ESELON I : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
WILAYAH/PROVINSI : (2600) BENGKULU
SATUAN KERJA : (692024) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU

Tgl Data : 04/05/26 1:32 AM
Tgl Cetak : 04/05/26 8:27 AM
Halaman : 2
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	2,120,747,207	0	2,120,747,207	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	16,112,726,942	0	16,112,726,942	
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(16,081,209,972)	0	(16,081,209,972)	()
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,437,500	0	1,437,500	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,437,500	0	1,437,500	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	1,437,500	0	1,437,500	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(16,079,772,472)	0	(16,079,772,472)	()
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(16,079,772,472)	0	(16,079,772,472)	()

Keterangan :

FINAL



Bengkulu, 4 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran



ZULHAIRI

NIP 197112192003121001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (135) KEMENTERIAN HUKUM
UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
WILAYAH/PROVINSI : (2600) BENGKULU
SATUAN KERJA : (692024) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU

Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM
Tgl Cetak : 04/05/26 8:27 AM
Halaman : 1
lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(16,079,772,472)	0	(16,079,772,472)	0
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(7,450,812)	0	(7,450,812)	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(6,362,500)	0	(6,362,500)	0
LAIN-LAIN	(1,088,312)	0	(1,088,312)	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	49,511,886,803	0	49,511,886,803	0
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	33,424,663,519	0	33,424,663,519	0
EKUITAS AKHIR	33,424,663,519	0	33,424,663,519	0

Keterangan :

FINAL



Bengkulu, 4 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran



ZULHAIRI
NIP 197112192003121001



Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu

LAMPIRAN B

LAPORAN YANG DIHASILKAN APLIKASI MONSAKTI

MODUL ASET DAN PERSEDIAAN

1. Laporan Persediaan per 31 Desember 2025
2. Laporan Posisi BMN di Neraca per 31 Desember 2025
3. Laporan Posisi BMN Saldo Awal
4. Laporan Barang Intrakomptabel per 31 Desember 2025
5. Laporan Barang Ekstrakomptabel per 31 Desember 2025
6. Laporan Barang Gab. Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel per 31 Desember 2025
7. Laporan Barang Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025
8. Laporan Penyusutan Barang Intrakomptabel per 31 Desember 2025
9. Laporan Penyusutan Barang Ekstrakomptabel per 31 Desember 2025
10. Laporan Penyusutan Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

UAPB : 135 **KEMENTERIAN HUKUM**
UAKPB : 692024 **KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU**

Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM
Tanggal : 04/05/26 8:37 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sedia_satker_poc

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	5,537,000
1010301003	Penjepit Kertas	4,992,000
1010301004	Penghapus/Korektor	132,000
1010301005	Buku Tulis	3,625,000
1010301006	Ordner Dan Map	27,235,000
1010301007	Penggaris	430,000
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	443,000
1010301010	Alat Perekat	3,290,500
1010301012	Staples	2,002,500
1010301013	Isi Staples	1,500,000
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	3,582,500
1010302001	Kertas HVS	11,600,000
1010302002	Berbagai Kertas	1,827,500
1010302004	Amplop	1,145,000
1010304004	Tinta/Toner Printer	46,200,000
1010304006	USB/Flash Disk	35,000
1010306001	Kabel Listrik	3,762,000
1010306003	Stop Kontak	520,000
1010306004	Saklar	1,210,000
1010306005	Stacker	975,000
1010306006	Balast	2,570,000
1010306008	Vitting	350,000
1010306010	Batu Baterai	2,612,000
1010306999	Alat Listrik Lainnya	7,202,000
1010309001	Meterai	250,000
Jumlah Barang Konsumsi		133,028,000
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	
1010305005	Kunci, Kran Dan Semprotan	6,420,200
1010305007	Peralatan Ledeng	626,000
1010305013	Kuas	138,500
1010305999	Perabot Kantor Lainnya	9,247,000
Jumlah Bahan untuk Pemeliharaan		16,431,700
TOTAL		149,459,700

Keterangan :

1. Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi rusak.
2. Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi usang.

**LAPORAN POSISI PERSEDIAAN DI NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

UAPB : 135 **KEMENTERIAN HUKUM**
UAKPB : 692024 **KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU**

Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM
Tanggal : 04/05/26 8:37 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sedia_posisi_neraca_satker

Kode	Uraian	NILAI
117111	Barang Konsumsi	133,028,000
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	16,431,700
JUMLAH		149,459,700

**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
TAHUN ANGGARAN 2025**

UAPB : 135 **KEMENTERIAN HUKUM**
UAKPB : 692024 **KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU**

Tgl.Data : 04/05/26 6:37 AM
Tgl.Cetak : 04/05/26 8:36 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	133,028,000
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	16,431,700
131111	Tanah	15,329,825,000
132111	Peralatan dan Mesin	10,707,681,181
133111	Gedung dan Bangunan	24,328,322,496
135121	Aset Tetap Lainnya	163,172,162
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(8,984,846,366)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(8,470,600,299)
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	1,412,431,600
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(1,188,014,480)
J U M L A H		33,447,430,994



Bengkulu, 4 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Kantor Wilayah



ZULHAIRI
NIP 197112192003121001

**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 01 JANUARI 2025(SALDO AWAL)
TAHUN ANGGARAN 2025**

UAPB : 135 **KEMENTERIAN HUKUM**
UAKPB : 692024 **KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU**

Tanggal : 04/05/26 8:37 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_neraca_sawal_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 8:31 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

UAPB : 135
UAKPB : 692024

KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	Tanah		0	0	97,930	15,329,825,000	0	0	97,930	15,329,825,000
2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	M2	0	0	5,592	4,744,055,000	0	0	5,592	4,744,055,000
2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M2	0	0	92,338	10,585,770,000	0	0	92,338	10,585,770,000
132111	Peralatan dan Mesin		0	0	1,257	10,746,431,181	1	38,750,000	1,256	10,707,681,181
3010304003	Stationary Generating Set	Unit	0	0	1	405,000,000	0	0	1	405,000,000
3010305003	Stationary Water Pump	Unit	0	0	1	37,415,000	0	0	1	37,415,000
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	0	0	4	821,520,000	0	0	4	821,520,000
3020104001	Sepeda Motor	Unit	0	0	7	129,747,453	0	0	7	129,747,453
3050103009	Mesin Fotocopy Electronic	Buah	0	0	1	14,994,736	0	0	1	14,994,736
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	0	0	5	20,091,000	0	0	5	20,091,000
3050104002	Lemari Kayu	Buah	0	0	19	91,185,000	0	0	19	91,185,000
3050104003	Rak Besi	Buah	0	0	2	16,450,000	0	0	2	16,450,000
3050104004	Rak Kayu	Buah	0	0	1	6,501,000	0	0	1	6,501,000
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	0	0	11	28,098,000	0	0	11	28,098,000
3050104007	Brandkas	Buah	0	0	5	46,076,000	0	0	5	46,076,000
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	0	0	3	42,120,000	0	0	3	42,120,000
3050105017	Mesin Absensi	Buah	0	0	9	68,600,146	0	0	9	68,600,146
3050105037	White Board Electronic	Buah	0	0	1	249,750,000	0	0	1	249,750,000
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	0	0	10	76,053,800	0	0	10	76,053,800
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	0	0	1	2,200,000	0	0	1	2,200,000
3050105059	Alat Detektor Barang Terlarang	Buah	0	0	1	1,085,920,000	0	0	1	1,085,920,000
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	0	0	2	5,000,000	0	0	2	5,000,000
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	0	0	271	325,432,900	0	0	271	325,432,900
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	0	0	58	62,286,872	0	0	58	62,286,872
3050201004	Kursi Kayu	Buah	0	0	5	31,950,000	0	0	5	31,950,000
3050201005	Sice	Buah	0	0	23	140,160,560	0	0	23	140,160,560
3050201008	Meja Rapat	Buah	0	0	27	116,467,500	0	0	27	116,467,500
3050201009	Meja Komputer	Buah	0	0	4	6,600,000	0	0	4	6,600,000
3050201014	Meja Resepsionis	Buah	0	0	1	2,607,500	0	0	1	2,607,500
3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	Buah	0	0	106	108,389,540	0	0	106	108,389,540
3050201999	Meubelair Lainnya	dummy	0	0	1	5,000,000	0	0	1	5,000,000
3050202001	Jam Mekanis	Buah	0	0	2	129,000	0	0	2	129,000
3050203003	Mesin Pemetong Rumput	Buah	0	0	1	3,994,000	0	0	1	3,994,000
3050204001	Lemari Es	Buah	0	0	2	7,357,500	0	0	2	7,357,500
3050204002	A.C. Sentral	Buah	0	0	2	36,000,000	0	0	2	36,000,000
3050204004	A.C. Split	Buah	0	0	42	347,254,900	0	0	42	347,254,900
3050204005	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	Buah	0	0	1	4,345,000	0	0	1	4,345,000

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 8:31 AM

Halaman : 2

Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

UAPB : 135
UAKPB : 692024

KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
			KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN				KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3050204006	Kipas Angin	Buah	0	0	2	1,450,000	0	0	2	1,450,000
3050205008	Kitchen Set	Buah	0	0	2	10,648,000	0	0	2	10,648,000
3050206002	Televisi	Buah	0	0	17	424,798,790	0	0	17	424,798,790
3050206006	Equalizer	Buah	0	0	2	19,900,000	0	0	2	19,900,000
3050206007	Loudspeaker	Buah	0	0	4	21,962,000	0	0	4	21,962,000
3050206008	Sound System	Buah	0	0	5	75,976,393	0	0	5	75,976,393
3050206012	Wireless	Buah	0	0	1	1,950,000	0	0	1	1,950,000
3050206017	Unit Power Supply	Buah	0	0	10	141,112,000	0	0	10	141,112,000
3050206019	Stabilisator	Buah	0	0	1	1,125,000	0	0	1	1,125,000
3050206026	Lambang Garuda Pancasila	Buah	0	0	2	1,000,000	0	0	2	1,000,000
3050206027	Gambar Presiden/Wakil Presiden	Buah	0	0	2	502,000	0	0	2	502,000
3050206030	Tiang Bendera	Buah	0	0	2	348,000	0	0	2	348,000
3050206035	Kaca Hias	Buah	0	0	2	290,000	0	0	2	290,000
3050206036	Dispenser	Buah	0	0	3	10,191,000	0	0	3	10,191,000
3050206046	Handy Cam	Buah	0	0	1	8,675,000	0	0	1	8,675,000
3050206059	Kabel Roll	Buah	0	0	1	437,499	0	0	1	437,499
3050206071	Kabel	Buah	0	0	1	5,758,500	0	0	1	5,758,500
3050206080	Bracket Standing Peralatan	Buah	0	0	1	9,292,840	0	0	1	9,292,840
3050206999	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	dummy	0	0	1	3,685,000	0	0	1	3,685,000
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	0	0	10	24,565,200	0	0	10	24,565,200
3060101060	Power Amplifier	Buah	0	0	2	25,687,500	0	0	2	25,687,500
3060101088	Voice Recorder	Buah	0	0	2	3,470,400	0	0	2	3,470,400
3060101091	Digital LED Running Text	Buah	0	0	2	12,135,200	0	0	2	12,135,200
3060102056	Film Projector	Buah	0	0	1	15,710,000	0	0	1	15,710,000
3060102107	Layar Film/Projector	Buah	0	0	1	3,647,667	0	0	1	3,647,667
3060102128	Camera Digital	Buah	0	0	8	117,843,000	0	0	8	117,843,000
3060102132	Video Conference	Buah	0	0	1	271,231,521	0	0	1	271,231,521
3060102165	Camera Conference	Buah	0	0	3	30,822,620	0	0	3	30,822,620
3060102167	Drone	Buah	0	0	1	21,500,000	0	0	1	21,500,000
3060102170	Gimbal Tripod	Buah	0	0	1	4,250,000	0	0	1	4,250,000
3060201001	Telephone (PABX)	Buah	0	0	1	15,800,000	0	0	1	15,800,000
3060201002	Intermediate Telephone/Key Telephone	Buah	0	0	1	1,750,000	0	0	1	1,750,000
3060201003	Pesawat Telephone	Buah	0	0	24	11,541,000	0	0	24	11,541,000
3060201006	Handy Talky (HT)	Buah	0	0	15	57,398,313	0	0	15	57,398,313
3060201999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	dummy	0	0	1	900,000	0	0	1	900,000
3060206001	Publik Address (Lapangan)	Buah	0	0	1	90,000,000	0	0	1	90,000,000
3070101009	Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum)	Buah	0	0	1	1,800,000	0	0	1	1,800,000

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 8:31 AM

Halaman : 3

Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

UAPB : 135
UAKPB : 692024

KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
			KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN					KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3070101049	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	Buah	0	0	14	40,500,000	0	0	14	40,500,000
3070101127	Kursi Dorong	Buah	0	0	1	1,000,000	0	0	1	1,000,000
3070101155	UV Sterilizer	Buah	0	0	8	99,520,000	0	0	8	99,520,000
3070101172	Digital Thermometer	unit	0	0	1	179,500,000	0	0	1	179,500,000
3070101999	Alat Kedokteran Umum Lainnya	dummy	0	0	1	5,500,000	0	0	1	5,500,000
3070104108	Kursi Zeis	Buah	0	0	164	221,230,000	0	0	164	221,230,000
3090402031	Kamera Digital	Buah	0	0	1	38,750,000	1	38,750,000	0	0
3100101002	Mini Komputer	Buah	0	0	1	16,902,676	0	0	1	16,902,676
3100102001	P.C Unit	Buah	0	0	110	1,639,181,943	0	0	110	1,639,181,943
3100102002	Lap Top	Buah	0	0	79	1,169,944,720	0	0	79	1,169,944,720
3100102003	Note Book	Buah	0	0	3	41,994,466	0	0	3	41,994,466
3100102009	Tablet PC	Buah	0	0	12	102,992,548	0	0	12	102,992,548
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	0	0	56	320,175,060	0	0	56	320,175,060
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	0	0	19	194,616,118	0	0	19	194,616,118
3100203007	External	Buah	0	0	2	7,700,000	0	0	2	7,700,000
3100203017	External/ Portable Hardisk	Buah	0	0	3	3,600,000	0	0	3	3,600,000
3100204001	Server	Buah	0	0	3	716,713,800	0	0	3	716,713,800
3100204003	Hub	Buah	0	0	1	7,700,000	0	0	1	7,700,000
3100204004	Modem	Buah	0	0	1	1,540,000	0	0	1	1,540,000
3100204014	Rak Server	Buah	0	0	1	5,500,000	0	0	1	5,500,000
3100204021	Kabel UTP	Buah	0	0	6	2,490,000	0	0	6	2,490,000
3100204023	Wireless Access Point	Buah	0	0	1	1,220,500	0	0	1	1,220,500
3100204024	Switch	Buah	0	0	2	110,807,500	0	0	2	110,807,500
3150302012	Tenda Pleton (Alat Pendukung Pencarian)	Buah	0	0	1	23,500,000	0	0	1	23,500,000
133111	Gedung dan Bangunan		0	0	17	24,338,322,496	0	10,000,000	17	24,328,322,496
4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	0	0	3	20,075,091,633	0	0	3	20,075,091,633
4010102001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Unit	0	0	1	66,045,000	0	0	1	66,045,000
4010104999	Bangunan Gedung Instalasi Lainnya	dummy	0	0	1	33,022,000	0	0	1	33,022,000
4010108001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Unit	0	0	1	333,177,000	0	0	1	333,177,000
4010133001	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	Unit	0	0	1	129,624,000	0	0	1	129,624,000
4010201004	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	Unit	0	0	2	1,121,548,581	0	0	2	1,121,548,581
4010201007	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Unit	0	0	5	1,903,357,141	0	0	5	1,903,357,141
4010201010	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	Unit	0	0	2	521,918,153	0	0	2	521,918,153
4040104001	Pagar Permanen	Unit	0	0	1	154,538,988	0	10,000,000	1	144,538,988
135121	Aset Tetap Lainnya		0	0	1,692	163,172,162	0	0	1,692	163,172,162
6010101001	Monografi	Buah	0	0	1,692	163,172,162	0	0	1,692	163,172,162
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		0	0	93	1,412,431,600	0	0	93	1,412,431,600

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

UAPB : 135 KEMENTERIAN HUKUM
UAKPB : 692024 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU

Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM
Tgl Cetak : 04/05/26 8:31 AM
Halaman : 4
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3050103009	Mesin Fotocopy Electronic	Buah	0	0	1	39,717,180	0	0	1	39,717,180
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	0	0	2	6,725,000	0	0	2	6,725,000
3050104013	Buffet	Buah	0	0	1	3,500,000	0	0	1	3,500,000
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	0	0	1	10,950,000	0	0	1	10,950,000
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	0	0	1	1,114,000	0	0	1	1,114,000
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	0	0	40	14,476,000	0	0	40	14,476,000
3050204004	A.C. Split	Buah	0	0	11	58,989,375	0	0	11	58,989,375
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	0	0	4	21,812,699	0	0	4	21,812,699
3060102128	Camera Digital	Buah	0	0	4	53,708,700	0	0	4	53,708,700
3060102132	Video Conference	Buah	0	0	1	446,600,000	0	0	1	446,600,000
3060102167	Drone	Buah	0	0	1	18,981,000	0	0	1	18,981,000
3060347002	Genset	Buah	0	0	1	64,000,000	0	0	1	64,000,000
3100102001	P.C Unit	Buah	0	0	10	102,732,746	0	0	10	102,732,746
3100102002	Lap Top	Buah	0	0	5	68,876,900	0	0	5	68,876,900
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	0	0	2	6,600,000	0	0	2	6,600,000
3100203017	External/ Portable Hardisk	Buah	0	0	2	2,400,000	0	0	2	2,400,000
3100204001	Server	Buah	0	0	1	110,880,000	0	0	1	110,880,000
4010124001	Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plaat	Unit	0	0	5	380,368,000	0	0	5	380,368,000
TOTAL				0		51,990,182,439		48,750,000		51,941,432,439

Bengkulu, 4 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Kantor Wilayah



ZULHAIRI
NIP 197112192003121001



**LAPORAN BARANG PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

UAPB : 135 **KEMENTERIAN HUKUM**
UAKPB : 692024 **KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU**

Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM
Tgl Cetak : 04/05/26 8:33 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_ekstra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132111	Peralatan dan Mesin		0	0	307	169,332,000	0	0	307	169,332,000
3010305010	Pompa Air	-	0	0	1	518,000	0	0	1	518,000
3050104002	Lemari Kayu	-	0	0	120	72,600,000	0	0	120	72,600,000
3050105026	Perforator Besar	-	0	0	2	1,950,000	0	0	2	1,950,000
3050201003	Kursi Besi/Metal	-	0	0	161	77,737,000	0	0	161	77,737,000
3050201039	Meja Lipat	-	0	0	5	4,950,000	0	0	5	4,950,000
3050206027	Gambar Presiden/Wakil Presiden	-	0	0	1	100,000	0	0	1	100,000
3050206036	Dispenser	-	0	0	3	750,000	0	0	3	750,000
3070101005	Tensimeter	-	0	0	1	600,000	0	0	1	600,000
3070101049	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	-	0	0	4	2,090,000	0	0	4	2,090,000
3070101097	Lemari Obat (Kaca)	-	0	0	1	285,000	0	0	1	285,000
3100203017	External/ Portable Hardisk	-	0	0	8	7,752,000	0	0	8	7,752,000
TOTAL				0		169,332,000		0		169,332,000



Bengkulu, 4 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Kantor Wilayah



ZULHAIRI
NIP 197112192003121001

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

UAPB : 135
UAKPB : 692024

KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU

Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 8:33 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_gab_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
			KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN	3			4	5	6	7		
131111	Tanah		0	0	97,930	15,329,825,000	0	0	97,930	15,329,825,000
2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	M2	0	0	5,592	4,744,055,000	0	0	5,592	4,744,055,000
2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M2	0	0	92,338	10,585,770,000	0	0	92,338	10,585,770,000
132111	Peralatan dan Mesin		0	0	1,564	10,915,763,181	1	38,750,000	1,563	10,877,013,181
3010304003	Stationary Generating Set	Unit	0	0	1	405,000,000	0	0	1	405,000,000
3010305003	Stationary Water Pump	Unit	0	0	1	37,415,000	0	0	1	37,415,000
3010305010	Pompa Air	Unit	0	0	1	518,000	0	0	1	518,000
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	0	0	4	821,520,000	0	0	4	821,520,000
3020104001	Sepeda Motor	Unit	0	0	7	129,747,453	0	0	7	129,747,453
3050103009	Mesin Fotocopy Electronic	Buah	0	0	1	14,994,736	0	0	1	14,994,736
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	0	0	5	20,091,000	0	0	5	20,091,000
3050104002	Lemari Kayu	Buah	0	0	139	163,785,000	0	0	139	163,785,000
3050104003	Rak Besi	Buah	0	0	2	16,450,000	0	0	2	16,450,000
3050104004	Rak Kayu	Buah	0	0	1	6,501,000	0	0	1	6,501,000
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	0	0	11	28,098,000	0	0	11	28,098,000
3050104007	Brandkas	Buah	0	0	5	46,076,000	0	0	5	46,076,000
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	0	0	3	42,120,000	0	0	3	42,120,000
3050105017	Mesin Absensi	Buah	0	0	9	68,600,146	0	0	9	68,600,146
3050105026	Perforator Besar	Buah	0	0	2	1,950,000	0	0	2	1,950,000
3050105037	White Board Electronic	Buah	0	0	1	249,750,000	0	0	1	249,750,000
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	0	0	10	76,053,800	0	0	10	76,053,800
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	0	0	1	2,200,000	0	0	1	2,200,000
3050105059	Alat Detektor Barang Terlarang	Buah	0	0	1	1,085,920,000	0	0	1	1,085,920,000
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	0	0	2	5,000,000	0	0	2	5,000,000
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	0	0	271	325,432,900	0	0	271	325,432,900
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	0	0	219	140,023,872	0	0	219	140,023,872
3050201004	Kursi Kayu	Buah	0	0	5	31,950,000	0	0	5	31,950,000
3050201005	Sice	Buah	0	0	23	140,160,560	0	0	23	140,160,560
3050201008	Meja Rapat	Buah	0	0	27	116,467,500	0	0	27	116,467,500
3050201009	Meja Komputer	Buah	0	0	4	6,600,000	0	0	4	6,600,000
3050201014	Meja Resepsionis	Buah	0	0	1	2,607,500	0	0	1	2,607,500
3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	Buah	0	0	106	108,389,540	0	0	106	108,389,540
3050201039	Meja Lipat	UNIT	0	0	5	4,950,000	0	0	5	4,950,000
3050201999	Meubelair Lainnya	dummy	0	0	1	5,000,000	0	0	1	5,000,000
3050202001	Jam Mekanis	Buah	0	0	2	129,000	0	0	2	129,000
3050203003	Mesin Pematong Rumput	Buah	0	0	1	3,994,000	0	0	1	3,994,000
3050204001	Lemari Es	Buah	0	0	2	7,357,500	0	0	2	7,357,500

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 8:33 AM

Halaman : 2

Kode Lap : lap_bmn_gab_satker_poc

UAPB : 135
UAKPB : 692024

KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
			KUANITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANITAS	NILAI
KODE	URAIAN	3			4	5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3050204002	A.C. Sentral	Buah	0	0	2	36,000,000	0	0	2	36,000,000
3050204004	A.C. Split	Buah	0	0	42	347,254,900	0	0	42	347,254,900
3050204005	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	Buah	0	0	1	4,345,000	0	0	1	4,345,000
3050204006	Kipas Angin	Buah	0	0	2	1,450,000	0	0	2	1,450,000
3050205008	Kitchen Set	Buah	0	0	2	10,648,000	0	0	2	10,648,000
3050206002	Televisi	Buah	0	0	17	424,798,790	0	0	17	424,798,790
3050206006	Equalizer	Buah	0	0	2	19,900,000	0	0	2	19,900,000
3050206007	Loudspeaker	Buah	0	0	4	21,962,000	0	0	4	21,962,000
3050206008	Sound System	Buah	0	0	5	75,976,393	0	0	5	75,976,393
3050206012	Wireless	Buah	0	0	1	1,950,000	0	0	1	1,950,000
3050206017	Unit Power Supply	Buah	0	0	10	141,112,000	0	0	10	141,112,000
3050206019	Stabilisator	Buah	0	0	1	1,125,000	0	0	1	1,125,000
3050206026	Lambang Garuda Pancasila	Buah	0	0	2	1,000,000	0	0	2	1,000,000
3050206027	Gambar Presiden/Wakil Presiden	Buah	0	0	3	602,000	0	0	3	602,000
3050206030	Tiang Bendera	Buah	0	0	2	348,000	0	0	2	348,000
3050206035	Kaca Hias	Buah	0	0	2	290,000	0	0	2	290,000
3050206036	Dispenser	Buah	0	0	6	10,941,000	0	0	6	10,941,000
3050206046	Handy Cam	Buah	0	0	1	8,675,000	0	0	1	8,675,000
3050206059	Kabel Roll	Buah	0	0	1	437,499	0	0	1	437,499
3050206071	Kabel	Buah	0	0	1	5,758,500	0	0	1	5,758,500
3050206080	Bracket Standing Peralatan	Buah	0	0	1	9,292,840	0	0	1	9,292,840
3050206999	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	dummy	0	0	1	3,685,000	0	0	1	3,685,000
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	0	0	10	24,565,200	0	0	10	24,565,200
3060101060	Power Amplifier	Buah	0	0	2	25,687,500	0	0	2	25,687,500
3060101088	Voice Recorder	Buah	0	0	2	3,470,400	0	0	2	3,470,400
3060101091	Digital LED Running Text	Buah	0	0	2	12,135,200	0	0	2	12,135,200
3060102056	Film Projector	Buah	0	0	1	15,710,000	0	0	1	15,710,000
3060102107	Layar Film/Projector	Buah	0	0	1	3,647,667	0	0	1	3,647,667
3060102128	Camera Digital	Buah	0	0	8	117,843,000	0	0	8	117,843,000
3060102132	Video Conference	Buah	0	0	1	271,231,521	0	0	1	271,231,521
3060102165	Camera Conference	Buah	0	0	3	30,822,620	0	0	3	30,822,620
3060102167	Drone	Buah	0	0	1	21,500,000	0	0	1	21,500,000
3060102170	Gimbal Tripod	Buah	0	0	1	4,250,000	0	0	1	4,250,000
3060201001	Telephone (PABX)	Buah	0	0	1	15,800,000	0	0	1	15,800,000
3060201002	Intermediate Telephone/Key Telephone	Buah	0	0	1	1,750,000	0	0	1	1,750,000
3060201003	Pesawat Telephone	Buah	0	0	24	11,541,000	0	0	24	11,541,000
3060201006	Handy Talky (HT)	Buah	0	0	15	57,398,313	0	0	15	57,398,313

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

UAPB : 135 KEMENTERIAN HUKUM
UAKPB : 692024 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU

Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM
Tgl Cetak : 04/05/26 8:33 AM
Halaman : 3
Kode Lap : lap_bmn_gab_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3060201999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	dummy	0	0	1	900,000	0	0	1	900,000
3060206001	Publik Address (Lapangan)	Buah	0	0	1	90,000,000	0	0	1	90,000,000
3070101005	Tensimeter	Buah	0	0	1	600,000	0	0	1	600,000
3070101009	Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum)	Buah	0	0	1	1,800,000	0	0	1	1,800,000
3070101049	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	Buah	0	0	18	42,590,000	0	0	18	42,590,000
3070101097	Lemari Obat (Kaca)	Buah	0	0	1	285,000	0	0	1	285,000
3070101127	Kursi Dorong	Buah	0	0	1	1,000,000	0	0	1	1,000,000
3070101155	UV Sterilizer	Buah	0	0	8	99,520,000	0	0	8	99,520,000
3070101172	Digital Thermometer	unit	0	0	1	179,500,000	0	0	1	179,500,000
3070101999	Alat Kedokteran Umum Lainnya	dummy	0	0	1	5,500,000	0	0	1	5,500,000
3070104108	Kursi Zeis	Buah	0	0	164	221,230,000	0	0	164	221,230,000
3090402031	Kamera Digital	Buah	0	0	1	38,750,000	1	38,750,000	0	0
3100101002	Mini Komputer	Buah	0	0	1	16,902,676	0	0	1	16,902,676
3100102001	P.C Unit	Buah	0	0	110	1,639,181,943	0	0	110	1,639,181,943
3100102002	Lap Top	Buah	0	0	79	1,169,944,720	0	0	79	1,169,944,720
3100102003	Note Book	Buah	0	0	3	41,994,466	0	0	3	41,994,466
3100102009	Tablet PC	Buah	0	0	12	102,992,548	0	0	12	102,992,548
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	0	0	56	320,175,060	0	0	56	320,175,060
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	0	0	19	194,616,118	0	0	19	194,616,118
3100203007	External	Buah	0	0	2	7,700,000	0	0	2	7,700,000
3100203017	External/ Portable Hardisk	Buah	0	0	11	11,352,000	0	0	11	11,352,000
3100204001	Server	Buah	0	0	3	716,713,800	0	0	3	716,713,800
3100204003	Hub	Buah	0	0	1	7,700,000	0	0	1	7,700,000
3100204004	Modem	Buah	0	0	1	1,540,000	0	0	1	1,540,000
3100204014	Rak Server	Buah	0	0	1	5,500,000	0	0	1	5,500,000
3100204021	Kabel UTP	Buah	0	0	6	2,490,000	0	0	6	2,490,000
3100204023	Wireless Access Point	Buah	0	0	1	1,220,500	0	0	1	1,220,500
3100204024	Switch	Buah	0	0	2	110,807,500	0	0	2	110,807,500
3150302012	Tenda Pleton (Alat Pendukung Pencarian)	Buah	0	0	1	23,500,000	0	0	1	23,500,000
133111	Gedung dan Bangunan		0	0	17	24,338,322,496	0	10,000,000	17	24,328,322,496
4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	0	0	3	20,075,091,633	0	0	3	20,075,091,633
4010102001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Unit	0	0	1	66,045,000	0	0	1	66,045,000
4010104999	Bangunan Gedung Instalasi Lainnya	dummy	0	0	1	33,022,000	0	0	1	33,022,000
4010108001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Unit	0	0	1	333,177,000	0	0	1	333,177,000
4010133001	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	Unit	0	0	1	129,624,000	0	0	1	129,624,000
4010201004	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	Unit	0	0	2	1,121,548,581	0	0	2	1,121,548,581
4010201007	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Unit	0	0	5	1,903,357,141	0	0	5	1,903,357,141

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 8:33 AM

Halaman : 4

Kode Lap : lap_bmn_gab_satker_poc

UAPB : 135
UAKPB : 692024

KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4010201010	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	Unit	0	0	2	521,918,153	0	0	2	521,918,153
4040104001	Pagar Permanen	Unit	0	0	1	154,538,988	0	10,000,000	1	144,538,988
135121	Aset Tetap Lainnya		0	0	1,692	163,172,162	0	0	1,692	163,172,162
6010101001	Monografi	Buah	0	0	1,692	163,172,162	0	0	1,692	163,172,162
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		0	0	93	1,412,431,600	0	0	93	1,412,431,600
3050103009	Mesin Fotocopy Electronic	Buah	0	0	1	39,717,180	0	0	1	39,717,180
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	0	0	2	6,725,000	0	0	2	6,725,000
3050104013	Buffet	Buah	0	0	1	3,500,000	0	0	1	3,500,000
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	0	0	1	10,950,000	0	0	1	10,950,000
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	0	0	1	1,114,000	0	0	1	1,114,000
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	0	0	40	14,476,000	0	0	40	14,476,000
3050204004	A.C. Split	Buah	0	0	11	58,989,375	0	0	11	58,989,375
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	0	0	4	21,812,699	0	0	4	21,812,699
3060102128	Camera Digital	Buah	0	0	4	53,708,700	0	0	4	53,708,700
3060102132	Video Conference	Buah	0	0	1	446,600,000	0	0	1	446,600,000
3060102167	Drone	Buah	0	0	1	18,981,000	0	0	1	18,981,000
3060347002	Genset	Buah	0	0	1	64,000,000	0	0	1	64,000,000
3100102001	P.C Unit	Buah	0	0	10	102,732,746	0	0	10	102,732,746
3100102002	Lap Top	Buah	0	0	5	68,876,900	0	0	5	68,876,900
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	0	0	2	6,600,000	0	0	2	6,600,000
3100203017	External/ Portable Hardisk	Buah	0	0	2	2,400,000	0	0	2	2,400,000
3100204001	Server	Buah	0	0	1	110,880,000	0	0	1	110,880,000
4010124001	Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plaat	Unit	0	0	5	380,368,000	0	0	5	380,368,000
TOTAL				0	0	52,159,514,439	48,750,000	0	52,110,764,439	



Bengkulu, 4 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Kantor Wilayah



ZULHAIRI
NIP 197112192003121001

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

UAPB : 135 KEMENTERIAN HUKUM
UAKPB : 692024 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU

Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM
Tanggal : 04/05/26 8:34 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_atb_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Bengkulu, 4 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Kantor Wilayah



ZULHAIRI
NIP 197112192003121001

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

UAPB : 135 KEMENTERIAN HUKUM
UAKPB : 692024 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU

Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM
Tgl Cetak : 04/05/26 8:35 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2025 - AUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
131111	Tanah		97,930	15,329,825,000	0	0	0	15,329,825,000
2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	M2	5,592	4,744,055,000	0	0	0	4,744,055,000
2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M2	92,338	10,585,770,000	0	0	0	10,585,770,000
132111	Peralatan dan Mesin		1,256	10,707,681,181	0	(8,984,846,366)	(8,984,846,366)	1,722,834,815
3010304003	Stationary Generating Set	Unit	1	405,000,000	0	(144,642,857)	(144,642,857)	260,357,143
3010305003	Stationary Water Pump	Unit	1	37,415,000	0	(37,415,000)	(37,415,000)	0
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	4	821,520,000	0	(649,555,715)	(649,555,715)	171,964,285
3020104001	Sepeda Motor	Unit	7	129,747,453	0	(72,754,050)	(72,754,050)	56,993,403
3050103009	Mesin Fotocopy Electronic	Buah	1	14,994,736	0	(14,994,736)	(14,994,736)	0
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	5	20,091,000	0	(16,956,000)	(16,956,000)	3,135,000
3050104002	Lemari Kayu	Buah	19	91,185,000	0	(91,185,000)	(91,185,000)	0
3050104003	Rak Besi	Buah	2	16,450,000	0	(16,450,000)	(16,450,000)	0
3050104004	Rak Kayu	Buah	1	6,501,000	0	(6,501,000)	(6,501,000)	0
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	11	28,098,000	0	(28,098,000)	(28,098,000)	0
3050104007	Brandkas	Buah	5	46,076,000	0	(46,076,000)	(46,076,000)	0
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	3	42,120,000	0	(29,320,000)	(29,320,000)	12,800,000
3050105017	Mesin Absensi	Buah	9	68,600,146	0	(68,600,146)	(68,600,146)	0
3050105037	White Board Electronic	Buah	1	249,750,000	0	(74,925,000)	(74,925,000)	174,825,000
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	10	76,053,800	0	(68,655,800)	(68,655,800)	7,398,000
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	1	2,200,000	0	(2,200,000)	(2,200,000)	0
3050105059	Alat Detektor Barang Terlarang	Buah	1	1,085,920,000	0	(1,085,920,000)	(1,085,920,000)	0
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	2	5,000,000	0	(2,500,000)	(2,500,000)	2,500,000
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	271	325,432,900	0	(310,725,400)	(310,725,400)	14,707,500
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	58	62,286,872	0	(62,286,872)	(62,286,872)	0
3050201004	Kursi Kayu	Buah	5	31,950,000	0	(30,100,000)	(30,100,000)	1,850,000
3050201005	Sice	Buah	23	140,160,560	0	(128,385,560)	(128,385,560)	11,775,000
3050201008	Meja Rapat	Buah	27	116,467,500	0	(96,037,499)	(96,037,499)	20,430,001
3050201009	Meja Komputer	Buah	4	6,600,000	0	(6,600,000)	(6,600,000)	0
3050201014	Meja Resepsionis	Buah	1	2,607,500	0	(2,607,500)	(2,607,500)	0
3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	Buah	106	108,389,540	0	(108,389,540)	(108,389,540)	0
3050201999	Meubelair Lainnya	dummy	1	5,000,000	0	(5,000,000)	(5,000,000)	0
3050202001	Jam Mekanis	Buah	2	129,000	0	(129,000)	(129,000)	0
3050203003	Mesin Pemotong Rumput	Buah	1	3,994,000	0	(3,994,000)	(3,994,000)	0
3050204001	Lemari Es	Buah	2	7,357,500	0	(3,678,750)	(3,678,750)	3,678,750
3050204002	A.C. Sentral	Buah	2	36,000,000	0	(36,000,000)	(36,000,000)	0
3050204004	A.C. Split	Buah	42	347,254,900	0	(258,870,900)	(258,870,900)	88,384,000
3050204005	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	Buah	1	4,345,000	0	(1,738,000)	(1,738,000)	2,607,000

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

UAPB : 135 KEMENTERIAN HUKUM
UAKPB : 692024 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU

Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM
Tgl Cetak : 04/05/26 8:35 AM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2025 - AUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
3050204006	Kipas Angin	Buah	2	1,450,000	0	(1,450,000)	(1,450,000)	0
3050205008	Kitchen Set	Buah	2	10,648,000	0	(10,648,000)	(10,648,000)	0
3050206002	Televisi	Buah	17	424,798,790	0	(246,324,395)	(246,324,395)	178,474,395
3050206006	Equalizer	Buah	2	19,900,000	0	(19,900,000)	(19,900,000)	0
3050206007	Loudspeaker	Buah	4	21,962,000	0	(21,962,000)	(21,962,000)	0
3050206008	Sound System	Buah	5	75,976,393	0	(72,179,664)	(72,179,664)	3,796,729
3050206012	Wireless	Buah	1	1,950,000	0	(1,950,000)	(1,950,000)	0
3050206017	Unit Power Supply	Buah	10	141,112,000	0	(60,410,800)	(60,410,800)	80,701,200
3050206019	Stabilisator	Buah	1	1,125,000	0	(1,125,000)	(1,125,000)	0
3050206026	Lambang Garuda Pancasila	Buah	2	1,000,000	0	(1,000,000)	(1,000,000)	0
3050206027	Gambar Presiden/Wakil Presiden	Buah	2	502,000	0	(502,000)	(502,000)	0
3050206030	Tiang Bendera	Buah	2	348,000	0	(348,000)	(348,000)	0
3050206035	Kaca Hias	Buah	2	290,000	0	(290,000)	(290,000)	0
3050206036	Dispenser	Buah	3	10,191,000	0	(10,191,000)	(10,191,000)	0
3050206046	Handy Cam	Buah	1	8,675,000	0	(8,675,000)	(8,675,000)	0
3050206059	Kabel Roll	Buah	1	437,499	0	(437,499)	(437,499)	0
3050206071	Kabel	Buah	1	5,758,500	0	(5,758,500)	(5,758,500)	0
3050206080	Bracket Standing Peralatan	Buah	1	9,292,840	0	(9,292,840)	(9,292,840)	0
3050206999	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	dummy	1	3,685,000	0	(3,685,000)	(3,685,000)	0
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	10	24,565,200	0	(24,565,200)	(24,565,200)	0
3060101060	Power Amplifier	Buah	2	25,687,500	0	(25,687,500)	(25,687,500)	0
3060101088	Voice Recorder	Buah	2	3,470,400	0	(3,470,400)	(3,470,400)	0
3060101091	Digital LED Running Text	Buah	2	12,135,200	0	(12,135,200)	(12,135,200)	0
3060102056	Film Projector	Buah	1	15,710,000	0	(15,710,000)	(15,710,000)	0
3060102107	Layar Film/Projector	Buah	1	3,647,667	0	(3,647,667)	(3,647,667)	0
3060102128	Camera Digital	Buah	8	117,843,000	0	(88,109,000)	(88,109,000)	29,734,000
3060102132	Video Conference	Buah	1	271,231,521	0	(271,231,521)	(271,231,521)	0
3060102165	Camera Conference	Buah	3	30,822,620	0	(30,274,758)	(30,274,758)	547,862
3060102167	Drone	Buah	1	21,500,000	0	(21,500,000)	(21,500,000)	0
3060102170	Gimbal Tripod	Buah	1	4,250,000	0	(1,700,000)	(1,700,000)	2,550,000
3060201001	Telephone (PABX)	Buah	1	15,800,000	0	(15,800,000)	(15,800,000)	0
3060201002	Intermediate Telephone/Key Telephone	Buah	1	1,750,000	0	(1,750,000)	(1,750,000)	0
3060201003	Pesawat Telephone	Buah	24	11,541,000	0	(11,541,000)	(11,541,000)	0
3060201006	Handy Talky (HT)	Buah	15	57,398,313	0	(36,395,631)	(36,395,631)	21,002,682
3060201999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	dummy	1	900,000	0	(900,000)	(900,000)	0
3060206001	Publik Address (Lapangan)	Buah	1	90,000,000	0	(63,000,000)	(63,000,000)	27,000,000
3070101009	Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum)	Buah	1	1,800,000	0	(1,800,000)	(1,800,000)	0

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

UAPB : 135 KEMENTERIAN HUKUM
UAKPB : 692024 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU

Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM
Tgl Cetak : 04/05/26 8:35 AM
Halaman : 3
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2025 - AUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
3070101049	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	Buah	14	40,500,000	0	(40,500,000)	(40,500,000)	0
3070101127	Kursi Dorong	Buah	1	1,000,000	0	(1,000,000)	(1,000,000)	0
3070101155	UV Sterilizer	Buah	8	99,520,000	0	(99,520,000)	(99,520,000)	0
3070101172	Digital Thermometer	unit	1	179,500,000	0	(179,500,000)	(179,500,000)	0
3070101999	Alat Kedokteran Umum Lainnya	dummy	1	5,500,000	0	(5,500,000)	(5,500,000)	0
3070104108	Kursi Zeis	Buah	164	221,230,000	0	(206,205,000)	(206,205,000)	15,025,000
3100101002	Mini Komputer	Buah	1	16,902,676	0	(16,902,676)	(16,902,676)	0
3100102001	P.C Unit	Buah	110	1,639,181,943	0	(1,462,320,106)	(1,462,320,106)	176,861,837
3100102002	Lap Top	Buah	79	1,169,944,720	0	(1,000,996,212)	(1,000,996,212)	168,948,508
3100102003	Note Book	Buah	3	41,994,466	0	(41,994,466)	(41,994,466)	0
3100102009	Tablet PC	Buah	12	102,992,548	0	(57,956,298)	(57,956,298)	45,036,250
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	56	320,175,060	0	(265,677,485)	(265,677,485)	54,497,575
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	19	194,616,118	0	(177,703,048)	(177,703,048)	16,913,070
3100203007	External	Buah	2	7,700,000	0	(7,700,000)	(7,700,000)	0
3100203017	External/ Portable Hardisk	Buah	3	3,600,000	0	(3,600,000)	(3,600,000)	0
3100204001	Server	Buah	3	716,713,800	0	(716,713,800)	(716,713,800)	0
3100204003	Hub	Buah	1	7,700,000	0	(7,700,000)	(7,700,000)	0
3100204004	Modem	Buah	1	1,540,000	0	(1,540,000)	(1,540,000)	0
3100204014	Rak Server	Buah	1	5,500,000	0	(5,500,000)	(5,500,000)	0
3100204021	Kabel UTP	Buah	6	2,490,000	0	(2,490,000)	(2,490,000)	0
3100204023	Wireless Access Point	Buah	1	1,220,500	0	(1,220,500)	(1,220,500)	0
3100204024	Switch	Buah	2	110,807,500	0	(42,466,875)	(42,466,875)	68,340,625
3150302012	Tenda Pleton (Alat Pendukung Pencarian)	Buah	1	23,500,000	0	(23,500,000)	(23,500,000)	0
133111	Gedung dan Bangunan		17	24,328,322,496	0	(8,470,600,299)	(8,470,600,299)	15,857,722,197
4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	3	20,075,091,633	0	(7,329,152,348)	(7,329,152,348)	12,745,939,285
4010102001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Unit	1	66,045,000	0	(15,172,500)	(15,172,500)	50,872,500
4010104999	Bangunan Gedung Instalasi Lainnya	dummy	1	33,022,000	0	(6,379,250)	(6,379,250)	26,642,750
4010108001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Unit	1	333,177,000	0	(96,000,156)	(96,000,156)	237,176,844
4010133001	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	Unit	1	129,624,000	0	(24,628,560)	(24,628,560)	104,995,440
4010201004	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	Unit	2	1,121,548,581	0	(379,876,489)	(379,876,489)	741,672,092
4010201007	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Unit	5	1,903,357,141	0	(476,769,259)	(476,769,259)	1,426,587,882
4010201010	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	Unit	2	521,918,153	0	(115,159,328)	(115,159,328)	406,758,825
4040104001	Pagar Permanen	Unit	1	144,538,988	0	(27,462,409)	(27,462,409)	117,076,579
135121	Aset Tetap Lainnya		1,692	163,172,162	0	0	0	163,172,162
6010101001	Monografi	Buah	1,692	163,172,162	0	0	0	163,172,162
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		93	1,412,431,600	0	(1,188,014,480)	(1,188,014,480)	224,417,120
3050103009	Mesin Fotocopy Electronic	Buah	1	39,717,180	0	(39,717,180)	(39,717,180)	0

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

UAPB : 135 KEMENTERIAN HUKUM
UAKPB : 692024 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU

Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM
Tgl Cetak : 04/05/26 8:35 AM
Halaman : 4
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2025 - AUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	2	6,725,000	0	(6,725,000)	(6,725,000)	0
3050104013	Buffet	Buah	1	3,500,000	0	(3,500,000)	(3,500,000)	0
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	1	10,950,000	0	(10,950,000)	(10,950,000)	0
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	1	1,114,000	0	(1,114,000)	(1,114,000)	0
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	40	14,476,000	0	(14,476,000)	(14,476,000)	0
3050204004	A.C. Split	Buah	11	58,989,375	0	(58,989,375)	(58,989,375)	0
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	4	21,812,699	0	(21,812,699)	(21,812,699)	0
3060102128	Camera Digital	Buah	4	53,708,700	0	(53,708,700)	(53,708,700)	0
3060102132	Video Conference	Buah	1	446,600,000	0	(446,600,000)	(446,600,000)	0
3060102167	Drone	Buah	1	18,981,000	0	(18,981,000)	(18,981,000)	0
3060347002	Genset	Buah	1	64,000,000	0	(64,000,000)	(64,000,000)	0
3100102001	P.C Unit	Buah	10	102,732,746	0	(102,732,746)	(102,732,746)	0
3100102002	Lap Top	Buah	5	68,876,900	0	(68,876,900)	(68,876,900)	0
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	2	6,600,000	0	(6,600,000)	(6,600,000)	0
3100203017	External/ Portable Hardisk	Buah	2	2,400,000	0	(2,400,000)	(2,400,000)	0
3100204001	Server	Buah	1	110,880,000	0	(110,880,000)	(110,880,000)	0
4010124001	Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plaat	Unit	5	380,368,000	0	(155,950,880)	(155,950,880)	224,417,120
JUMLAH			100,988	51,941,432,439	0	(18,643,461,145)	(18,643,461,145)	33,297,971,294



Bengkulu, 4 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Kantor Wilayah



ZULHAIRI
NIP 197112192003121001

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

UAPB : 135 KEMENTERIAN HUKUM
UAKPB : 692024 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU

Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM
Tgl Cetak : 04/05/26 8:36 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2025 - AUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI PENYUSUTAN	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
132111	Peralatan dan Mesin		307	169,332,000	0	(148,781,000)	(148,781,000)	20,551,000
3010305010	Pompa Air	Unit	1	518,000	0	(37,000)	(37,000)	481,000
3050104002	Lemari Kayu	Buah	120	72,600,000	0	(72,600,000)	(72,600,000)	0
3050105026	Perforator Besar	Buah	2	1,950,000	0	(975,000)	(975,000)	975,000
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	161	77,737,000	0	(63,097,000)	(63,097,000)	14,640,000
3050201039	Meja Lipat	UNIT	5	4,950,000	0	(495,000)	(495,000)	4,455,000
3050206027	Gambar Presiden/Wakil Presiden	Buah	1	100,000	0	(100,000)	(100,000)	0
3050206036	Dispenser	Buah	3	750,000	0	(750,000)	(750,000)	0
3070101005	Tensimeter	Buah	1	600,000	0	(600,000)	(600,000)	0
3070101049	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	Buah	4	2,090,000	0	(2,090,000)	(2,090,000)	0
3070101097	Lemari Obat (Kaca)	Buah	1	285,000	0	(285,000)	(285,000)	0
3100203017	External/ Portable Hardisk	Buah	8	7,752,000	0	(7,752,000)	(7,752,000)	0
JUMLAH			307	169,332,000	0	(148,781,000)	(148,781,000)	20,551,000



Bengkulu, 4 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Kantor Wilayah



ZULHAIRI

NIP 197112192003121001

**LAPORAN AMORTISASI BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

UAPA : 135 **KEMENTERIAN HUKUM**
UAKPB : 692024 **KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU**

Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM
Tanggal : 04/05/26 8:36 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_amor_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2025 - AUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI AMORTISASI	MUTASI AMORTISASI	TOTAL AKUMULASI AMORTISASI	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8



Bengkulu, 4 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Kantor Wilayah



ZULHAIRI
NIP 197112192003121001



Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu

LAMPIRAN C

1. Hasil Rekonsiliasi SAKTI – SPAN periode 31 Desember 2025
2. LPJ Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025
3. Memo Penyesuaian



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI BENGKULU
KPPN BENGKULU

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 692024 - KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU
SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 04/05/26 12:26

Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	16,921,378,000	16,921,378,000	0
2	Belanja	14,103,677,339	14,103,677,339	0
3	Pengembalian Belanja	-11,339,680	-11,339,680	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	34,148,191	34,148,191	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 21 Januari 2026



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Desember 2025

Kementerian/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM

Tgl, No. SP : 02 Desember 2024 , DIPA-135.01.2.692024/2025

Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

Tahun : 2025

Provinsi/Kabupaten/Kota : (26.51) BENGKULU / KOTA BENGKULU

KPPN : (016) Bengkulu

Satuan Kerja : (692024) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU

Alamat dan No Telp :

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00031/DRPP/692024/2025

1	2	3	4	5	6
Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)	
A	BP Kas, BPP dan UM	19.605.810,00	1.250.838.685,00	1.270.444.495,00	0,00
1.	BP Kas (Tunai & Bank)	19.605.810,00	1.250.838.685,00	1.270.444.495,00	0,00
2.	BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	19.605.810,00	876.176.046,00	895.781.856,00	0,00
1.	BP UP*)	19.605.810,00	53.242.990,00	72.848.800,00	0,00
2.	BP TUP*)	0,00	792.244.000,00	792.244.000,00	0,00
3.	BP LS-Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	BP Pajak	0,00	30.689.056,00	30.689.056,00	0,00
5.	BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	0,00
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	0,00 (terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	0,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp.	0,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	0,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	0,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	0,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan (apabila ada)

1. Selisih Kas (III.3)	: 0,00-
2. Selisih Pembukuan UP (IV.A.5)	: 0,00-
3. Selisih Pembukuan TUP (IV.B.5)	: 0,00-
4. Selisih Pembukuan Lainnya (IV.C.3)	: 0,00-

Mengetahui

dan Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



JULI PRUHANTO.SH
NIP 198107092000031001

KOTA BENGKULU, Desember 2025

Bendahara Pengeluaran

RETNO PRAPITRI RAFITRA
NIP 199104152019011001

Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran

Pada hari ini, Rabu tanggal 31 bulan Desember tahun 2025, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 654926920241000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 0,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 00031/DRPP/692024/2025

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A. Saldo Kas Bendahara

1 Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	0,00
2 Saldo BP UM (Voucher)	Rp.	0,00
3 Saldo BP BPP	Rp.	0,00
4 Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	0,00

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :

1 Saldo BP UP	Rp.	0,00
2 Saldo BP TUP	Rp.	0,00
3 Saldo LS-Bendahara	Rp.	0,00
4 Saldo Pajak	Rp.	0,00
5 Saldo Hibah	Rp.	0,00
6 Saldo BP Lain-lain	Rp.	0,00
7 Jumlah (B1+B2+B3+B4+B5+B6)	Rp.	0,00

C. Selisih pembukuan (A4-B6)

Rp. 0,00

II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fisik)

A. Kas yang dikuasai bendahara

1 Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0,00
2 Uang di Rekening Bendahara	Rp.	0,00
3 Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	0,00

B. Selisih Kas (I.A.1-II.A.3)

Rp. 0,00

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara

1 a. Saldo UP	Rp.	0,00
b. Kuitansi UP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0,00
c. Jumlah Saldo dan Kuitansi UP	Rp.	0,00
2 a. Saldo TUP	Rp.	0,00
b. Kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0,00
c. Jumlah Saldo dan Kuitansi TUP	Rp.	0,00
3 Saldo Lainnya	Rp.	0,00
4 Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	0,00

B. Pembukuan menurut UAKPA

1 Kas UP di Bendahara	Rp.	0,00
2 Kas TUP di Bendahara	Rp.	0,00
3 Kas Lainnya di Bendahara	Rp.	0,00
4 Jumlah (B1+B2+B3)	Rp.	0,00

C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (III.A.4-II.B.4)

Rp. 0,00

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

0,00-

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

0,00-

C. Selisih Pembukuan TUP (III.C)

0,00-

D. Selisih Pembukuan Lainnya (III.C)

0,00-

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran



RETNO PRAPITRI RAFITRA
NIP 199104152019011001

KANTOR WILAYAH
Mengetahui
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



JULI PRIHANTO.SH
NIP 198107092000031001

Dicetak pada tanggal 30 Desember 2025



KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BENGKULU

Jalan Pangeran Natadirja Km. 7 Bengkulu 38225
Telepon: (0736) 24743-22234, Faksimile (0736) 26304

Laman: <https://bengkulu.kemenkum.go.id>, Pos-el: kanwilbengkulu@kemenkum.go.id

BERITA ACARA KEADAAN KAS
BENDAHARA PENGELUARAN /BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh tiga bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima telah dilakukan pemeriksaan keadaan kas di brankas bendahara pengeluaran/BPP dengan hasil sebagai berikut :

I.	Saldo Kas Tunai sesuai pembukuan Bendahara	Rp 192.738.389,-
II.	Keadaan Kas di Brankas Bendahara	Rp 192.738.389,-
	Selisih	Rp 0,-

Sesuai keterangan Bendahara, keadaan kas sebagaimana angka II terdiri atas :

1.	Uang Persediaan (TUP) Tunai	Rp 192.738.389,-
2.	Uang LS Bendahara	Rp 0,-
3.	Uang Pajak	Rp 0,-
4.	Uang Lain-lain	Rp 0,- +

Total Rp 192.738.389,-

III. Uang Lain-lain sebagaimana angka II.4 terdiri atas :-

IV. Penjelasan Jumlah Uang Persediaan (TUP) dalam brankas lebih dari Rp 50.000.000,- dikarenakan penarikan dana (TUP) dari Bank.

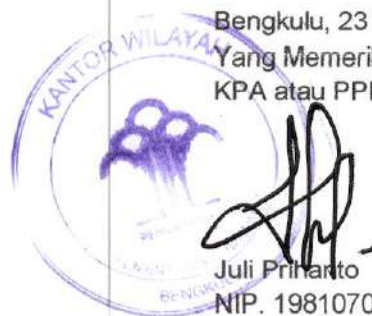
Dengan dibuatnya Berita Acara ini, KPA atau PPK atas nama KPA bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan atau kerugian yang terjadi atas keadaan Kas Bendahara Pengeluaran/BPP dimaksud.

Yang Diperiksa,
Bendahara Pengeluaran/BPP

Retno Prapitri Rafitra
NIP. 199104152019011001

Bengkulu, 23 Desember 2025

Yang Memeriksa,
KPA atau PPK atas nama KPA



Juli Prihanto
NIP. 198107092000031001

SUPLEMEN LPJ BENDAHARA

Periode : 2025-12

Kode Satker : 692024

Kode KPPN : 016

Nama Satker : KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM
BENGKULU

Nama KPPN : KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA
BENGKULU

A. Kepatuhan Bendahara

No.	Uraian	Usia Transaksi	Nilai / Jumlah
1	Dana Pajak Belum disetor	> 30 Hari	Rp.0.00
2	Dana LS Belum Dibayarkan	> 60 Hari	Rp.0.00
3	Kas Tunai Lebih 50 Juta	> 1 Hari Kerja	Tanggal 23 senilai Rp 192,738,389
4	Data rekening belum divalidasi	-	0

B. Monitoring KAS

No.	Uraian	Nilai
1	Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.0.00
	a. BP Kas Tunai UP	Rp.0.00
	b. BP Kas Bank UP	Rp.0.00
	c. BP UM (voucher) UP	Rp.0.00
	d. BP BPP UP	Rp.0.00
	e. Kwitansi UP	Rp.0.00
2	Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.0.00
	a. BP Kas Tunai TUP	Rp.0.00
	b. BP Kas Bank TUP	Rp.0.00
	c. BP UM (voucher) TUP	Rp.0.00
	d. BP BPP TUP	Rp.0.00
	e. Kwitansi TUP	Rp.0.00
3	Kas UP + Kas TUP	Rp.0.00
4	Kas Lainnya	Rp.0.00
	a. Saldo Lainnya Tunai	Rp.0.00
	b. Saldo Lainnya Bank	Rp.0.00
	c. Saldo Lainnya UM	Rp.0.00
	d. Saldo Lainnya di BPP	Rp.0.00
5	Total Kas Bendahara (UP+TUP+Lainnya)	Rp.0.00

Catatan:

- 1 Suplemen LPJ Bendahara disusun secara otomatis oleh sistem SAKTI.**
- 2 Suplemen LPJ Bendahara dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan KPA/PPK sebelum Approve LPJ.**
- 3 Suplemen LPJ Bendahara dapat digunakan sebagai bahan pembinaan KPPN kepada satker mitra kerjanya.**

Dicetak pada tanggal 30 Desember 2025

***DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING YANG DIKELOLA BENDAHARA PENGELUARAN**

SATKER 692024

BULAN : DESEMBER 2025

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	65492692024100 0	BPG 016 KANWIL KEMENKUM BENGKULU	PT. BANK BRI	20	S- 190/KPN.1205/202 5	30-01-2025	2025-12-30	0.00

BENDAHARA PENGELUARAN

RETNO PRAPITRI RAFITRA

NIP 199104152019011001

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

BULAN : DESEMBER 2025

Kementerian / Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
 Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
 Propinsi / Kabupaten / Kota : (26.51) BENGKULU / KOTA BENGKULU
 Satuan Kerja : (692024) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU69202400-
 No Rekening : 654926920241000
 Nama Rekening : BPG 016 KANWIL KEMENKUM BENGKULU
 Nama Bank : PT. BANK BRI
 Jenis Rekening : (20) REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan November 2025			19.317.810,00
01-12-2025	00500/KW/692024/2025	Pembayaran Belanja Keperluan Perkantoran Berupa Jamuan Tamu Pimpinan	0,00	3.008.500,00	16.309.310,00
01-12-2025	00498/KW/692024/2025	Pembayaran Belanja Keperluan Perkantoran Berupa Jamuan Tamu Pimpinan	0,00	1.950.000,00	14.359.310,00
01-12-2025	00499/KW/692024/2025	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (BBM Kendaraan Sewa Pajero B 2667 BJJ)	0,00	1.500.000,00	12.859.310,00
02-12-2025	00501/KW/692024/2025	Pembayaran Belanja Keperluan Perkantoran Berupa Jamuan Tamu Pimpinan	0,00	7.692.400,00	5.166.910,00
02-12-2025	00502/KW/692024/2025	Pembayaran Belanja Keperluan Perkantoran Berupa Jamuan Tamu Pimpinan	0,00	3.897.900,00	1.269.010,00
02-12-2025	00504/KW/692024/2025	Pembayaran Pemeliharaan Peralatan dan Mesin BBM Kendaraan Dinas BD 18	0,00	550.000,00	719.010,00
02-12-2025	00503/KW/692024/2025	Pembayaran Pemeliharaan Peralatan dan Mesin BBM Kendaraan Sewa B1454 HKG	0,00	250.000,00	469.010,00
04-12-2025	FPK-PENG-xN7uGy175Yq6xAo	GUP	53.242.990,00	0,00	53.712.000,00
04-12-2025	00506/KW/692024/2025	Pembayaran Belanja Keperluan Perkantoran Berupa Jamuan Tamu Pimpinan	0,00	5.519.800,00	48.192.200,00

1	2	3	4	5	6
04-12-2025	00505/KW/692024/2025	Pembayaran Belanja Keperluan Perkantoran Berupa Keperluan Pokok	0,00	826.000,00	47.366.200,00
05-12-2025	FPK-PENG-PPhXV1yY0sXEKq1	TUP	792.244.000,00	0,00	839.610.200,00
05-12-2025	00076/BP/692024/2025	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Bulan November 2025 a.n Juli Prihanto dkk	571.500,00	0,00	840.181.700,00
05-12-2025	00077/BP/692024/2025	Pembayaran Honorarium Operasional Satuan Kerja Pengelola SAI Bulan November 2025 a.n Viona dkk	37.500,00	0,00	840.219.200,00
05-12-2025	00517/KW/692024/2025	Pembayaran Perjalanan Dinas Koordinasi Konsultasi Terkait Pengelolaan BMN Pada Kantor Wilayah DJKN Lampung Tanggal 28 s.d 30 Oktober Sesuai SP W.8.UM.03.07-739	0,00	8.375.050,00	831.844.150,00
05-12-2025	00515/KW/692024/2025	Pembayaran Perjalanan Dinas Koordinasi Konsultasi Terkait Pengelolaan BMN Pada Kantor Wilayah DJKN Lampung Tanggal 28 s.d 30 Oktober Sesuai SP W.8.UM.03.07-739	0,00	8.375.050,00	823.469.100,00
05-12-2025	00514/KW/692024/2025	Pembayaran Belanja Keperluan Perkantoran Berupa Jamuan Tamu Pimpinan	0,00	7.510.000,00	815.959.100,00
05-12-2025	00520/KW/692024/2025	Pembayaran Perjalanan Dinas Koordinasi dan Konsultasi Terkait Pengelolaan BMN Pada Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu dan Koordinasi ke Kanwil Kementerian Hukum Lampung Tgl 28 s.d 30 Okt 2025 Sesuai SP W.8.UM.03.07-739	0,00	7.394.730,00	808.564.370,00
05-12-2025	00521/KW/692024/2025	Pembayaran Perjalanan Dinas Koordinasi dan Konsultasi Terkait Pengelolaan BMN Pada Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu dan Koordinasi ke Kanwil Kementerian Hukum Lampung Tgl 28 s.d 30 Okt 2025 Sesuai SP - W.8.UM.03.07-739	0,00	7.365.550,00	801.198.820,00
05-12-2025	00516/KW/692024/2025	Pembayaran Perjalanan Dinas Koordinasi Konsultasi Terkait Pengelolaan BMN Pada Kantor Wilayah DJKN Lampung Tanggal 28 s.d 30 Oktober Sesuai SP W.8.UM.03.07-739	0,00	6.950.050,00	794.248.770,00
05-12-2025	00513/KW/692024/2025	Pembayaran Perjalanan Dinas Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum di Jakarta Tanggal 2 s.d 5 November 2025 Berdasarkan SP W.8.UM.03.07-725 Tanggal 13 Oktober 2025	0,00	6.791.100,00	787.457.670,00

1	2	3	4	5	6
05-12-2025	00519/KW/692024/2025	Pembayaran Perjalanan Dinas Koordinasi dan Konsultasi Terkait Pengelolaan BMN Pada Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu dan Koordinasi ke Kanwil Kementerian Hukum Lampung Tgl 28 s.d 30 Okt 2025 Sesuai SP W.8.UM.03.07-739	0,00	6.675.550,00	780.782.120,00
05-12-2025	00511/KW/692024/2025	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Bulan November 2025 a.n Juli Prohanto dkk	0,00	6.330.000,00	774.452.120,00
05-12-2025	00527/KW/692024/2025	Pembayaran Perjalanan Dinas Koordinasi dan Konsultasi ke Biro BMN serta Biro Hukum dan Kerjasama Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum di Jakarta Tanggal 8 s.d 10 Oktober 2025 Sesuai SP W.8.UM.03.07-633	0,00	6.328.500,00	768.123.620,00
05-12-2025	00538/KW/692024/2025	Pembayaran Perjalanan Dinas Konsultasi dan Koordinasi ke Biro Keuangan dan Biro BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Sesuai SP W.8.UM.03.07-703	0,00	6.299.600,00	761.824.020,00
05-12-2025	00541/KW/692024/2025	Pembayaran Perjalanan Dinas Konsultasi dan Koordinasi ke Biro Keuangan dan Biro BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Sesuai SP W.8.UM.03.07-703	0,00	5.590.500,00	756.233.520,00
05-12-2025	00522/KW/692024/2025	Pembayaran Perjalanan Dinas Koordinasi dan Konsultasi Terkait Pengelolaan BMN Pada Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu dan Koordinasi ke Kanwil Kementerian Hukum Lampung Tgl 28 s.d 30 Okt 2025 Sesuai SP W.8.UM.03.07-739	0,00	5.365.550,00	750.867.970,00
05-12-2025	00539/KW/692024/2025	Pembayaran Perjalanan Dinas Konsultasi dan Koordinasi ke Biro Keuangan dan Biro BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Sesuai SP W.8.UM.03.07-703	0,00	5.325.700,00	745.542.270,00
05-12-2025	00523/KW/692024/2025	Pembayaran Perjalanan Dinas Koordinasi dan Konsultasi Terkait Pengelolaan BMN Pada Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu dan Koordinasi ke Kanwil Kementerian Hukum Lampung Tgl 28 s.d 30 Okt 2025 Sesuai SP W.8.UM.03.07-739	0,00	5.080.050,00	740.462.220,00
05-12-2025	00524/KW/692024/2025	Pembayaran Perjalanan Dinas Koordinasi dan Konsultasi Terkait Pengelolaan BMN Pada Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu dan Koordinasi ke Kanwil Kementerian Hukum Lampung Tgl 28 s.d 30 Okt 2025 Sesuai SP W.	0,00	5.080.050,00	735.382.170,00

1	2	3	4	5	6
		8.UM.03.07-739			
05-12-2025	00518/KW/692024/2025	Pembayaran Perjalanan Dinas Koordinasi dan Konsultasi Terkait Pengelolaan BMN Pada Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu dan Koordinasi ke Kanwil Kementerian Hukum Lampung Tgl 28 s.d 30 Okt 2025 Sesuai SP W.8.UM.03.07-739	0,00	4.805.550,00	730.576.620,00
05-12-2025	00526/KW/692024/2025	Pembayaran Perjalanan Dinas Koordinasi dan Konsultasi ke Biro BMN serta Biro Hukum dan Kerjasama Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum di Jakarta Tanggal 8 s.d 10 Oktober 2025 Sesuai SP W.8.UM.03.07-633	0,00	4.788.281,00	725.808.339,00
05-12-2025	00540/KW/692024/2025	Pembayaran Perjalanan Dinas Konsultasi dan Koordinasi ke Biro Keuangan dan Biro BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Sesuai SP W.8.UM.03.07-703	0,00	4.123.700,00	721.684.639,00
05-12-2025	00525/KW/692024/2025	Pembayaran Perjalanan Dinas Koordinasi dan Konsultasi Terkait Pengelolaan BMN Pada Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu dan Koordinasi ke Kanwil Kementerian Hukum Lampung Tgl 28 s.d 30 Okt 2025 Sesuai SP W.8.UM.03.07-739	0,00	2.360.000,00	719.324.639,00
05-12-2025	00534/KW/692024/2025	Pembayaran Perjalanan Dinas Kegiatan Monitoring Pengamanan Aset Barang Milik Negara Berupa Tanah di Kabupaten Kaur Sesuai SP W.8.UM.03.07-719	0,00	1.640.000,00	717.684.639,00
05-12-2025	00535/KW/692024/2025	Pembayaran Perjalanan Dinas Kegiatan Monitoring Pengamanan Aset Barang Milik Negara Berupa Tanah di Kabupaten Kaur Sesuai SP W.8.UM.03.07-719	0,00	1.640.000,00	716.044.639,00
05-12-2025	00536/KW/692024/2025	Pembayaran Perjalanan Dinas Kegiatan Monitoring Pengamanan Aset Barang Milik Negara Berupa Tanah di Kabupaten Kaur Sesuai SP W.8.UM.03.07-719	0,00	1.640.000,00	714.404.639,00
05-12-2025	00528/KW/692024/2025	Pembayaran Perjalanan Dinas Kegiatan Monitoring Pengamanan Aset Barang Milik Negara Berupa Tanah di Kabupaten Kaur Sesuai SP W.8.UM.03.07-719	0,00	1.640.000,00	712.764.639,00
05-12-2025	00537/KW/692024/2025	Pembayaran Perjalanan Dinas Kegiatan Monitoring Pengamanan Aset Barang Milik Negara Berupa Tanah di Kabupaten Kaur	0,00	1.640.000,00	711.124.639,00

1	2	3	4	5	6
		Sesuai SP W.8.UM.03.07-719			
05-12-2025	00532/KW/692024/2025	PEmbayaran Perjalanan Dinas Kegiatan Monitoring Pengamanan Aset Barang Milik Negara Berupa Tanah di Kabupaten Kaur Sesuai SP W.8.UM.03.07-719	0,00	1.640.000,00	709.484.639,00
05-12-2025	00530/KW/692024/2025	PEmbayaran Perjalanan Dinas Kegiatan Monitoring Pengamanan Aset Barang Milik Negara Berupa Tanah di Kabupaten Kaur Sesuai SP W.8.UM.03.07-719	0,00	1.640.000,00	707.844.639,00
05-12-2025	00529/KW/692024/2025	PEmbayaran Perjalanan Dinas Kegiatan Monitoring Pengamanan Aset Barang Milik Negara Berupa Tanah di Kabupaten Kaur Sesuai SP W.8.UM.03.07-719	0,00	1.640.000,00	706.204.639,00
05-12-2025	00533/KW/692024/2025	PEmbayaran Perjalanan Dinas Kegiatan Monitoring Pengamanan Aset Barang Milik Negara Berupa Tanah di Kabupaten Kaur Sesuai SP W.8.UM.03.07-719	0,00	1.640.000,00	704.564.639,00
05-12-2025	00531/KW/692024/2025	PEmbayaran Perjalanan Dinas Kegiatan Monitoring Pengamanan Aset Barang Milik Negara Berupa Tanah di Kabupaten Kaur Sesuai SP W.8.UM.03.07-719	0,00	1.640.000,00	702.924.639,00
05-12-2025	00510/KW/692024/2025	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin KEndaraan Sewa Kadiv P3H B 1931 HKH November 2025	0,00	1.300.000,00	701.624.639,00
05-12-2025	00512/KW/692024/2025	Pembayaran Honorarium Operasional Satuan Kerja Pengelola SAI Bulan November 2025 a.n Viona dkk	0,00	750.000,00	700.874.639,00
05-12-2025	00073/SSP/692024/2025	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Bulan November 2025 a.n Juli Prihanto dkk	0,00	571.500,00	700.303.139,00
05-12-2025	00507/KW/692024/2025	Pembayaran Pemeliharaan Peralatan dan Mesin BBM Kendaraan Sewa B 1454 HKG	0,00	200.000,00	700.103.139,00
05-12-2025	00508/KW/692024/2025	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin KEndaraan Roda 2 BD 6879 AY	0,00	85.000,00	700.018.139,00
05-12-2025	00074/SSP/692024/2025	Pembayaran Honorarium Operasional Satuan Kerja Pengelola SAI Bulan November 2025 a.n Viona dkk	0,00	37.500,00	699.980.639,00
05-12-2025	00509/KW/692024/2025	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin KEndaraan Roda 2 BD 6879 AY	0,00	30.000,00	699.950.639,00
08-12-2025	00079/BP/692024/2025	Pembayaran Belanja Bahan Spanduk Panti	63.000,00	0,00	700.013.639,00

1	2	3	4	5	6
		Asuhan, UPPG, Dharmawanita, Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan, Pemusnahan Arsip,dan Pelantikan)			
08-12-2025	00078/BP/692024/2025	Pembayaran Honorarium Operasional Satuan Kerja Staff PPK Bulan November a.n Desi Eriani dkk	49.000,00	0,00	700.062.639,00
08-12-2025	00547/KW/692024/2025	Pembayaran Belanja Keperluan Pokok Perkantoran Berupa Pembayaran Upah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Bulan Oktober-November 2025	0,00	5.698.000,00	694.364.639,00
08-12-2025	00546/KW/692024/2025	Pembayaran Belanja Keperluan Pokok Perkantoran Berupa Pembayaran Upah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Bulan Oktober-November 2025	0,00	5.698.000,00	688.666.639,00
08-12-2025	00548/KW/692024/2025	Pembayaran Belanja Keperluan Pokok Perkantoran Berupa Pembayaran Upah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Bulan Oktober-November 2025	0,00	5.698.000,00	682.968.639,00
08-12-2025	00549/KW/692024/2025	Pembayaran Belanja Keperluan Pokok Perkantoran Berupa Pembayaran Upah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Bulan Oktober-November 2025	0,00	5.698.000,00	677.270.639,00
08-12-2025	00550/KW/692024/2025	Pembayaran Belanja Keperluan Pokok Perkantoran Berupa Pembayaran Upah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Bulan Oktober-November 2025	0,00	5.698.000,00	671.572.639,00
08-12-2025	00545/KW/692024/2025	Pembayaran Belanja Keperluan Pokok Perkantoran Berupa Pembayaran Upah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Bulan Oktober-November 2025	0,00	5.698.000,00	665.874.639,00
08-12-2025	00551/KW/692024/2025	Pembayaran Belanja Keperluan Pokok Perkantoran Berupa Pembayaran Upah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Bulan Oktober-November 2025	0,00	5.302.000,00	660.572.639,00
08-12-2025	00556/KW/692024/2025	Pembayaran Belanja Keperluan Pokok Perkantoran Berupa Pembayaran Upah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Bulan Oktober-November 2025	0,00	5.302.000,00	655.270.639,00
08-12-2025	00553/KW/692024/2025	Pembayaran Belanja Keperluan Pokok Perkantoran Berupa Pembayaran Upah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja	0,00	5.302.000,00	649.968.639,00

1	2	3	4	5	6
		Paruh Waktu Bulan Oktober-November 2025			
08-12-2025	00555/KW/692024/2025	Pembayaran Belanja Keperluan Pokok Perkantoran Berupa Pembayaran Upah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Bulan Oktober-November 2025	0,00	5.302.000,00	644.666.639,00
08-12-2025	00552/KW/692024/2025	Pembayaran Belanja Keperluan Pokok Perkantoran Berupa Pembayaran Upah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Bulan Oktober-November 2025	0,00	5.302.000,00	639.364.639,00
08-12-2025	00554/KW/692024/2025	Pembayaran Belanja Keperluan Pokok Perkantoran Berupa Pembayaran Upah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Bulan Oktober-November 2025	0,00	5.302.000,00	634.062.639,00
08-12-2025	00544/KW/692024/2025	Pembayaran Belanja Bahan Spanduk Panti Asuhan, UPPG, Dharmawanita, Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan, Pemusnahan Arsip,dan Pelantikan)	0,00	3.150.000,00	630.912.639,00
08-12-2025	00557/KW/692024/2025	Pembayaran Pemeliharaan Peralatan dan Mesin BBM Kendaraan Sewa Kadiviyankum B 2403 BFJ	0,00	1.600.000,00	629.312.639,00
08-12-2025	00543/KW/692024/2025	Pembayaran Honorarium Operasional Satuan Kerja Staff PPK Bulan November a.n Desi Eriani dkk	0,00	980.000,00	628.332.639,00
08-12-2025	00542/KW/692024/2025	Pembayaran BBM Kegiatan Monitoring Pengamanan Aset BMN Berupa Tanah di Kab. Kaur Tgl 21 s.d 23 Oktober 2025 Sesuai SP W.8.UM.03.07-719	0,00	500.000,00	627.832.639,00
08-12-2025	00558/KW/692024/2025	Pembayaran Pemeliharaan Peralatan dan Mesin BBM Kendaraan Sewa B 1454 HKG	0,00	320.000,00	627.512.639,00
08-12-2025	00076/SSP/692024/2025	Pembayaran Belanja Bahan Spanduk Panti Asuhan, UPPG, Dharmawanita, Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan, Pemusnahan Arsip,dan Pelantikan)	0,00	63.000,00	627.449.639,00
08-12-2025	00075/SSP/692024/2025	Pembayaran Honorarium Operasional Satuan Kerja Staff PPK Bulan November a.n Desi Eriani dkk	0,00	49.000,00	627.400.639,00
09-12-2025	00564/KW/692024/2025	Pembayaran Belanja Keperluan Pokok Perkantoran Berupa Jamuan Tamu Pimpinan	0,00	5.349.600,00	622.051.039,00
09-12-2025	00562/KW/692024/2025	Pembayaran Belanja Operasional Perkantoran Berupa Langganan Air Bulan Novmber 2025	0,00	3.205.800,00	618.845.239,00

1	2	3	4	5	6
09-12-2025	00559/KW/692024/2025	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (BBM Kendaraan Sewa B 2667 BJJ)	0,00	1.900.000,00	616.945.239,00
09-12-2025	00560/KW/692024/2025	Pembayaran Belanja Keperluan Perkantoran Berupa Jamuan Tamu Pimpinan	0,00	1.803.200,00	615.142.039,00
09-12-2025	00563/KW/692024/2025	Pembayaran Pembelian BBM Operasional Kendaraan Dinas BD 18	0,00	900.000,00	614.242.039,00
09-12-2025	00561/KW/692024/2025	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Berupa Perbaikan AC	0,00	680.000,00	613.562.039,00
11-12-2025	00084/BP/692024/2025	Pembayaran Honorarium Pejabat Pengadaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bulan November dan Desember	27.200,00	0,00	613.589.239,00
11-12-2025	00567/KW/692024/2025	Pembayaran Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Bbm Kendaraan Sewa B 1660 HKG November	0,00	1.894.400,00	611.694.839,00
11-12-2025	00566/KW/692024/2025	Pembayaran Belanja Keperluan Perkantoran Berupa Jamuan Tamu Pimpinan	0,00	1.153.800,00	610.541.039,00
11-12-2025	00568/KW/692024/2025	Pembayaran Honorarium Pejabat Pengadaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bulan November dan Desember	0,00	544.000,00	609.997.039,00
11-12-2025	00565/KW/692024/2025	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (BBM BD 18)	0,00	300.000,00	609.697.039,00
11-12-2025	00080/SSP/692024/2025	Pembayaran Honorarium Pejabat Pengadaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bulan November dan Desember	0,00	27.200,00	609.669.839,00
12-12-2025	00091/BP/692024/2025	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Bangunan Gudang Tertutup Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu	264.000,00	0,00	609.933.839,00
12-12-2025	00092/BP/692024/2025	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Bangunan Gudang Tertutup Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu	48.000,00	0,00	609.981.839,00
12-12-2025	00575/KW/692024/2025	Pembayaran Belanja Perkantoran Berupa Jamuan Tamu Pimpinan	0,00	5.462.200,00	604.519.639,00
12-12-2025	00569/KW/692024/2025	Pembayaran Belanja Keperluan Perkantoran Berupa Keperluan Pokok Lainnya	0,00	2.190.000,00	602.329.639,00
12-12-2025	00570/KW/692024/2025	Pembayaran Belanja Keperluan Perkantoran Berupa Jamuan Tamu Pimpinan	0,00	1.600.000,00	600.729.639,00
12-12-2025	00573/KW/692024/2025	Pembayaran Belanja Keperluan Perkantoran Berupa Jamuan Tamu Pimpinan	0,00	600.000,00	600.129.639,00

1	2	3	4	5	6
12-12-2025	00571/KW/692024/2025	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Perbaikan Kendaraan Roda 2 BD 4069 AY	0,00	152.500,00	599.977.139,00
15-12-2025	00081/BP/692024/2025	Pembayaran Pengadaan Langganan Google Drive pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu TA 2025	451.000,00	0,00	600.428.139,00
15-12-2025	00083/BP/692024/2025	Pembayaran Pengadaan Langganan Google Drive pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu TA 2025	20.500,00	0,00	600.448.639,00
15-12-2025	00574/KW/692024/2025	Pembayaran Pengadaan Langganan Google Drive pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu TA 2025	0,00	4.551.000,00	595.897.639,00
15-12-2025	00078/SSP/692024/2025	Pembayaran Pengadaan Langganan Google Drive pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu TA 2025	0,00	451.000,00	595.446.639,00
15-12-2025	00079/SSP/692024/2025	Pembayaran Pengadaan Langganan Google Drive pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu TA 2025	0,00	20.500,00	595.426.139,00
16-12-2025	00085/BP/692024/2025	Belanja Uang Lembur Pegawai Sesuai SP :W8.UM.01.01-856 tanggal 1 Desember 2025, W8.UM.01.01-857 tanggal 10 Desember 2025, W8.UM.01.01-858 tanggal 1 Desember 2025, W8.UM.01.01-859 tanggal 10 Desember 2025 a.n Rahmat Huda dkk	1.105.500,00	0,00	596.531.639,00
16-12-2025	00576/KW/692024/2025	Belanja Uang Lembur Pegawai Sesuai SP :W8.UM.01.01-856 tanggal 1 Desember 2025, W8.UM.01.01-857 tanggal 10 Desember 2025, W8.UM.01.01-858 tanggal 1 Desember 2025, W8.UM.01.01-859 tanggal 10 Desember 2025 a.n Rahmat Huda dkk	0,00	16.642.000,00	579.889.639,00
16-12-2025	00081/SSP/692024/2025	Belanja Uang Lembur Pegawai Sesuai SP :W8.UM.01.01-856 tanggal 1 Desember 2025, W8.UM.01.01-857 tanggal 10 Desember 2025, W8.UM.01.01-858 tanggal 1 Desember 2025, W8.UM.01.01-859 tanggal 10 Desember 2025 a.n Rahmat Huda dkk	0,00	1.105.500,00	578.784.139,00
17-12-2025	00086/BP/692024/2025	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Bulan Desember 2025 Kanwil HUKUM Bengkulu a.n Juli Prihanto dkk	571.500,00	0,00	579.355.639,00
17-12-2025	00577/KW/692024/2025	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Bulan Desember 2025 Kanwil HUKUM Bengkulu a.n Juli Prihanto dkk	0,00	6.330.000,00	573.025.639,00

1	2	3	4	5	6
17-12-2025	00584/KW/692024/2025	Pembayaran Belanja Keperluan Pokok Perkantoran Berupa Pembayaran Upah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Bulan Desember 2025	0,00	2.849.000,00	570.176.639,00
17-12-2025	00581/KW/692024/2025	Pembayaran Belanja Keperluan Pokok Perkantoran Berupa Pembayaran Upah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Bulan Desember 2025	0,00	2.849.000,00	567.327.639,00
17-12-2025	00583/KW/692024/2025	Pembayaran Belanja Keperluan Pokok Perkantoran Berupa Pembayaran Upah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Bulan Desember 2025	0,00	2.849.000,00	564.478.639,00
17-12-2025	00582/KW/692024/2025	Pembayaran Belanja Keperluan Pokok Perkantoran Berupa Pembayaran Upah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Bulan Desember 2025	0,00	2.849.000,00	561.629.639,00
17-12-2025	00580/KW/692024/2025	Pembayaran Belanja Keperluan Pokok Perkantoran Berupa Pembayaran Upah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Bulan Desember 2025	0,00	2.849.000,00	558.780.639,00
17-12-2025	00585/KW/692024/2025	Pembayaran Belanja Keperluan Pokok Perkantoran Berupa Pembayaran Upah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Bulan Desember 2025	0,00	2.849.000,00	555.931.639,00
17-12-2025	00591/KW/692024/2025	Pembayaran Belanja Keperluan Pokok Perkantoran Berupa Pembayaran Upah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Bulan Desember 2025	0,00	2.651.000,00	553.280.639,00
17-12-2025	00588/KW/692024/2025	Pembayaran Belanja Keperluan Pokok Perkantoran Berupa Pembayaran Upah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Bulan Desember 2025	0,00	2.651.000,00	550.629.639,00
17-12-2025	00586/KW/692024/2025	Pembayaran Belanja Keperluan Pokok Perkantoran Berupa Pembayaran Upah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Bulan Desember 2025	0,00	2.651.000,00	547.978.639,00
17-12-2025	00590/KW/692024/2025	Pembayaran Belanja Keperluan Pokok Perkantoran Berupa Pembayaran Upah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Bulan Desember 2025	0,00	2.651.000,00	545.327.639,00
17-12-2025	00587/KW/692024/2025	Pembayaran Belanja Keperluan Pokok	0,00	2.651.000,00	542.676.639,00

1	2	3	4	5	6
		Perkantoran Berupa Pembayaran Upah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Bulan Desember 2025			
17-12-2025	00589/KW/692024/2025	Pembayaran Belanja Keperluan Pokok Perkantoran Berupa Pembayaran Upah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Bulan Desember 2025	0,00	2.651.000,00	540.025.639,00
17-12-2025	00578/KW/692024/2025	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (BBM Kendaraan Sewa Kakanwil B 2667 BJF)	0,00	1.200.000,00	538.825.639,00
17-12-2025	00594/KW/692024/2025	Pembayaran Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kendaraan Operasional BD 18(Pemasangan Karpet Dasar	0,00	1.000.000,00	537.825.639,00
17-12-2025	00579/KW/692024/2025	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin BBM Kendaraan Dinas BD 18	0,00	800.000,00	537.025.639,00
17-12-2025	00082/SSP/692024/2025	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Bulan Desember 2025 Kanwil HUKUM Bengkulu a.n Juli Prihanto dkk	0,00	571.500,00	536.454.139,00
17-12-2025	00593/KW/692024/2025	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin BBM Kendaraan Dinas BD 18	0,00	400.000,00	536.054.139,00
17-12-2025	00592/KW/692024/2025	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin BBM Motor BD 4069 CY	0,00	216.000,00	535.838.139,00
18-12-2025	00095/BP/692024/2025	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (PC, Laptop, Printer dll)	2.688.559,00	0,00	538.526.698,00
18-12-2025	00089/BP/692024/2025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bertingkat (Fasilitas) Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu	2.486.000,00	0,00	541.012.698,00
18-12-2025	00093/BP/692024/2025	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi Berupa Bahan Komputer	1.298.198,00	0,00	542.310.896,00
18-12-2025	00090/BP/692024/2025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bertingkat (Fasilitas) Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu	452.000,00	0,00	542.762.896,00
18-12-2025	00096/BP/692024/2025	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (PC, Laptop, Printer dll)	366.622,00	0,00	543.129.518,00
18-12-2025	00094/BP/692024/2025	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi Berupa Bahan Komputer	177.027,00	0,00	543.306.545,00
18-12-2025	00088/BP/692024/2025	Pembayaran Honorarium Staff Pengelola Keuangan (Staff PPK) Bulan Desember 2025 Kanwil Bengkulu a.n Desi Eriani dkk	49.000,00	0,00	543.355.545,00

1	2	3	4	5	6
18-12-2025	00087/BP/692024/2025	Pembayaran Honorarium Tim Pengelola SAI Bulan Desember 2025 Kanwil Bengkulu a.n Viona Paulasari dkk	37.500,00	0,00	543.393.045,00
18-12-2025	00600/KW/692024/2025	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (PC, Laptop, Printer dll)	0,00	27.130.000,00	516.263.045,00
18-12-2025	00597/KW/692024/2025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bertingkat (Fasilitas) Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu	0,00	22.600.000,00	493.663.045,00
18-12-2025	00599/KW/692024/2025	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi Berupa Bahan Komputer	0,00	13.100.000,00	480.563.045,00
18-12-2025	00091/SSP/692024/2025	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (PC, Laptop, Printer dll)	0,00	2.688.559,00	477.874.486,00
18-12-2025	00085/SSP/692024/2025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bertingkat (Fasilitas) Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu	0,00	2.486.000,00	475.388.486,00
18-12-2025	00598/KW/692024/2025	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Bangunan Gudang Tertutup Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu	0,00	2.400.000,00	472.988.486,00
18-12-2025	00601/KW/692024/2025	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas BD 18	0,00	1.500.000,00	471.488.486,00
18-12-2025	00089/SSP/692024/2025	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi Berupa Bahan Komputer	0,00	1.298.198,00	470.190.288,00
18-12-2025	00596/KW/692024/2025	Pembayaran Honorarium Staff Pengelola Keuangan (Staff PPK) Bulan Desember 2025 Kanwil Bengkulu a.n Desi Eriani dkk	0,00	980.000,00	469.210.288,00
18-12-2025	00595/KW/692024/2025	Pembayaran Honorarium Tim Pengelola SAI Bulan Desember 2025 Kanwil Bengkulu a.n Viona Paulasari dkk	0,00	750.000,00	468.460.288,00
18-12-2025	00086/SSP/692024/2025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bertingkat (Fasilitas) Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu	0,00	452.000,00	468.008.288,00
18-12-2025	00092/SSP/692024/2025	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (PC, Laptop, Printer dll)	0,00	366.622,00	467.641.666,00
18-12-2025	00087/SSP/692024/2025	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Bangunan Gudang Tertutup Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu	0,00	264.000,00	467.377.666,00
18-12-2025	00090/SSP/692024/2025	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi Berupa Bahan Komputer	0,00	177.027,00	467.200.639,00

1	2	3	4	5	6
18-12-2025	00084/SSP/692024/2025	Pembayaran Honorarium Staff Pengelola Keuangan (Staff PPK) Bulan Desember 2025 Kanwil Bengkulu a.n Desi Eriani dkk	0,00	49.000,00	467.151.639,00
18-12-2025	00088/SSP/692024/2025	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Bangunan Gudang Tertutup Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu	0,00	48.000,00	467.103.639,00
18-12-2025	00083/SSP/692024/2025	Pembayaran Honorarium Tim Pengelola SAI Bulan Desember 2025 Kanwil Bengkulu a.n Viona Paulasari dkk	0,00	37.500,00	467.066.139,00
19-12-2025	00097/BP/692024/2025	Pembayaran Belanja Bahan Cetak Spanduk 100% Posbankum, Spanduk Hut Provinsi Bengkulu, Korpri, dan Dharmawanita)	50.600,00	0,00	467.116.739,00
19-12-2025	00602/KW/692024/2025	Pembayaran Belanja Bahan Cetak Spanduk 100% Posbankum, Spanduk Hut Provinsi Bengkulu, Korpri, dan Dharmawanita)	0,00	2.530.000,00	464.586.739,00
19-12-2025	00603/KW/692024/2025	BBM Genzet November-Desember 2025	0,00	1.000.000,00	463.586.739,00
19-12-2025	00093/SSP/692024/2025	Pembayaran Belanja Bahan Cetak Spanduk 100% Posbankum, Spanduk Hut Provinsi Bengkulu, Korpri, dan Dharmawanita)	0,00	50.600,00	463.536.139,00
22-12-2025	00605/KW/692024/2025	Pembayaran Keperluan Perkantoran Berupa Jamuan Tamu Pimpinan	0,00	26.637.800,00	436.898.339,00
22-12-2025	00604/KW/692024/2025	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	16.431.700,00	420.466.639,00
23-12-2025	FPK-PENG-G2ZTV1708takbaB	[DARI TUNAI] PU BANK	0,00	373.992.689,00	46.473.950,00
23-12-2025	00612/KW/692024/2025	Pembayaran Belanja Keperluan Perkantoran Berupa Keperluan Pokok Lainnya (Terlampir)	0,00	9.588.900,00	36.885.050,00
23-12-2025	00613/KW/692024/2025	Pembayaran Belanja Keperluan Perkantoran Berupa Keperluan Pokok Lainnya (Terlampir)	0,00	9.205.200,00	27.679.850,00
23-12-2025	00611/KW/692024/2025	Pembayaran Belanja Keperluan Perkantoran Berupa Keperluan Pokok Lainnya (Terlampir)	0,00	6.449.800,00	21.230.050,00
23-12-2025	00610/KW/692024/2025	Pembayaran Belanja Keperluan Perkantoran Berupa Keperluan Pokok Lainnya (Terlampir)	0,00	5.966.700,00	15.263.350,00
23-12-2025	00609/KW/692024/2025	Pembayaran Belanja Keperluan Perkantoran Berupa Keperluan Pokok Lainnya (Terlampir)	0,00	4.793.000,00	10.470.350,00
23-12-2025	00608/KW/692024/2025	Pembayaran Belanja Keperluan Perkantoran Berupa Keperluan Pokok Lainnya (Terlampir)	0,00	4.700.400,00	5.769.950,00
23-12-2025	00607/KW/692024/2025	Pembayaran Belanja Keperluan Perkantoran	0,00	3.000.000,00	2.769.950,00

1	2	3	4	5	6
		Berupa Keperluan Pokok Lainnya			
23-12-2025	00606/KW/692024/2025	Belanja Keperluan Perkantoran Berupa Air Minum tanggal 20 November, 8 Desember dan 19 Desember 2025	0,00	2.100.000,00	669.950,00
23-12-2025	FPK-PENG-4hkdYoW5d3Knk9h	[DARI TUNAI] PU BANK	0,00	669.950,00	0,00
24-12-2025	FPK-PENG-zccdK5CJhcvVEnR	GUP NIHIL	0,00	0,00	0,00
30-12-2025	FPK-PENG-0gy4zIWrrYZwtaw	TUP NIHIL	0,00	0,00	0,00
Jumlah			856.301.196,00	875.619.006,00	0,00

BENDAHARA PENGELUARAN

RETNO PRAPITRI RAFITRA

NIP 199104152019011001

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

Dicetak pada tanggal, 30 Desember 2025



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pajak KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU (692024)

Cetak Tanggal 30-12-2025

Periode : 2025-12

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	016	409402	05-Des-25	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU SEKRETAR 1091031211027290	1CF8D80V6H1N800V 251205049846	411618	IDR	571,500	ADA
2	016	409402	05-Des-25	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU SEKRETAR 1091031211027290	EC47D2ME9MAH89O R 251205049847	411618	IDR	37,500	ADA
3	016	409402	08-Des-25	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU SEKRETAR 1091031211027290	85E702ME9QF64CPH 251208042298	411618	IDR	63,000	ADA
4	016	409402	08-Des-25	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU SEKRETAR 1091031211027290	DC874015ODSBM39G 251208042302	411618	IDR	49,000	ADA
5	016	409402	11-Des-25	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU SEKRETAR 1091031211027290	418122ME873OO48V 251211007240	411618	IDR	27,200	ADA
6	016	409402	15-Des-25	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU SEKRETAR 1091031211027290	5A0B11Q0OPKNKNQ 2 251215011778	411618	IDR	20,500	ADA
7	016	409402	15-Des-25	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU SEKRETAR 1091031211027290	49D082ME7FTJ3P05 251215011782	411618	IDR	451,000	ADA
8	016	409402	16-Des-25	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU SEKRETAR 1091031211027290	BFC2A2ME7S5RB80H 251216021851	411618	IDR	1,105,500	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
9	016	409402	17-Des-25	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU SEKRETAR 1091031211027290	4F1490TJAATI7VMJ 251217026875	411618	IDR	571,500	ADA
10	016	409402	18-Des-25	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU SEKRETAR 1091031211027290	FDC972ME7J4K17VT 251218064473	411618	IDR	2,688,559	ADA
11	016	409402	18-Des-25	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU SEKRETAR 1091031211027290	DEEA40TJ944ES4GH 251218064474	411618	IDR	264,000	ADA
12	016	409402	18-Des-25	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU SEKRETAR 1091031211027290	844732ME7UOGAHP 251218064475	411618	IDR	2,486,000	ADA
13	016	409402	18-Des-25	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU SEKRETAR 1091031211027290	D769568498FILBHP 251218064476	411618	IDR	1,298,198	ADA
14	016	409402	18-Des-25	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU SEKRETAR 1091031211027290	033B71Q0NOP0V8DA 251218064477	411618	IDR	452,000	ADA
15	016	409402	18-Des-25	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU SEKRETAR 1091031211027290	84FFC74HOSBJ93SU 251218064478	411618	IDR	48,000	ADA
16	016	409402	18-Des-25	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU SEKRETAR 1091031211027290	06E4774HMK85J9LK 251218064479	411618	IDR	366,622	ADA
17	016	409402	18-Des-25	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU SEKRETAR 1091031211027290	A5D945BMOH2U3PU 4 251218064480	411618	IDR	177,027	ADA
18	016	409402	18-Des-25	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU SEKRETAR 1091031211027290	F33F05BMO64UO6G0 251218064481	411618	IDR	37,500	ADA
19	016	409402	18-Des-25	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU SEKRETAR 1091031211027290	9FFF780V8EIUBGG1 251218064482	411618	IDR	49,000	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
20	016	409402	19-Des-25	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU SEKRETAR 1091031211027290	B9F742ME9KNQAJVP 251219015998	411618	IDR	50,600	ADA
21	016	409402	29-Des-25	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU SEKRETAR 1091031211027290	324E8015OMR8A17S 251229066800	411618	IDR	200,000	ADA
22	016	409402	29-Des-25	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU SEKRETAR 1091031211027290	A012A4F98G903CQP 251229066871	411618	IDR	1,100,000	ADA
23	016	409402	29-Des-25	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU SEKRETAR 1091031211027290	08F4A015PMTKT2B0 251229066925	411618	IDR	380,000	ADA
24	016	409402	29-Des-25	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU SEKRETAR 1091031211027290	679CC80V74PPLGBP 251229066993	411618	IDR	2,090,000	ADA
25	016	409402	29-Des-25	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU SEKRETAR 1091031211027290	C35BF015PB5VO9SO 251229067048	411618	IDR	512,900	ADA
26	016	409402	29-Des-25	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU SEKRETAR 1091031211027290	92C512ME8RA1QR4P 251229067093	411618	IDR	2,820,700	ADA
27	016	409402	29-Des-25	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU SEKRETAR 1091031211027290	1347B80V6KI1IF9T 251229067243	411618	IDR	493,500	ADA
28	016	409402	29-Des-25	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU SEKRETAR 1091031211027290	552535BMOFB5LQUG 251229067374	411618	IDR	2,714,000	ADA
29	016	409402	29-Des-25	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU SEKRETAR 1091031211027290	485BE4F98K434N5V 251229067718	411618	IDR	4,986,950	ADA
30	016	409402	29-Des-25	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU SEKRETAR 1091031211027290	27F5080V693POPFB 251229067796	411618	IDR	299,900	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
31	016	409402	29-Des-25	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU SEKRETAR 1091031211027290	F5DF33IRPCGNDIHQ 251229067843	411618	IDR	146,400	ADA
32	016	409402	29-Des-25	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU SEKRETAR 1091031211027290	ABF0B0TJ9OMR782N 251229067923	411618	IDR	146,400	ADA
33	016	409402	29-Des-25	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU SEKRETAR 1091031211027290	243C480V71MJDSL5 251229067988	411618	IDR	300,000	ADA
34	016	409402	29-Des-25	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU SEKRETAR 1091031211027290	59A4B0150CG97RS2 251229068067	411618	IDR	164,700	ADA
35	016	409402	29-Des-25	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU SEKRETAR 1091031211027290	BA4154F9811DRQ73 251229068127	411618	IDR	788,300	ADA
36	016	409402	29-Des-25	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU SEKRETAR 1091031211027290	16FD20TJ82S3M6NR 251229068216	411618	IDR	270,000	ADA
37	016	409402	29-Des-25	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU SEKRETAR 1091031211027290	F1A980TJ9ULJ27U7 251229068260	411618	IDR	270,000	ADA
38	016	409402	29-Des-25	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU SEKRETAR 1091031211027290	2ABD42ME92RR6CE7 251229068324	411618	IDR	1,854,000	ADA
39	016	409402	29-Des-25	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU SEKRETAR 1091031211027290	7B6BE3IRNKD1E02M 251229068367	411618	IDR	337,100	ADA

TOTAL

30,689,056

-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 199104152019011001 pada 30-12-
2025 15:58:40 WIB.



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi PNB KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU (692024)

Cetak Tanggal 30-12-2025

Periode : 2025-12

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	016	692024	11-Des-25	Viona Paulasari 0000000000000000	FF8066U8F8F072ML 000097271382	425151	IDR	113,306	ADA
2	016	692024	12-Des-25	Viona Paulasari 0000000000000000	5ADCD7QLV324K2H8 475947556171	425151	IDR	220,316	ADA
3	016	692024	17-Des-25	Viona Paulasari 0000000000000000	4B39A48VVOOJ04FO 008371216796	425151	IDR	220,316	ADA
4	016	692024	17-Des-25	Viona Paulasari 0000000000000000	D4DEB3CIFU66J5AJ 251217067808	425151	IDR	113,306	ADA
5	016	692024	29-Des-25	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU SEKRETAR 1091031211027290	0A69E5UFSP06A4LI 251229055341	815111	IDR	957,950	ADA
6	016	692024	29-Des-25	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU SEKRETAR 1091031211027290	A4FCD1GCDK4898K9 251229055490	815511	IDR	64,597,989	ADA

TOTAL

66,223,183

-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 199104152019011001 pada 30-12-
2025 15:58:40 WIB.



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pengembalian Belanja KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU (692024)

Cetak Tanggal 30-12-2025

Periode : 2025-12

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL								-	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 199104152019011001 pada 30-12-2025 15:58:40 WIB.

MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : 135
Eselon I : 01
Wilayah : 2600
Satuan Kerja : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu (692024)
No. Dokumen : 003
Tanggal : 23 Juni 2025
Tahun Anggaran : 2025
Keterangan : Jurnal balik atas pembayaran listrik bulan Des 2024
Kategori Jurnal Penyesuaian :

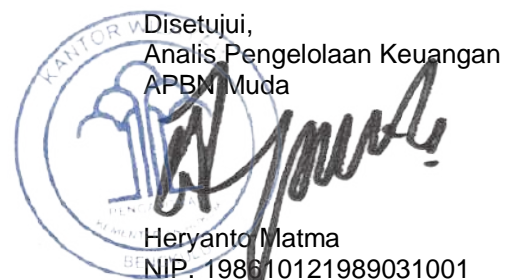
<input type="checkbox"/>	Pendapatan Diterima Dimuka	<input type="checkbox"/>	Kas Di Bendahara Penerimaan
<input type="checkbox"/>	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	<input type="checkbox"/>	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
<input type="checkbox"/>	Belanja Dibayar Dimuka	<input type="checkbox"/>	Kas Lainnya Di Bendahara Penerimaan
<input type="checkbox"/>	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	<input type="checkbox"/>	Persekot Gaji
<input type="checkbox"/>	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	<input type="checkbox"/>	Selisih Kurs
<input type="checkbox"/>	Penyusutan dan Amortisasi	<input type="checkbox"/>	Transfer
<input type="checkbox"/>	Persediaan	<input type="checkbox"/>	Reklasifikasi
<input type="checkbox"/>	Uang Muka Belanja	<input type="checkbox"/>	Koreksi Antar Beban
<input type="checkbox"/>	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	<input type="checkbox"/>	Koreksi Lainnya
<input type="checkbox"/>	Pembentukan/Koreksi/Reklasifikasi Piutang	<input checked="" type="checkbox"/>	Jurnal Manual

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1.	D	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	21.297.918	
2.	K	522111	Belanja Langganan Listrik		21.297.918

Direkam Tanggal: 23 Juni 2025
Operator SAKTI - GLP

Viona Paulasari
NIP. 197911222010122001

Disetujui,
Analisis Pengelolaan Keuangan
APBM Muda



Heryanto Matma
NIP. 198610121989031001

MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : 135
 Eselon I : 01
 Wilayah : 2600
 Satuan Kerja : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu (692024)
 No. Dokumen : 004
 Tanggal : 23 Juni 2025
 Tahun Anggaran : 2025
 Keterangan : Jurnal balik atas pendapatan yang masih harus diterima
 Kategori Jurnal Penyesuaian :

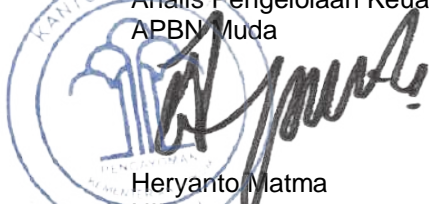
<input type="checkbox"/>	Pendapatan Diterima Dimuka	<input type="checkbox"/>	Kas Di Bendahara Penerimaan
<input type="checkbox"/>	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	<input type="checkbox"/>	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
<input type="checkbox"/>	Belanja Dibayar Dimuka	<input type="checkbox"/>	Kas Lainnya Di Bendahara Penerimaan
<input type="checkbox"/>	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	<input type="checkbox"/>	Persekot Gaji
<input type="checkbox"/>	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	<input type="checkbox"/>	Selisih Kurs
<input type="checkbox"/>	Penyusutan dan Amortisasi	<input type="checkbox"/>	Transfer
<input type="checkbox"/>	Persediaan	<input type="checkbox"/>	Reklasifikasi
<input type="checkbox"/>	Uang Muka Belanja	<input type="checkbox"/>	Koreksi Antar Beban
<input type="checkbox"/>	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	<input type="checkbox"/>	Koreksi Lainnya
<input type="checkbox"/>	Pembentukan/Koreksi/Reklasifikasi Piutang	<input checked="" type="checkbox"/>	Jurnal Manual

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1.	D	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.816.052	
2.	K	114311	Pendapatan yang Masih Harus Diterima		1.816.052

Direkam Tanggal: 23 Juni 2025
 Operator SAKTI - GLP

Viona Paulasari
 NIP. 197911222010122001

Disetujui,
 Analisis Pengelolaan Keuangan
 APBN Muda



Heryanto Matma
 NIP. 198610121989031001

MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : 135
Eselon I : 01
Wilayah : 2600
Satuan Kerja : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu (692024)
No. Dokumen : 005
Tanggal : 30 September 2025
Tahun Anggaran : 2025
Keterangan : Hapus Jurnal Balik saat likuidasi
Kategori Jurnal Penyesuaian :

<input type="checkbox"/>	Pendapatan Diterima Dimuka
<input type="checkbox"/>	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
<input type="checkbox"/>	Belanja Dibayar Dimuka
<input type="checkbox"/>	Belanja Yang Masih Harus Dibayar
<input type="checkbox"/>	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
<input type="checkbox"/>	Penyusutan dan Amortisasi
<input type="checkbox"/>	Persediaan
<input type="checkbox"/>	Uang Muka Belanja
<input type="checkbox"/>	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
<input type="checkbox"/>	Pembentukan/Koreksi/Reklasifikasi Piutang


<input type="checkbox"/>	Kas Di Bendahara Penerimaan
<input type="checkbox"/>	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
<input type="checkbox"/>	Kas Lainnya Di Bendahara Penerimaan
<input type="checkbox"/>	Persekot Gaji
<input type="checkbox"/>	Selisih Kurs
<input type="checkbox"/>	Transfer
<input type="checkbox"/>	Reklasifikasi
<input type="checkbox"/>	Koreksi Antar Beban
<input type="checkbox"/>	Koreksi Lainnya
<input checked="" type="checkbox"/>	Jurnal Manual

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1.	D	114311	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	1.816.052	
2.	K	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan		1.816.052

Dirakam Tanggal: 30 September 2025
Operator SAKTI - GLP

Viona Paulasari
NIP. 197911222010122001

Disetujui,
Analisis Pengelolaan Keuangan
APBN Muda



Heryanto Matma
NIP. 198610121989031001

MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : 135
Eselon I : 01
Wilayah : 2600
Satuan Kerja : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu (692024)
No. Dokumen : 006
Tanggal : 30 September 2025
Tahun Anggaran : 2025
Keterangan : Jurnal Koreksi Kurang Pengakuan Pendapatan Sewa yang Masih Harus Diterima
Kategori Jurnal Penyesuaian :

<input type="checkbox"/>	Pendapatan Diterima Dimuka
<input type="checkbox"/>	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
<input type="checkbox"/>	Belanja Dibayar Dimuka
<input type="checkbox"/>	Belanja Yang Masih Harus Dibayar
<input type="checkbox"/>	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
<input type="checkbox"/>	Penyusutan dan Amortisasi
<input type="checkbox"/>	Persediaan
<input type="checkbox"/>	Uang Muka Belanja
<input type="checkbox"/>	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
<input type="checkbox"/>	Pembentukan/Koreksi/Reklasifikasi Piutang

<input type="checkbox"/>	Kas Di Bendahara Penerimaan
<input type="checkbox"/>	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
<input type="checkbox"/>	Kas Lainnya Di Bendahara Penerimaan
<input type="checkbox"/>	Persekot Gaji
<input type="checkbox"/>	Selisih Kurs
<input type="checkbox"/>	Transfer
<input type="checkbox"/>	Reklasifikasi
<input type="checkbox"/>	Koreksi Antar Beban
<input type="checkbox"/>	Koreksi Lainnya
<input checked="" type="checkbox"/>	Jurnal Manual

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1.	D	114311	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	370.022	
2.	K	391119	Koreksi Lainnya		370.022

Direkam Tanggal: 30 September 2025
Operator SAKTI - GLP

Viona Paulasari
NIP. 197911222010122001



Disetujui,
Analisis Pengelolaan Keuangan
APBN Muda

Heryanto Matma
NIP. 198610121989031001

MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : 135
Eselon I : 01
Wilayah : 2600
Satuan Kerja : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu (692024)
No. Dokumen : 006
Tanggal : 30 September 2025
Tahun Anggaran : 2025
Keterangan : Jurnal Balik Jurnal Koreksi Kurang Pengakuan Pendapatan Sewa yang Masih Harus Diterima
Kategori Jurnal Penyesuaian :

<input type="checkbox"/>	Pendapatan Diterima Dimuka
<input type="checkbox"/>	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
<input type="checkbox"/>	Belanja Dibayar Dimuka
<input type="checkbox"/>	Belanja Yang Masih Harus Dibayar
<input type="checkbox"/>	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
<input type="checkbox"/>	Penyusutan dan Amortisasi
<input type="checkbox"/>	Persediaan
<input type="checkbox"/>	Uang Muka Belanja
<input type="checkbox"/>	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
<input type="checkbox"/>	Pembentukan/Koreksi/Reklasifikasi Piutang


<input type="checkbox"/>	Kas Di Bendahara Penerimaan
<input type="checkbox"/>	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
<input type="checkbox"/>	Kas Lainnya Di Bendahara Penerimaan
<input type="checkbox"/>	Persekot Gaji
<input type="checkbox"/>	Selisih Kurs
<input type="checkbox"/>	Transfer
<input type="checkbox"/>	Reklasifikasi
<input type="checkbox"/>	Koreksi Antar Beban
<input type="checkbox"/>	Koreksi Lainnya
<input checked="" type="checkbox"/>	Jurnal Manual

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1.	D	391119	Koreksi Lainnya	370.022	
2.	K	114311	Pendapatan yang Masih Harus Diterima		370.022

Direkam Tanggal: 30 September 2025
Operator SAKTI - GLP

Viona Paulasari
NIP. 197911222010122001

Disetujui,
Analisis Pengelolaan Keuangan
APBN Muda



Heryanto Matma
NIP. 198610121989031001

MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : 135
Eselon I : 01
Wilayah : 2600
Satuan Kerja : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu (692024)
No. Dokumen : 007
Tanggal : 30 September 2025
Tahun Anggaran : 2025
Keterangan : Jurnal Balik Setoran Bulan Agustus 2025 (Sewa Kantin Tahap I 16 Sept 2024 s.d 28 Mei 2025)
Kategori Jurnal Penyesuaian :

<input type="checkbox"/>	Pendapatan Diterima Dimuka
<input type="checkbox"/>	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
<input type="checkbox"/>	Belanja Dibayar Dimuka
<input type="checkbox"/>	Belanja Yang Masih Harus Dibayar
<input type="checkbox"/>	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
<input type="checkbox"/>	Penyusutan dan Amortisasi
<input type="checkbox"/>	Persediaan
<input type="checkbox"/>	Uang Muka Belanja
<input type="checkbox"/>	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
<input type="checkbox"/>	Pembentukan/Koreksi/Reklasifikasi Piutang


<input type="checkbox"/>	Kas Di Bendahara Penerimaan
<input type="checkbox"/>	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
<input type="checkbox"/>	Kas Lainnya Di Bendahara Penerimaan
<input type="checkbox"/>	Persekot Gaji
<input type="checkbox"/>	Selisih Kurs
<input type="checkbox"/>	Transfer
<input type="checkbox"/>	Reklasifikasi
<input type="checkbox"/>	Koreksi Antar Beban
<input type="checkbox"/>	Koreksi Lainnya
<input checked="" type="checkbox"/>	Jurnal Manual

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1.	D	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.200.000	
2.	K	114311	Pendapatan yang Masih Harus Diterima		1.200.000

Direkam Tanggal: 30 September 2025
Operator SAKTI - GLP

Viona Paulasari
NIP. 197911222010122001

Disetujui,
Analisis Pengelolaan Keuangan
APBM Muda



Heryanto Matma
NIP. 198610121989031001

MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : 135
Eselon I : 01
Wilayah : 2600
Satuan Kerja : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu (692024)
No. Dokumen : 007
Tanggal : 30 September 2025
Tahun Anggaran : 2025
Keterangan : Jurnal Balik atas Jurnal Balik Setoran Bulan Agustus 2025 (Sewa Kantin Tahap I 16 Sept 2024 s.d 28 Mei 2025)
Kategori Jurnal Penyesuaian :

<input type="checkbox"/>	Pendapatan Diterima Dimuka
<input type="checkbox"/>	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
<input type="checkbox"/>	Belanja Dibayar Dimuka
<input type="checkbox"/>	Belanja Yang Masih Harus Dibayar
<input type="checkbox"/>	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
<input type="checkbox"/>	Penyusutan dan Amortisasi
<input type="checkbox"/>	Persediaan
<input type="checkbox"/>	Uang Muka Belanja
<input type="checkbox"/>	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
<input type="checkbox"/>	Pembentukan/Koreksi/Reklasifikasi Piutang

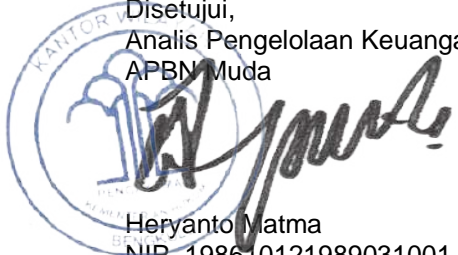
<input type="checkbox"/>	Kas Di Bendahara Penerimaan
<input type="checkbox"/>	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
<input type="checkbox"/>	Kas Lainnya Di Bendahara Penerimaan
<input type="checkbox"/>	Persekot Gaji
<input type="checkbox"/>	Selisih Kurs
<input type="checkbox"/>	Transfer
<input type="checkbox"/>	Reklasifikasi
<input type="checkbox"/>	Koreksi Antar Beban
<input type="checkbox"/>	Koreksi Lainnya
<input checked="" type="checkbox"/>	Jurnal Manual

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1.	D	114311	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	1.200.000	
2.	K	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan		1.200.000

Direkam Tanggal: 30 September 2025
Operator SAKTI - GLP

Viona Paulasari
NIP. 197911222010122001

Disetujui,
Analisis Pengelolaan Keuangan
APBN Muda



Heryanto Matma
NIP. 198610121989031001

MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : 135
Eselon I : 01
Wilayah : 2600
Satuan Kerja : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu (692024)
No. Dokumen : 008
Tanggal : 30 September 2025
Tahun Anggaran : 2025
Keterangan : Jurnal Koreksi kurang pengakuan pendapatan sewa yang masih harus diterima
Kategori Jurnal Penyesuaian :

<input type="checkbox"/>	Pendapatan Diterima Dimuka
<input type="checkbox"/>	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
<input type="checkbox"/>	Belanja Dibayar Dimuka
<input type="checkbox"/>	Belanja Yang Masih Harus Dibayar
<input type="checkbox"/>	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
<input type="checkbox"/>	Penyusutan dan Amortisasi
<input type="checkbox"/>	Persediaan
<input type="checkbox"/>	Uang Muka Belanja
<input type="checkbox"/>	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
<input type="checkbox"/>	Pembentukan/Koreksi/Reklasifikasi Piutang


<input type="checkbox"/>	Kas Di Bendahara Penerimaan
<input type="checkbox"/>	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
<input type="checkbox"/>	Kas Lainnya Di Bendahara Penerimaan
<input type="checkbox"/>	Persekot Gaji
<input type="checkbox"/>	Selisih Kurs
<input type="checkbox"/>	Transfer
<input type="checkbox"/>	Reklasifikasi
<input type="checkbox"/>	Koreksi Antar Beban
<input type="checkbox"/>	Koreksi Lainnya
<input checked="" type="checkbox"/>	Jurnal Manual

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1.	D	391119	Koreksi Lainnya	1.088.312	
2.	K	114311	Pendapatan yang Masih Harus Diterima		1.200.000

Direkam Tanggal: 30 September 2025
Operator SAKTI - GLP

Viona Paulasari
NIP. 197911222010122001

Disetujui,
Analisis Pengelolaan Keuangan
APBM Muda



Heryanto Matma
NIP. 198810121989031001

MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : 135
Eselon I : 01
Wilayah : 2600
Satuan Kerja : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu (692024)
No. Dokumen : 009
Tanggal : 30 September 2025
Tahun Anggaran : 2025
Keterangan : Jurnal balik setoran bulan Agustus 2025 (Sewa Kantin 16 Sept 2025 s.d 28 Mei 2025)
Kategori Jurnal Penyesuaian :

<input type="checkbox"/>	Pendapatan Diterima Dimuka
<input type="checkbox"/>	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
<input type="checkbox"/>	Belanja Dibayar Dimuka
<input type="checkbox"/>	Belanja Yang Masih Harus Dibayar
<input type="checkbox"/>	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
<input type="checkbox"/>	Penyusutan dan Amortisasi
<input type="checkbox"/>	Persediaan
<input type="checkbox"/>	Uang Muka Belanja
<input type="checkbox"/>	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
<input type="checkbox"/>	Pembentukan/Koreksi/Reklasifikasi Piutang

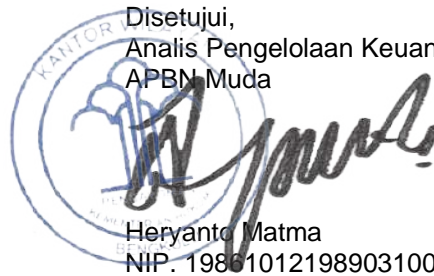
<input type="checkbox"/>	Kas Di Bendahara Penerimaan
<input type="checkbox"/>	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
<input type="checkbox"/>	Kas Lainnya Di Bendahara Penerimaan
<input type="checkbox"/>	Persekot Gaji
<input type="checkbox"/>	Selisih Kurs
<input type="checkbox"/>	Transfer
<input type="checkbox"/>	Reklasifikasi
<input type="checkbox"/>	Koreksi Antar Beban
<input type="checkbox"/>	Koreksi Lainnya
<input checked="" type="checkbox"/>	Jurnal Manual

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1.	D	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	727.740	
2.	K	114311	Pendapatan yang Masih Harus Diterima		727.740

Direkam Tanggal: 30 September 2025
Operator SAKTI - GLP

Viona Paulasari
NIP. 197911222010122001

Disetujui,
Analisis Pengelolaan Keuangan
APBN Muda



Heryanto Matma
NIP. 198610121989031001

MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : 135
Eselon I : 01
Wilayah : 2600
Satuan Kerja : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu (692024)
No. Dokumen : 010
Tanggal : 31 Desember 2025
Tahun Anggaran : 2025
Keterangan : Jurnal Pendapatan yang Masih Harus Diterima atas sewa kantin tahun 2024 yang terhutang
Kategori Jurnal Penyesuaian :

<input type="checkbox"/>	Pendapatan Diterima Dimuka
<input type="checkbox"/>	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
<input type="checkbox"/>	Belanja Dibayar Dimuka
<input type="checkbox"/>	Belanja Yang Masih Harus Dibayar
<input type="checkbox"/>	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
<input type="checkbox"/>	Penyusutan dan Amortisasi
<input type="checkbox"/>	Persediaan
<input type="checkbox"/>	Uang Muka Belanja
<input type="checkbox"/>	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
<input type="checkbox"/>	Pembentukan/Koreksi/Reklasifikasi Piutang


<input type="checkbox"/>	Kas Di Bendahara Penerimaan
<input type="checkbox"/>	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
<input type="checkbox"/>	Kas Lainnya Di Bendahara Penerimaan
<input type="checkbox"/>	Persekot Gaji
<input type="checkbox"/>	Selisih Kurs
<input type="checkbox"/>	Transfer
<input type="checkbox"/>	Reklasifikasi
<input type="checkbox"/>	Koreksi Antar Beban
<input type="checkbox"/>	Koreksi Lainnya
<input checked="" type="checkbox"/>	Jurnal Manual

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1.	D	114311	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	986.074	
2.	K	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan		986.074

Direkam Tanggal: 31 Desember 2025
Operator SAKTI - GLP

Viona Paulasari
NIP. 197911222010122001

Disetujui,
Analisis Pengelolaan Keuangan
APBN Muda



Heryanto Matma
NIP. 198610121989031001

MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : 135
Eselon I : 01
Wilayah : 2600
Satuan Kerja : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu (692024)
No. Dokumen : 011
Tanggal : 31 Desember 2025
Tahun Anggaran : 2025
Keterangan : Jurnal atas Pendapatan Sewa diterima dimuka atas sewa kantin per 1 Agustus 2025 s.d 31 Juli 2026
Kategori Jurnal Penyesuaian :

<input type="checkbox"/>	Pendapatan Diterima Dimuka
<input type="checkbox"/>	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
<input type="checkbox"/>	Belanja Dibayar Dimuka
<input type="checkbox"/>	Belanja Yang Masih Harus Dibayar
<input type="checkbox"/>	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
<input type="checkbox"/>	Penyusutan dan Amortisasi
<input type="checkbox"/>	Persediaan
<input type="checkbox"/>	Uang Muka Belanja
<input type="checkbox"/>	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
<input type="checkbox"/>	Pembentukan/Koreksi/Reklasifikasi Piutang

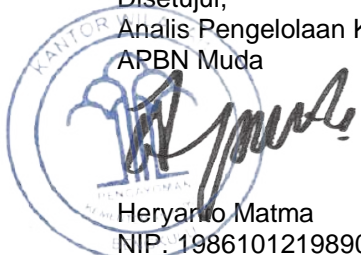
<input type="checkbox"/>	Kas Di Bendahara Penerimaan
<input type="checkbox"/>	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
<input type="checkbox"/>	Kas Lainnya Di Bendahara Penerimaan
<input type="checkbox"/>	Persekot Gaji
<input type="checkbox"/>	Selisih Kurs
<input type="checkbox"/>	Transfer
<input type="checkbox"/>	Reklasifikasi
<input type="checkbox"/>	Koreksi Antar Beban
<input type="checkbox"/>	Koreksi Lainnya
<input checked="" type="checkbox"/>	Jurnal Manual

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1.	D	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.452.055	
2.	K	219211	Pendapatan Sewa diterima dimuka		1.452.055

Direkam Tanggal: 31 Desember 2025
Operator SAKTI - GLP

Viona Paulasari
NIP. 197911222010122001

Disetujui,
Analisis Pengelolaan Keuangan
APBN Muda



Heryanto Matma
NIP. 198610121989031001

MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : 135
Eselon I : 01
Wilayah : 2600
Satuan Kerja : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu (692024)
No. Dokumen : 012
Tanggal : 31 Desember 2025
Tahun Anggaran : 2025
Keterangan : Jurnal pemakaian Listrik bulan Desember 2025
Kategori Jurnal Penyesuaian :

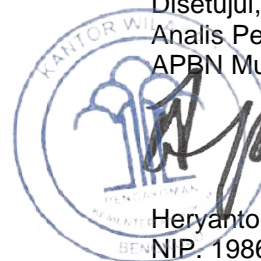
<input type="checkbox"/>	Pendapatan Diterima Dimuka
<input type="checkbox"/>	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
<input type="checkbox"/>	Belanja Dibayar Dimuka
<input type="checkbox"/>	Belanja Yang Masih Harus Dibayar
<input type="checkbox"/>	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
<input type="checkbox"/>	Penyusutan dan Amortisasi
<input type="checkbox"/>	Persediaan
<input type="checkbox"/>	Uang Muka Belanja
<input type="checkbox"/>	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
<input type="checkbox"/>	Pembentukan/Koreksi/Reklasifikasi Piutang

<input type="checkbox"/>	Kas Di Bendahara Penerimaan
<input type="checkbox"/>	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
<input type="checkbox"/>	Kas Lainnya Di Bendahara Penerimaan
<input type="checkbox"/>	Persekot Gaji
<input type="checkbox"/>	Selisih Kurs
<input type="checkbox"/>	Transfer
<input type="checkbox"/>	Reklasifikasi
<input type="checkbox"/>	Koreksi Antar Beban
<input type="checkbox"/>	Koreksi Lainnya
<input checked="" type="checkbox"/>	Jurnal Manual

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1.	D	522111	Beban Langganan Listrik	20.210.219	
2.	K	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar		20.210.219

Dirikam Tanggal: 31 Desember 2025
Operator SAKTI - GLP

Viona Paulasari
NIP. 197911222010122001



Disetujui,
Analisis Pengelolaan Keuangan
APBN Muda

Heryanto Matma
NIP. 198610121989031001

MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : 135
Eselon I : 01
Wilayah : 2600
Satuan Kerja : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu (692024)
No. Dokumen : 013
Tanggal : 31 Desember 2025
Tahun Anggaran : 2025
Keterangan : Jurnal pemakaian Telepon bulan Desember 2025
Kategori Jurnal Penyesuaian :

<input type="checkbox"/>	Pendapatan Diterima Dimuka
<input type="checkbox"/>	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
<input type="checkbox"/>	Belanja Dibayar Dimuka
<input type="checkbox"/>	Belanja Yang Masih Harus Dibayar
<input type="checkbox"/>	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
<input type="checkbox"/>	Penyusutan dan Amortisasi
<input type="checkbox"/>	Persediaan
<input type="checkbox"/>	Uang Muka Belanja
<input type="checkbox"/>	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
<input type="checkbox"/>	Pembentukan/Koreksi/Reklasifikasi Piutang

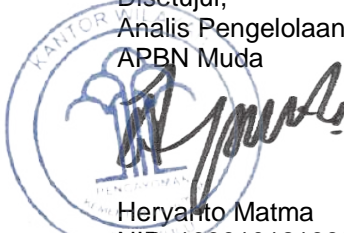
<input type="checkbox"/>	Kas Di Bendahara Penerimaan
<input type="checkbox"/>	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
<input type="checkbox"/>	Kas Lainnya Di Bendahara Penerimaan
<input type="checkbox"/>	Persekot Gaji
<input type="checkbox"/>	Selisih Kurs
<input type="checkbox"/>	Transfer
<input type="checkbox"/>	Reklasifikasi
<input type="checkbox"/>	Koreksi Antar Beban
<input type="checkbox"/>	Koreksi Lainnya
<input checked="" type="checkbox"/>	Jurnal Manual

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1.	D	522112	Beban Langganan Telepon	191.475	
2.	K	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar		191.475

Direkam Tanggal: 31 Desember 2025
Operator SAKTI - GLP

Viona Paulasari
NIP. 197911222010122001

Disetujui,
Analisis Pengelolaan Keuangan
APBN Muda



Heryanto Matma
NIP. 198610121989031001

MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : 135
Eselon I : 01
Wilayah : 2600
Satuan Kerja : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu (692024)
No. Dokumen : 014
Tanggal : 31 Desember 2025
Tahun Anggaran : 2025
Keterangan : Jurnal pemakaian Air bulan Desember 2025
Kategori Jurnal Penyesuaian :

<input type="checkbox"/>	Pendapatan Diterima Dimuka
<input type="checkbox"/>	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
<input type="checkbox"/>	Belanja Dibayar Dimuka
<input type="checkbox"/>	Belanja Yang Masih Harus Dibayar
<input type="checkbox"/>	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
<input type="checkbox"/>	Penyusutan dan Amortisasi
<input type="checkbox"/>	Persediaan
<input type="checkbox"/>	Uang Muka Belanja
<input type="checkbox"/>	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
<input type="checkbox"/>	Pembentukan/Koreksi/Reklasifikasi Piutang

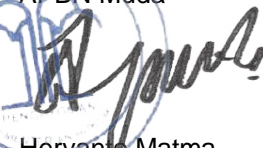
<input type="checkbox"/>	Kas Di Bendahara Penerimaan
<input type="checkbox"/>	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
<input type="checkbox"/>	Kas Lainnya Di Bendahara Penerimaan
<input type="checkbox"/>	Persekot Gaji
<input type="checkbox"/>	Selisih Kurs
<input type="checkbox"/>	Transfer
<input type="checkbox"/>	Reklasifikasi
<input type="checkbox"/>	Koreksi Antar Beban
<input type="checkbox"/>	Koreksi Lainnya
<input checked="" type="checkbox"/>	Jurnal Manual

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1.	D	522113	Beban Langganan Air	1.899.800	
2.	K	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar		1.899.800

Direkam Tanggal: 31 Desember 2025
Operator SAKTI - GLP

Viona Paulasari
NIP. 197911222010122001

Disetujui,
Analisis Pengelolaan Keuangan
APBN Muda



Heryanto Matma
NIP. 198610121989031001

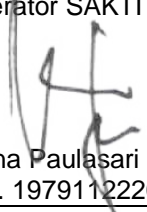
MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : 135
 Eselon I : 01
 Wilayah : 2600
 Satuan Kerja : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu (692024)
 No. Dokumen : 015
 Tanggal : 31 Desember 2025
 Tahun Anggaran : 2025
 Keterangan : Jurnal penyesuaian atas kesalahan belanja pemeliharaan gedung dan bangunan yang seharusnya membentuk peralatan dan mesin
 Kategori Jurnal Penyesuaian :

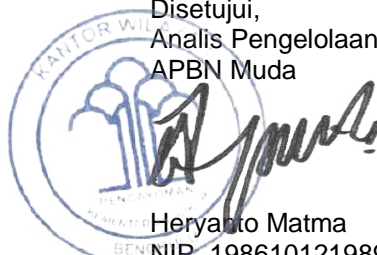
<input type="checkbox"/>	Pendapatan Diterima Dimuka	<input type="checkbox"/>	Kas Di Bendahara Penerimaan
<input type="checkbox"/>	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	<input type="checkbox"/>	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
<input type="checkbox"/>	Belanja Dibayar Dimuka	<input type="checkbox"/>	Kas Lainnya Di Bendahara Penerimaan
<input type="checkbox"/>	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	<input type="checkbox"/>	Persekot Gaji
<input type="checkbox"/>	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	<input type="checkbox"/>	Selisih Kurs
<input type="checkbox"/>	Penyusutan dan Amortisasi	<input type="checkbox"/>	Transfer
<input type="checkbox"/>	Persediaan	<input type="checkbox"/>	Reklasifikasi
<input type="checkbox"/>	Uang Muka Belanja	<input type="checkbox"/>	Koreksi Antar Beban
<input type="checkbox"/>	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	<input type="checkbox"/>	Koreksi Lainnya
<input type="checkbox"/>	Pembentukan/Koreksi/Reklasifikasi Piutang	<input checked="" type="checkbox"/>	Jurnal Manual

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1.	D	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	7.600.000	
2.	K	523111	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan		7.600.000

Direkam Tanggal: 31 Desember 2025
 Operator SAKTI - GLP


 Viona Paulasari
 NIP. 197911222010122001

Disetujui,
 Analis Pengelolaan Keuangan
 APBN Muda


 Heryanto Matma
 NIP. 198610121989031001